



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
6. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di tingkat pusat.
7. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut RAD PD Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di tingkat daerah.

8. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak penyandang disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
12. Pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengarusutamaan penyandang disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,

suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

15. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitan yang disandang seseorang.
16. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
20. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
21. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan penyandang disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini dimaksudkan untuk:

- a. menyediakan acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun Masyarakat;
- c. menyediakan acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas;
- e. membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- f. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini adalah:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
- b. Perencanaan Penganggaran Inklusif;
- c. Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kerjasama;
- f. Pendanaan; dan
- g. Penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) RAD PD Provinsi merupakan dokumen perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RAD PD Provinsi disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini dimaksudkan untuk:

- a. menyediakan acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat;
- c. menyediakan acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan

- upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - e. membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
 - f. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Bagian Kedua

Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi dan Target Capaian

Pasal 7

- (1) Mengacu pada RIPD dan RAN PD, maka penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi akan berdasarkan pada beberapa sasaran strategis berikut ini:
 - a. pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas;
 - b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas;
 - c. perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas;
 - e. pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas;
 - f. pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas; dan
 - g. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan sasaran strategis sebagaimana pada ayat (1), dijabarkan secara lebih lanjut dalam naskah Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan sasaran strategis, target capaian, dan strategi implementasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Kegiatan utama untuk pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor; dan
- b. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
- b. akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
- c. penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan

- d. penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi.

Pasal 12

Kegiatan utama untuk pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 13

Kegiatan utama untuk ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan:

- a. memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta di seluruh sektor; dan
- b. memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 14

Kegiatan utama untuk pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan:

- a. memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas;
- b. memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas;
- c. memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; dan
- d. membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga.

Pasal 15

Kegiatan utama untuk akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas;
- b. pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif;
- c. perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan nasional bagi penyandang disabilitas; dan
- d. penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau penyandang disabilitas.

Pasal 16

Penjabaran lebih lanjut mengenai kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 dituangkan dalam naskah Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaksana Kegiatan
Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi di tingkat provinsi untuk penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Tim Koordinasi di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan berbagai komponen, antara lain:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bengkulu; dan
 - c. Instansi vertikal.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
INKLUSIF DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan memerhatikan kebijakan daerah dan kebijakan nasional;
 - c. Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (4) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Pasal 19

Tujuan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;

- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi penyandang disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 20

Integrasi kepentingan penyandang disabilitas dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. analisis Inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada penyandang disabilitas; dan
- b. pelibatan penyandang disabilitas dalam formulasi kebijakan melalui Forum Tematik Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data.

Pasal 22

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas berdasarkan pada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok yang bukan penyandang disabilitas, serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 23

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) di tingkat daerah dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga membuka

wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;

- d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan penyandang disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

BAB VI
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN RENCANA AKSI
DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi atau Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.
- (4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi menerima laporan evaluasi dari Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.

Pasal 27

Gubernur mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan RAD PD Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR **31**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005



RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS (RAD PD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024



**BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan. Kerentanan penyandang disabilitas disebabkan oleh kekhususan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan yang dimaksud berupa hambatan struktural maupun budaya yang berakar dari cara pandang yang tidak tepat terhadap disabilitas. Sehubungan dengan kekhususan dan kerentanan tersebut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas melalui instrumen hukum. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan dan kebijakan yang inklusif disabilitas. Di samping itu, juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memastikan diterapkannya pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Bengkulu 2023-204 secara substansi sejalan dengan materi muatan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD). serta pelibatan dan partisipasi penyandang disabilitas.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 dapat dijadikan Acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat; dan Acuan dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan multisektor yang efektif untuk mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bengkulu, 2023

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	lv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Proses Penyusunan	8
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS	13
2.1 Profil dan Karakteristik Daerah	13
2.2 Analisis Inklusif Disabilitas di Daerah	21
2.3 Tantangan Dalam Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah	48
2.4 Potensi Daerah Dalam Upaya Penghormatan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	59
BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD PROVINSI	63
3.1. Tujuan	63
3.2. Sasaran Strategis dan Kebijakan	64
3.3. Strategi Implementasi RAD PD	65
3.4. Rencana Aksi	68
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	444
BAB V PENUTUP	446

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2022	17
Tabel 2.2	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	19
Tabel 2.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	21
Tabel 2.5	Penduduk Usia Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Periode Feb.i 2021	26
Tabel 2.6	Angkatan Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Periode Februari 2021	27
Tabel 2.7	Penduduk Disabilitas yang Bekerja menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Periode Feb. 2021	28
Tabel 2.8	Tenaga Kerja yang Menggunakan Internet pada Pekerjaan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	30
Tabel 2.9	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penghasilan Perbulan Tahun 2023	32
Tabel 2.10	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi Rumah Tahun 2023	34
Tabel 2.11	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023	35
Tabel 2.12	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir Tahun 2023	36
Tabel 2.13	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu Tahun 2023	37
Tabel 2.14	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri Tahun 2023	38
Tabel 2.15	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan BPJS Tenaga Kerja Tahun 2023	39
Tabel 2.16	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keadaan Rumah Tahun 2023	40
Tabel 2.17	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Sumber Air Tahun 2023	41
Tabel 2.18	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan Yang Sudah Diberikan Tahun 2023	42

Tabel 2.19	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Yang Diperlukan Tahun 2023	43
Tabel 2.20	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT Thn. 2023	44
Tabel 2.21.	Data Jumlah Komponen Disabilitas Program Keluarga Harapan Provinsi Bengkulu Tahun 2023	45
Tabel 2.22	Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu	46
Tabel 2.23	Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas/Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2022	61
Tabel 2.24	Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2022	62
Tabel 3.1	Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	64
Tabel 3.2	Strategi Implementasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	65
Tabel 3.3	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024	69
Tabel 3.4	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2024	106
Tabel 3.5	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kaur Tahun 2023-2024	142
Tabel 3.6	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2024	172
Tabel 3.7	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023-2024	201
Tabel 3.8	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Seluma Tahun 2023-2024	251
Tabel 3.9	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu Tahun 2023-2024	288
Tabel 3.10	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lebong Tahun 2023-2024	323
Tabel 3.11	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2024	357
Tabel 3.12	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2024	383
Tabel 3.13	Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Mukomuko Tahun 2023-2024	419

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Kabupaten/Kota per Provinsi yang Memiliki Perda Disabilitas	16
Grafik 2.2	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2023	17
Grafik 2.3	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas Tahun 2023	18
Grafik 2.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	19
Grafik 2.5	Persentase Penduduk Miskin Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (%)	20
Grafik 2.6	Jumlah Penduduk Miskin Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	20
Grafik 2.7	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	21
Grafik 2.8	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (%)	23
Grafik 2.9	Jumlah Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	23
Grafik 2.10	Persentase Penerima Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	24
Grafik 2.11	Jumlah Penerima Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	24
Grafik 2.12	Penduduk Usia Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi Periode Februari 2021	26
Grafik 2.13	Angkatan Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi Periode Februari 2021	28
Grafik 2.14	Penduduk Disabilitas yang Bekerja menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Periode Februari 2021	29
Grafik 2.15	Tenaga Kerja yang Menggunakan Internet pada Pekerjaan Utama menurut Provinsi Periode Februari 2021	30

Grafik 2.16	Persentase Peradilan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (%)	31
Grafik 2.17	Jumlah Peradilan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	31
Grafik 2.18	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penghasilan Perbulan Tahun 2023	32
Grafik 2.19	Persentase Kepemilikan Bangunan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (%)	33
Grafik 2.20	Jumlah Kepemilikan Bangunan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2023	33
Grafik 2.21	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi Rumah Tahun 2023	34
Grafik 2.22	Persentase Kepemilikan Tabungan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	35
Grafik 2.23	Jumlah Kepemilikan Tabungan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2021	35
Grafik 2.24	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023	36
Grafik 2.25	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir Tahun 2023	36
Grafik 2.26	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu Tahun 2023	37
Grafik 2.27	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri Tahun 2023	38
Grafik 2.28	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan BPJS Tenaga Kerja Tahun 2023	39
Grafik 2.29	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keadaan Rumah Tahun 2023	40
Grafik 2.30	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Sumber Air Tahun 2023	41
Grafik 2.31	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan Yang Sudah Diberikan Tahun 2023	42

Grafik 2.32	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Yang diperlukan Tahun 2023	43
Grafik 2.33	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT Tahun 2023	44
Grafik 2.34	Data Jumlah Komponen Disabilitas Program Keluarga Harapan Provinsi Bengkulu Tahun 2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Dalam Analisis Awal Situasi
Penyandang Disabilitas di Daerah 10

Gambar 4.1 Alur Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Penyandang 445
Disabilitas Provinsi

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS PROVINSI BENGKULU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial sejak berpuluh dekade lalu, utamanya di belahan dunia Utara (global North). Berawal dari perlawanan atas dominasi model medik disabilitas—atau dikenal sebagai model individual—menjadi model sosial (social model of disability), hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat, martabat dan Hak-Hak Disabilitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Puncak pengakuan tersebut adalah diterbitkannya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau dikenal sebagai ‘the Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (CRPD).

Sebagai instrumen HAM, CRPD secara tegas mendudukan disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapapun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lain. Sebagai instrumen yang mengikat secara hukum bagi negaranegara yang meratifikasinya, CRPD, dengan perangkat pemantauannya di PBB, wajib diimplementasikan setiap negara pihak. Dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuannya, pemerintah wajib melaporkan secara berkala kepada PBB, yang dalam hal ini diwakili oleh komite CRPD.

Pengesahan CRPD dilakukan setelah ad Hoc Committee of General assembly berhasil menegosiasikan rancangan konvensi yang berlangsung dari 2002 sampai 2006. Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan pada 13 Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum. Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani UN-CRPD pada 30 Maret 2007. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi UN-CRPD

pada 2011 melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011, yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.

Perlu waktu sembilan tahun hingga akhirnya Negara Republik Indonesia menandatangani, meratifikasi, serta mengubah undangundang organik mengenai disabilitas sebagai turunan atas CRPD. Undang-undang organik ini sekaligus mengubah 'konsepsi kecacatan' yang telah dipakai pemerintah sejak kemerdekaan menjadi 'konsepsi disabilitas'. Rentang waktu yang panjang ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan isu dan kepentingan penyandang disabilitas ke dalam kebijakan bukanlah sesuatu yang mudah diterima di lingkungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain CRPD, Indonesia juga menaruh komitmen pada sejumlah instrumen global seperti 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' (TPB) atau sustainable development Goals (SDGs), serta New Urban Development agenda, yang kesemuanya mempunyai keselarasan dalam mengarusutamakan hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berkewajiban untuk secara periodik menyampaikan informasi kepada dunia global atas capaian dari berbagai instrumen global di atas.

Proses panjang ratifikasi CRPD, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak lepas dari dorongan dan partisipasi penuh berbagai kelompok dan organisasi disabilitas serta masyarakat sipil lainnya. Banyaknya kasus diskriminasi dan ketidaksetaraan atas dasar disabilitas telah menyatukan gerak individu, kelompok dan organisasi penyandang disabilitas untuk samasama mendorong tatanan kebijakan yang lebih adil.

Setelah adanya UU Penyandang Disabilitas, kerja panjang negara adalah menurunkan norma hak asasi yang tercantum dalam CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam aturan yang lebih teknis, penegakan aturannya, penerjemahan ke dalam strategi dan program pembangunan, hingga akhirnya kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hadir secara nyata dan dirasakan oleh warga penyandang disabilitas di Indonesia.

Selain menyusun pedoman pemenuhan Hak-Hak Disabilitas melalui peraturan pemerintah dan turunannya seperti Peraturan Presiden, pada saat yang sama, diperlukan upaya sistematis untuk memantau perkembangan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan Hak-Hak Disabilitas secara berkelanjutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan satu kerangka instrumen pemantauan menyeluruh dan dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas maupun masyarakat sipil lainnya. Untuk itulah, instrumen indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas berikut alat pemantauannya ini disusun.

Proses penyusunannya berlangsung secara bertahap dan awalnya diinisiasi oleh jaringan organisasi [pemerhati] disabilitas sampai akhirnya mendapatkan dukungan dari

berbagai pihak termasuk pemerintah melalui BAPPENAS dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) serta organisasi-organisasi mitra pembangunan, khususnya AIPJ2. Upaya ini merupakan wujud kontribusi dalam mempercepat upaya pemantauan sistematis atas komitmen dan kinerja pemerintah dalam pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

Dengan adanya instrumen ini, diharapkan, baik pemerintah sebagai ‘duty bearer’—yang kini akan diperkuat lagi dengan terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND), maupun organisasi penyandang disabilitas sebagai institusi yang mewakili ‘rights holders’, dapat secara sistematis melakukan pemantauan atas kemajuan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, dan dapat meningkatkan dialog konstruktif untuk kemajuan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan implementasi atas pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, diantaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap Negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Oleh karena itu, peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknyapun diabaikan.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai resiko untuk kecacatan, situasi ini diperburuk oleh rendahnya keselamatan lalu lintas dan keselamatan kerja. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, butuh bantuan dalam segala hal. Persepsi ini jelas sekali terlihat dari persyaratan utama seleksi kerja, pendidikan, dan lain-lain yang berbunyi “sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter”. Hal tersebut secara langsung telah

meminggirkan pendaftar disabilitas yang mungkin memiliki kekurangan dari segi fisik namun sangat kompeten dan potensial. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional.

Negara Republik Indonesia berkomitmen dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut telah dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya dipandang sebagai obyek menjadi subyek yang harus dilindungi haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi konvensi PBB atas pemenuhan hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas membutuhkan sinergi keseluruhan sektor pembangunan, tidak bisa hanya bertumpu pada sektor tertentu saja.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas tidaklah mudah. Keterbatasan data, analisis, dana dan political will sering menghambat penyandang disabilitas mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, peradilan, dan berbagai layanan publik, hingga dalam situasi krisis atau bencana.

Terdapat ruang bagi perbaikan agar berbagai kebijakan dapat lebih inklusif, berkeadilan, dan menyeluruh. Salah satu indikator kemajuan sebuah negara ternyata juga terkait seberapa baik negara itu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga yang rentan, seperti penyandang disabilitas. Salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas juga menjadi dasar dilaksanakannya pemantauan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan disabilitas. Hal tersebut mendorong upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan. Kerentanan penyandang disabilitas disebabkan oleh kekhususan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan yang dimaksud berupa hambatan struktural maupun budaya yang berakar dari cara pandang yang tidak tepat terhadap disabilitas. Sehubungan dengan kekhususan dan

kerentanan tersebut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus. Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas melalui instrumen hukum.

Peraturan pemerintah ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan dan kebijakan yang inklusif disabilitas. Di samping itu, Peraturan Presiden ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memastikan diterapkannya pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia.

Dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya sekedar memastikan akses kepada layanan perlindungan sosial, tetapi juga memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam tiap tahapan pembangunan yang multi dimensional. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan amanat ini, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk itu, menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 dimana disebutkan upaya penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) merupakan salah satu acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. RIPD merupakan perencanaan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun dan diturunkan dalam perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam bentuk RAN PD dan di tingkat daerah dalam bentuk RAD PD Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur diharapkan Kabupaten/Kota berperan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ketujuh sasaran strategis dalam RIPD terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Penyusunan RAD PD Provinsi mengacu dari apa yang telah tertuang dalam RIPD dan RAN PD. Di dalam RAN PD terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 arah

kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar secara substansi dapat sejalan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, RIPD, RAN PD,

1.2.2 TUJUAN

- a. Acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat; dan
- c. Acuan dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan multisektor yang efektif untuk mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Covention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
2. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
18. Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

1.4 PROSES PENYUSUNAN

- 1.4.1 Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 - a. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 mengatur bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau menunjuk Bappeda Provinsi sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda

Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) setempat.

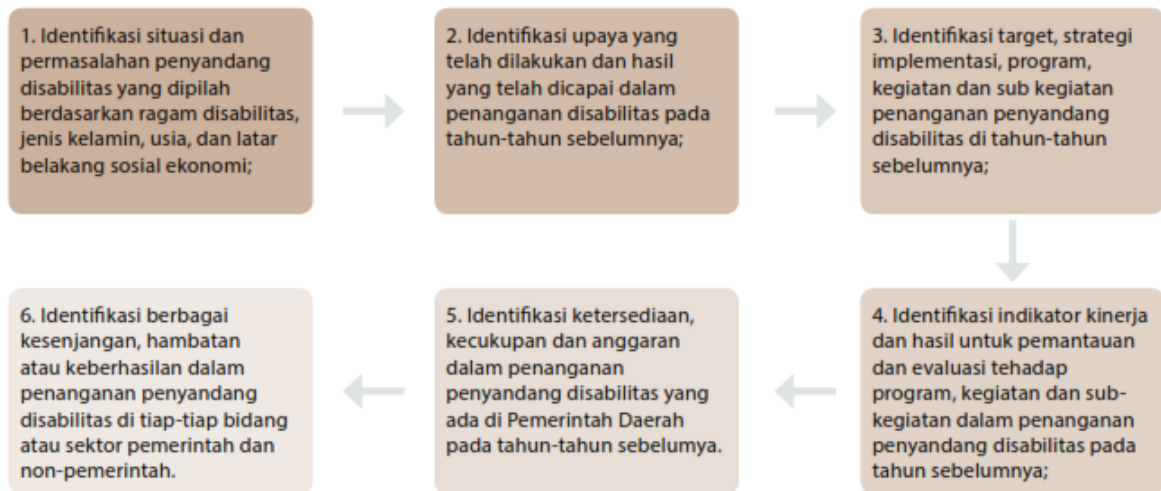
- b. Konsistensi keanggotaan dari Tim Koordinasi RAD PD Provinsi selama masa jabatannya, di mana penunjukan/penentuan keanggotaannya berbasiskan nama perorangan.
- c. Keanggotaan Tim Koordinasi RAD PD Provinsi yang berasal dari penyandang disabilitas dapat diidentifikasi dari anggota jaringan penyandang disabilitas di daerah yang selama ini aktif menyuarakan dan memperjuangkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- d. Tim Koordinasi RAD PD Provinsi secara umum bertugas untuk:
 - 1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, penyelenggaraan, pemantuan, dan evaluasi RAD PD Provinsi;
 - 2. Peningkatan kapasitas dinas/badan di Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui pengarusutamaan isu disabilitas dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap-tiap dinas/badan tersebut.
- e. Dengan mempertimbangkan keluasan dari tugas dan fungsi Tim Koordinasi RAD PD Provinsi, penguatan kapasitas dan sensitisasi tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu dilakukan dalam tahapan persiapan ini dan juga pada tahapan-tahapan selanjutnya perumusan dan penyusunan RAD PD Provinsi.
- f. Selain topik-topik penguatan kapasitas dan sensitisasi tentang disabilitas seperti yang disusun untuk pengembangan kapasitas bagi Forum Tematik Disabilitas (lihat Tabel 15), Tim Koordinasi RAD PD Provinsi juga perlu mendalami dan memahami Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berikut kebijakan turunannya, serta etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas

1.4.2 Persiapan Teknis dan Analisis Situasi Penyandang Disabilitas

- a. Tim Koordinasi RAD PD Provinsi melakukan identifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RAD PD Provinsi.
- b. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi untuk melakukan analisis data situasi penyandang disabilitas sebagai persiapan untuk Konsultasi Publik (sosialisasi penyusunan RAD PD Provinsi).
- c. Analisis data situasi penyandang disabilitas disusun di tahap awal perumusan dan penyusunan RAD PD Provinsi untuk memahami situasi terkini terkait dengan permasalahan penyandang disabilitas di wilayah tertentu.
- d. Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan analisis awal situasi penyandang disabilitas:

Gambar 1.1

Tahapan Dalam Analisis Awal Situasi Penyandang Disabilitas di Daerah



- e. Analisis awal situasi penyandang disabilitas dimaksudkan sebagai data pembuka wawasan dalam Konsultasi Publik tentang penanganan disabilitas, baik dari sisi besarnya masalah, pelayanan atau permasalahan kontekstual (kebijakan/regulasi, sikap masyarakat atau perubahan kepemimpinan).
- f. Hasil analisis awal menjadi dasar untuk pendalaman kesenjangan disabilitas dengan perspektif pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, prioritas pembangunan daerah, mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, serta struktur penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran RAD PD Provinsi

1.4.3 Konsultasi Publik

- a. Konsultasi publik akan menyajikan dan membahas hasil analisis awal tentang situasi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
- b. Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk memberi masukan atas strategi, kegiatan, dan penganggaran dalam RAD PD Provinsi agar bisa responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyelenggaraannya.
- c. Sasaran konsultasi publik adalah Perangkat Daerah Provinsi, lembaga penyelenggara pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan komponen masyarakat seperti organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, akademisi, serta pihak-pihak lain yang terkait.
- d. Konsultasi publik diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Tim Koordinasi untuk meningkatkan perhatian publik atas permasalahan disabilitas di wilayah tersebut.

- e. Konsultasi publik sebagai sarana untuk memperoleh partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan RAD PD Provinsi melalui mekanisme penyampaian aspirasi yang responsif dan transparan.
 - f. Dalam proses konsultasi publik, selain pemaparan hasil analisis awal situasi penyandang disabilitas juga dipaparkan tentang rencana kerja penyusunan RAD PD Provinsi dan mekanisme partisipasi masyarakat dan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan RAD PD Provinsi.
- 1.4.4 Perumusan Dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Penyusunan RAD PD Provinsi mengacu dari apa yang telah tertuang dalam RIPD dan RAN PD. Di dalam RAN PD terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.
- 1.4.5 Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi
- a. Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 03 Tahun 2021, RAD PD Provinsi akan diundangkan dengan Peraturan Gubernur agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan secara lintas sektor.
 - b. Pada tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur RAD PD Provinsi:
 1. Tim Koordinasi RAD PD Provinsi/Bappeda Provinsi menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur RAD PD Provinsi kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah dengan berkonsultasi kepada Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri.
 2. Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tersebut dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan melibatkan dinas/badan pemrakarsa dan yang terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyusunan Propemperda/Propemperkada di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) adalah Biro Hukum/Bagian Hukum.
 3. Biro Hukum/Bagian Hukum selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan rancangan Propemperda/Propemperkada dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 4. Hasil koordinasi ini disepakati menjadi Propemperda.
 - c. Peraturan Gubernur RAD PD Provinsi yang telah ditetapkan (ditandatangani oleh Gubernur) akan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah dan pengundangan dilakukan oleh

Sekretaris Daerah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dari tahapan-tahapan penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya disusun dokumen strategis daerah bagi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
 - 1.4 Proses Penyusunan
 - 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB II PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS
 - 2.1 Profil dan Karakteristik Daerah
 - 2.2 Analisis Inklusif Disabilitas di Daerah
 - 2.3 Tantangan Dalam Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah
 - 2.4 Potensi Daerah Dalam Upaya Penghormatan Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- BAB III SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
 - 3.1. Tujuan
 - 3.2. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
 - 3.3. Strategi Implementasi RAD-PD
 - 3.4. Rencana Aksi

- BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- BAB V PENUTUP

BAB II

PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI BENGKULU

2.1 Profil dan Karakteristik Daerah

Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak.

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses Perencanaan, Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan Inklusif Disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara:

1. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Orang-orang ini juga harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

2. Hak Aksesibilitas

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Jika hal ini tidak tercukupi, artinya negara gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk hidup lebih baik.

3. Hak untuk Hidup

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Ada hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu:

- Memiliki hak atas penghormatan integritas.
- Memiliki hak hidup yang sama.
- Mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup.
- Memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, pengucilan, hingga ancaman.
- Memiliki jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan.
- Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi.

4. Hak Peningkatan Kesadaran

Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menghormati hak-hak dan martabat pada orang-orang yang memiliki kekurangan ini.

5. Hak Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan

Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab, para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara juga harus memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana terkait meningkatkan kapasitas secara nasional, untuk menyukseskan berbagai hak-hak penyandang disabilitas.

Hal ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian, atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas. Selain itu, modifikasi dan penyesuaian perlu dilakukan, guna menjamin pelaksanaan kesetaraan hak asasi manusia terhadap para penyandang disabilitas.

Ini juga berhubungan dengan desain berbagai tempat umum agar tetap bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Artinya, berbagai desain produk, lingkungan, dan pelayanan bisa digunakan semua orang. Meski begitu, alat bantu mungkin masih diperlukan pada kondisi tertentu.

Konvensi Hak-Hak Disabilitas (CRPD) memberikan perspektif dan pendekatan baru terhadap penyandang disabilitas yang lebih berfokus pendekatan hak dibandingkan charity.

CRPD menempatkan penyandang disabilitas sebagai 'subyek' hak layaknya manusia yang lain, diperlakukan setara dan non-diskriminatif, bukan obyek sebagaimana dalam pendekatan charity. Dalam konteks Indonesia, perubahan pendekatan ini ditegaskan melalui revisi UU Penyandang Disabilitas di dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perspektif hak asasi manusia menempatkan setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir atau memulai kehidupannya, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, sebagai warga negara memiliki kondisi tertentu yang membedakannya dengan warga negara lain, khususnya mereka yang tidak mengalami kondisi disabilitas. Sebagai prasyarat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, termasuk penghapusan segala bentuk diskriminasi, penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang disabilitas secara komprehensif.

Jika mengacu pada pokok-pokok pikiran Konvensi Hak-Hak Disabilitas yang diratifikasi Pemerintah Indonesia, maka pengertian penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Data Susenas menyediakan informasi untuk melihat kategori disabilitas berdasarkan ragamnya yaitu: (1) disabilitas fisik (daksa, pengguna kursi roda, orang yang pernah mengalami kusta, dll); (2) sensorik (Tunanetra, Tuli, rungu wicara); (3) mental/psikososial (ODGJ, dll); (4) dan intelektual (kesulitan belajar, *down syndrome*, dll).

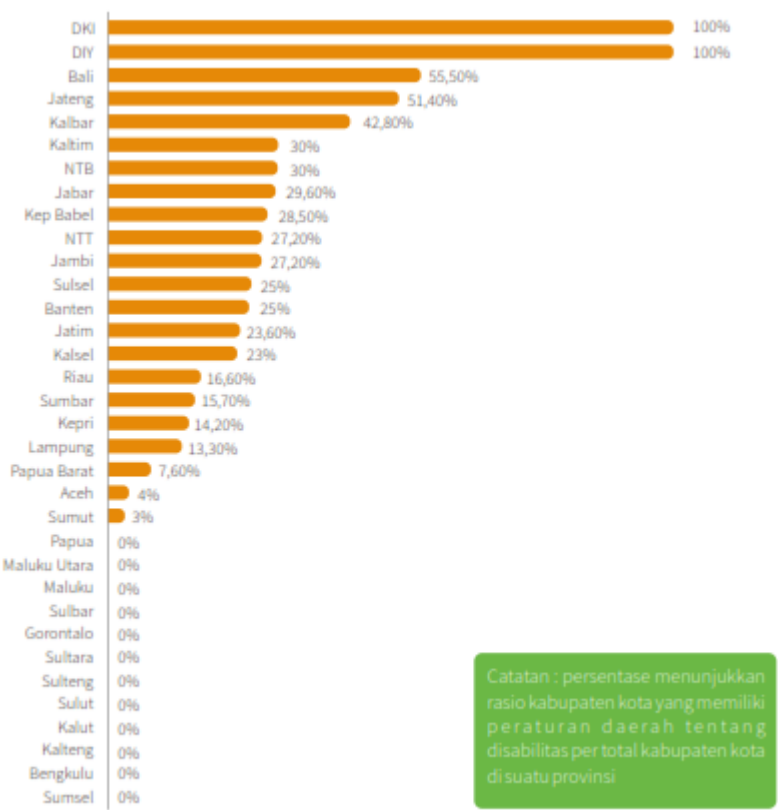
UU 8/2016 pada dasarnya tidak mendelegasikan secara langsung untuk pemerintah daerah membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Namun, dalam UU 8/2016 ada 95 ketentuan yang mengatur perihal tugas dan fungsi pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Perda, agar kemudian dapat dilaksanakan, khususnya untuk masuk dalam perencanaan dan penggaran daerah. Pemetaan Perda dalam bagian ini akan menunjukan sejauh mana pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas sudah dilakukan di wilayah-wilayah Indonesia. Dengan data dan informasi dari pemetaan ini akan mempermudah untuk menentukan langkah-

langkah lanjutan dalam upaya mendorong pembentukan dasar hukum yang leboh operasional dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sampai Desember 2021, Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas sudah dibentuk di 109 dari 548 (19,8%) daerah di Indonesia. Dari 109 daerah tersebut, 21 diantaranya adalah Provinsi (61,7%); 25 Kota (26,8%); dan 63 Kabupaten (15,1%). Berikut adalah rincian 109 Perda tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

Grafik 2.1

Persentase Kabupaten/Kota per Provinsi yang Memiliki Perda Disabilitas



Sumber : Pemetaan dan Pengolahan data oleh peneliti

Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa masih ada 13 Provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya belum ada yang memiliki Perda tentang penyandang disabilitas. Provinsi yang kabupaten/kotanya sudah mencapai 100% memiliki Perda tentang penyandang disabilitas baru D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta, sedangkan yang capaiannya lebih dari 50% baru kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Jawa Tengah. Selebihnya masih di bawah 50%. Provinsi dan Kabupaten/Kota Bengkulu belum memiliki Perda tentang Penyandang Disabilitas. Angka tersebut menunjukan bahwa upaya mendorong pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas masih perlu diperkuat.

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu adalah berada pada 1.398 desa/kelurahan tersebar di 10 Kabupaten/Kota, terbanyak adalah Tuna Grahita sebanyak 877 orang, diikuti Tuna Daksa sebanyak 756 orang, Tuna Laras 607 orang, Tuna Rungu 595 orang, Tuna Netra 545 orang, Tuna Rungu-Wicara 501 orang, Tuna

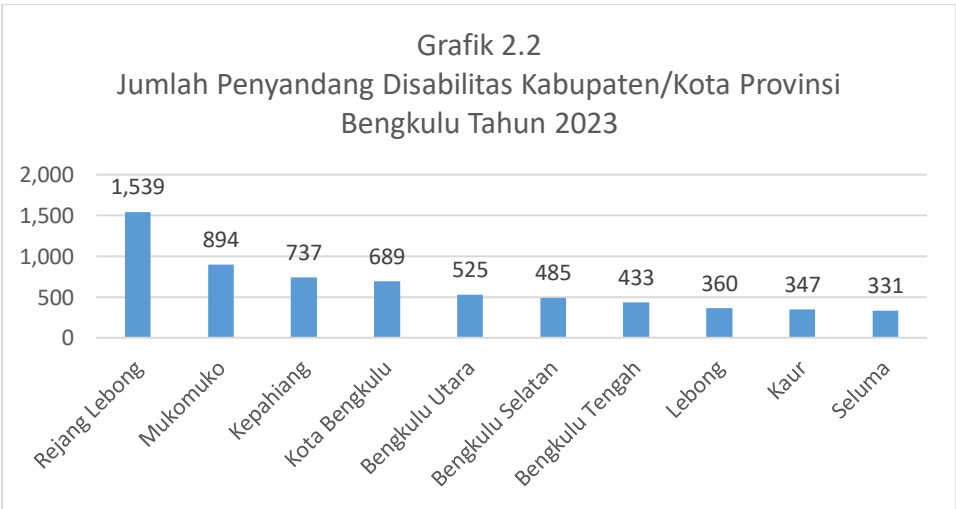
Wicara 500 orang, Tuna Ganda 125 orang, dan Tuna Eks Sakit Kusta 46 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Disabilitas
Provinsi Bengkulu Tahun 2022

BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PENYANDANG DISABILITAS										PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2022										
Kabupaten/Kota	Ada Penyandang Disabilitas	Jenis Disabilitas								
		Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Rungu- Wicara	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Tuna Laras	Tuna Eks Sakit Kusta	Tuna Ganda
Bengkulu Selatan	151	55	68	60	58	83	100	82	15	8
Rejang Lebong	148	68	76	62	56	91	95	78	4	11
Bengkulu Utara	209	76	78	77	70	135	127	90	6	21
Kaur	167	63	68	53	50	87	98	61	2	18
Seluma	194	96	104	80	81	87	101	76	4	14
Mukomuko	136	40	32	37	64	69	97	45	5	9
Lebong	94	39	51	33	35	56	72	45	1	5
Kepahiang	115	37	49	39	35	65	74	60	8	8
Bengkulu Tengah	126	44	53	40	36	57	75	49	1	16
Kota Bengkulu	58	27	16	19	16	26	38	21	0	15
JUMLAH	1.398	545	595	500	501	756	877	607	46	125

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu tersebar di 10 Kabupaten Kota adalah 5.907 orang, terbanyak Penyandang Disabilitas berada di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1.539 orang, Mukomuko sebanyak 894 orang orang, Kepahiang sebanyak 737 orang, Kota Bengkulu sebanyak 689 orang, Bengkulu Utara sebanyak 525 orang, Bengkulu Selatan sebanyak 485 orang, Bengkulu Tengah sebanyak 433 orang, Lebong sebanyak 360 orang, Kaur sebanyak 347 orang, dan terendah Seluma sebanyak 331 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas tersebar di 10 Kabupaten Kota adalah 5.907 orang, terbanyak adalah Penyandang Disabilitas Fisik sebanyak 2.335 orang, Penyandang Disabilitas Mental 1.671 orang, Penyandang Disabilitas Intelektual 384 orang, dan Penyandang Disabilitas Ganda sebanyak 186 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas Tahun 2023

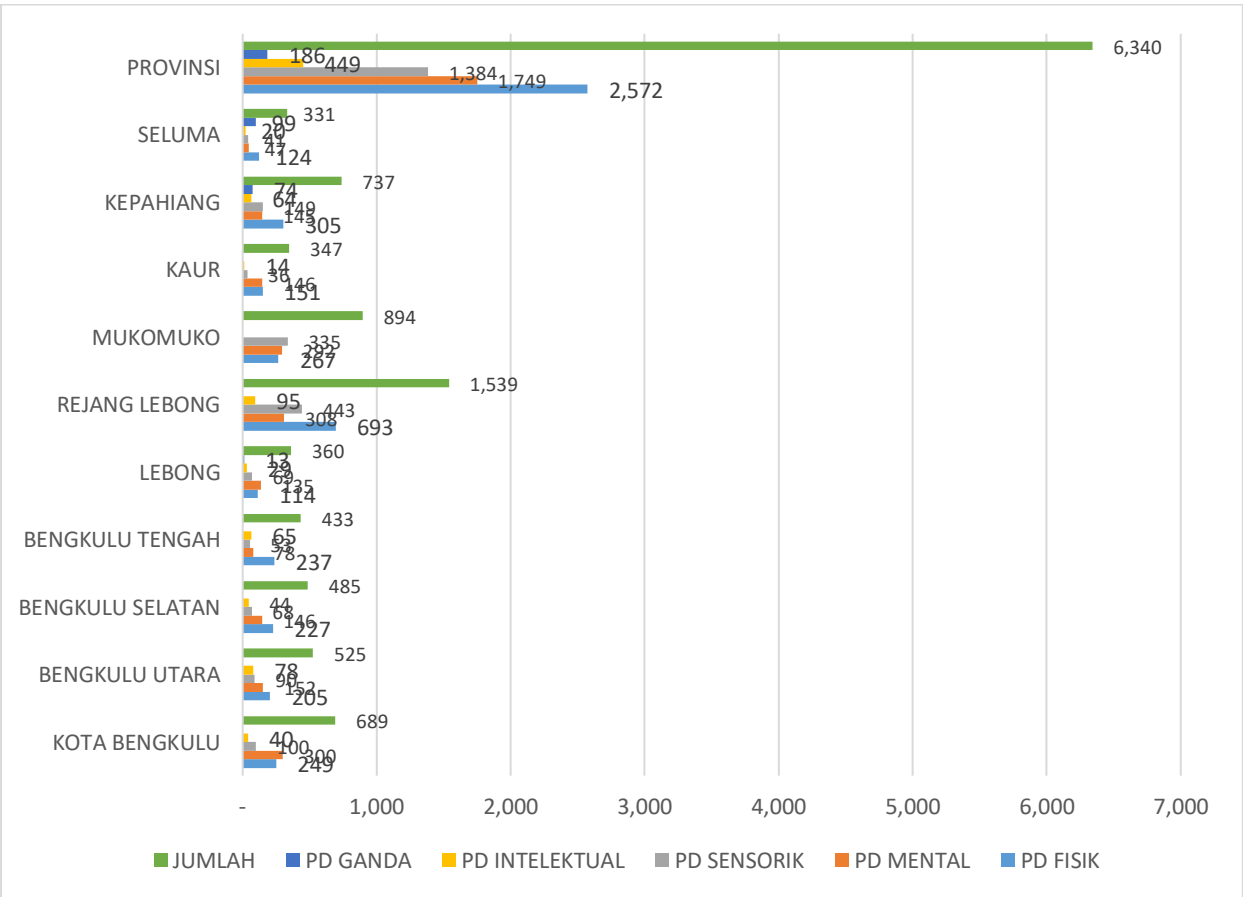
JENIS PENYANDANG DISABILITAS (PD)	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
PD FISIK	249	205	227	237	114	693	267	151	305	124	2.335
PD MENTAL	300	152	146	78	135	308	292	146	145	47	1.671
PD SENSORIK	100	90	68	53	69	443	335	36	149	41	1.331
PD INTELEKTUAL	40	78	44	65	29	95		14	64	20	384
PD GANDA					13				74	99	186
JUMLAH	689	525	485	433	360	1.539	894	347	737	331	5.907

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.3

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota berjumlah 5.613 orang terdiri dari 3.240 orang laki-laki dan 2.373 orang perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2023

JENIS KELAMIN	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
LAKI-LAKI	400	323	304	204	218	728	516	186	388	177	3.240
PEREMPUAN	289	202	181	229	142	591	378	161	275	154	2.373
JUMLAH	689	525	485	433	360	1.319	894	347	663	331	5.613

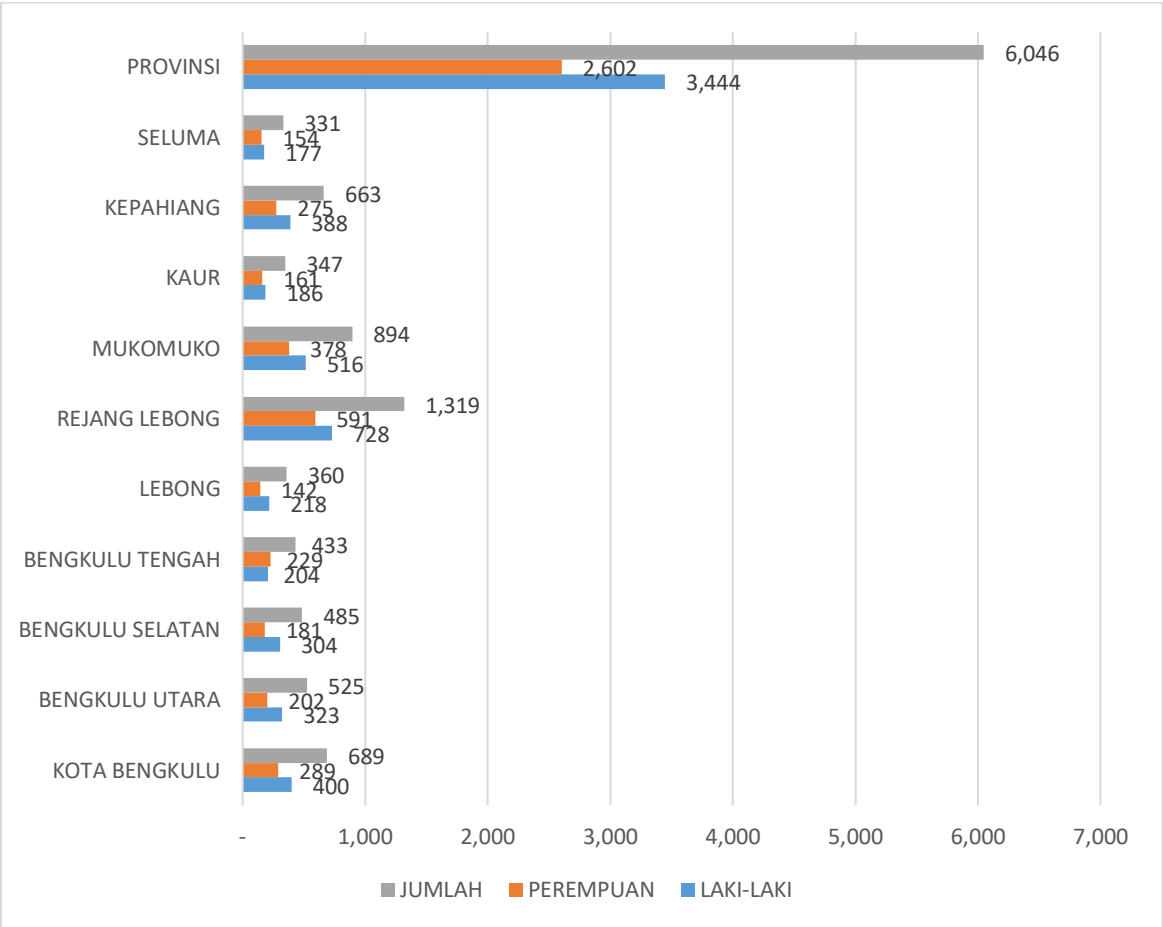
Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.4

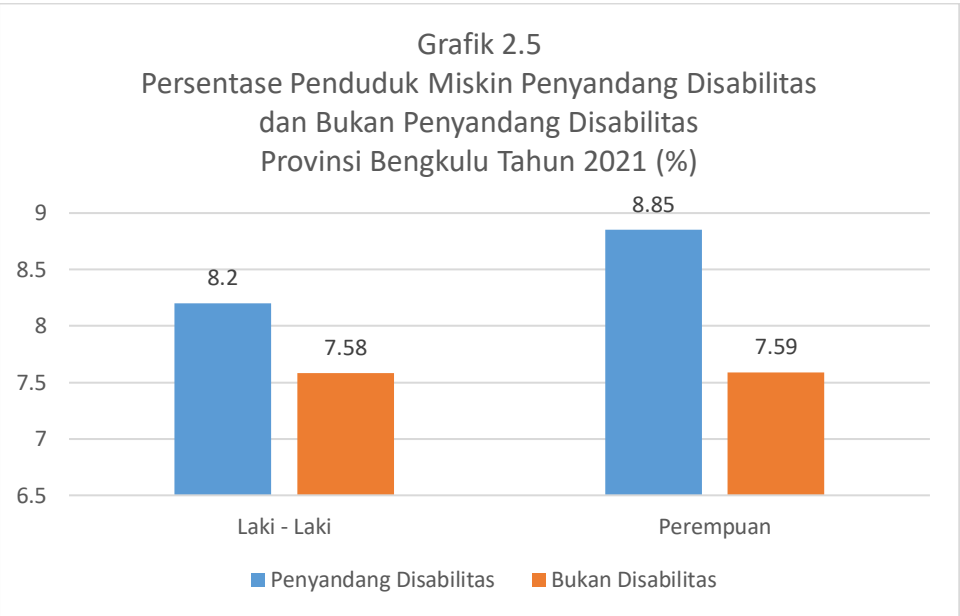
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2023

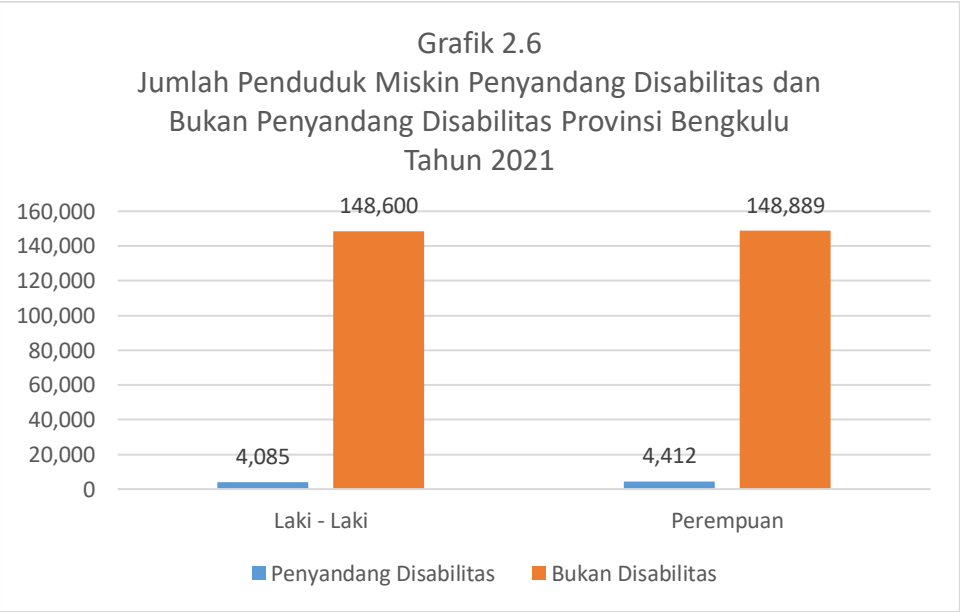


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Pada grafik dibawah ini menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan penyandang disabilitas (PD) relatif terhadap non penyandang disabilitas (Non-PD). Penyandang disabilitas laki-laki sebesar 8,2% atau sebesar 4.085 jiwa PD hidup di bawah garis kemiskinan sementara Non-PD laki-laki sebesar 7,58% atau sebesar 148.600 jiwa. Untuk Penyandang disabilitas perempuan sebesar 8,85% atau sebesar 4.412 jiwa di bawah garis kemiskinan sementara Non-PD perempuan sebesar 7,59% atau sebesar 148.889 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber : BPS,Susenass, 2021



Sumber: BPS, Susenas, 2021

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pendidikan terbanyak didominasi Tidak Bersekolah sebanyak 1.920 orang, SD sebanyak 1.477 orang, SMP sebanyak 523 orang, dan SMA sebanyak 436 orang dan S1/D4 sebanyak 7 orang. Dilihat dari tamatan SMA yang cukup banyak perlu dipikirkan untuk masuk ke jenjang Perguruan Tinggi sehingga SDM bisa meningkat, namun yang perlu menjadi pertimbangan adalah kondisi kampus yang mendukung para difabel. Penyelenggaraan pendidikan yang ramah bagi disabilitas masih menemui berbagai kendala khususnya terkait infrastruktur pendukung. Aspek pendidikan dan pekerjaan mencakup tingkat pendidikan penyandang disabilitas dan implikasinya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kelompok penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan tingkat penerimaan bekerja dan dan skill yang berguna untuk mata pencaharian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.4

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2023

PENDIDIKAN	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
TIDAK BERSEKOLAH	304	255	174	-	132	378		314	363		1.920
SD	172	185	132	-	143	632		15	198		1.477
SMP	148	52	66	-	46	159		6	46		523
SMA	65	33	85	-	38	150		12	53		436
S1/D4	3				1				3		7

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Seluma data tidak tersedia

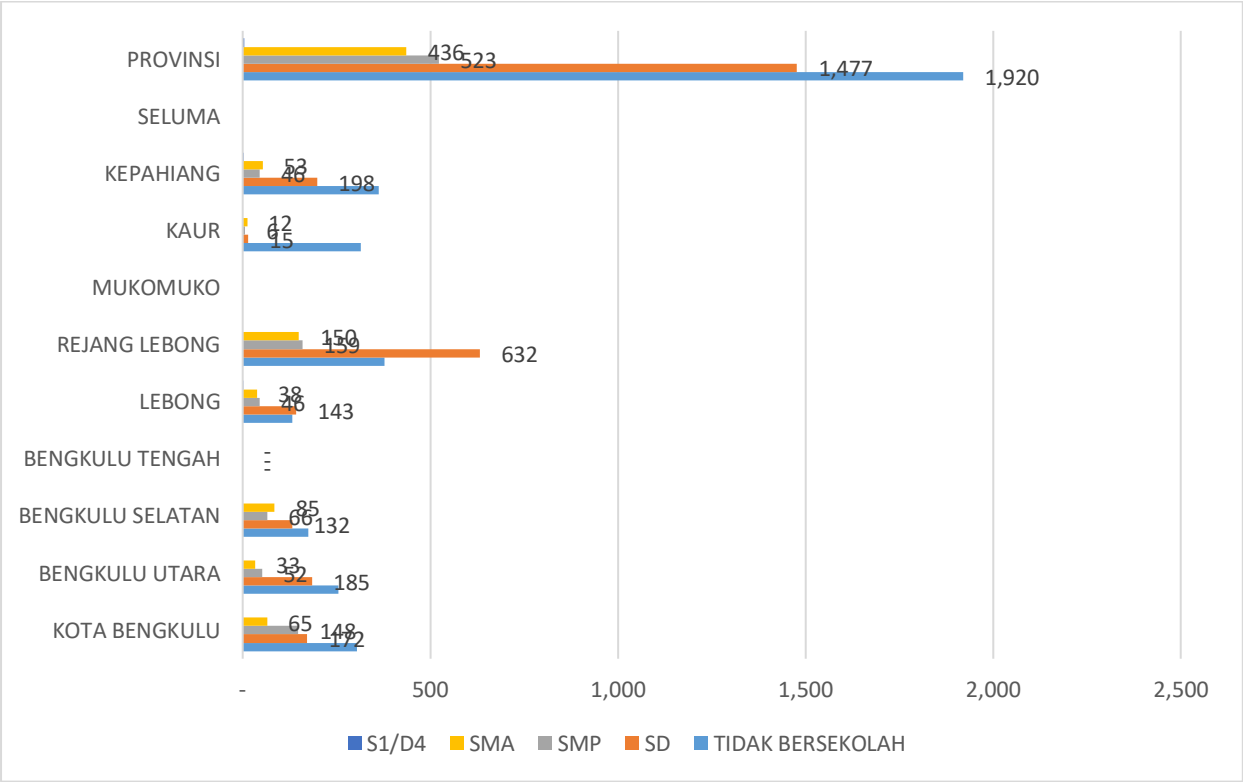
Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik. 2.7

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2023



Keterangan : Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Seluma data tidak tersedia

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

2.2 Analisis Inklusif Disabilitas di Daerah

Inklusif berasal dari bahasa Inggris “inclusive” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: “mengikutsertakan dan mengintegrasikan semua orang dan kelompok dalam kegiatan, organisasi, proses politik, dan lain-lain, terutama mereka yang kurang beruntung, mengalami diskriminasi, atau hidup dengan disabilitas”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan, urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk

didalamnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan/eksploitasi /diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, penyandang disabilitas termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan perhatian lebih dan berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan (lingkungan dan sikap masyarakat), dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang disabilitas sendiri terdiri dari berbagai jenis, diantaranya :

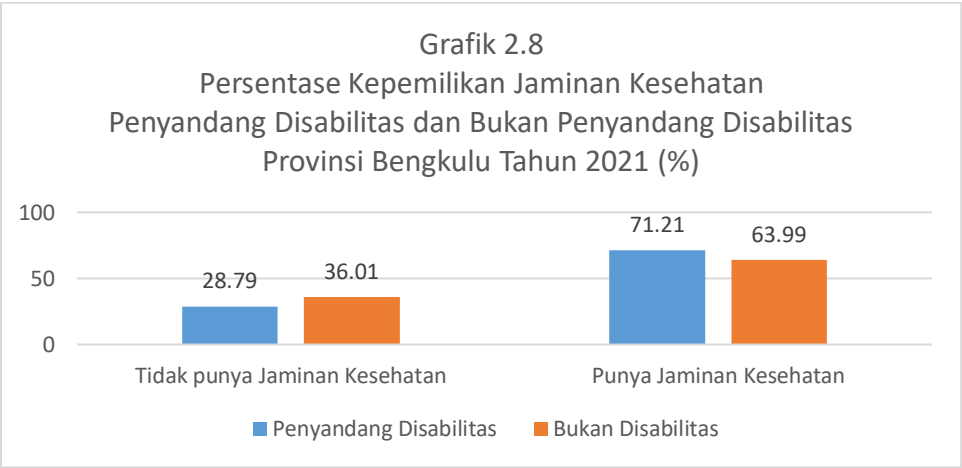
1. Penyandang Disabilitas Fisik (PDF) yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain, meliputi : (1) amputasi; (2) lumpuh layuh atau kaku; (3) paraplegi; (4) Cerebral Palsy (CP); (5) akibat stroke; (6) akibat kusta; (7) orang kecil; dan (8) disabilitas wicara.
2. Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi : (1) Psiko-sosial diantaranya Skizofrenia, bipolar, depresi, Arvdetas, dan gangguan kepribadian; dan (2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social seperti Autis, dan Hiperaktif.
3. Penyandang Disabilitas Sensorik (PDS) adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, meliputi : (1) disabilitas netra; dan (2) disabilitas rungu.
4. Penyandang Disabilitas Intelektual (PDI) yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain, meliputi : (1) lambat belajar, (2) disabilitas grahita; dan (4) down syndrome.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas diperlukan analisis situasi inklusif disabilitas yang berisi data terpilah baik dari penyandang disabilitas sesuai umur, jenis kelamin, tipe-tipe disabilitasnya serta kebutuhannya.

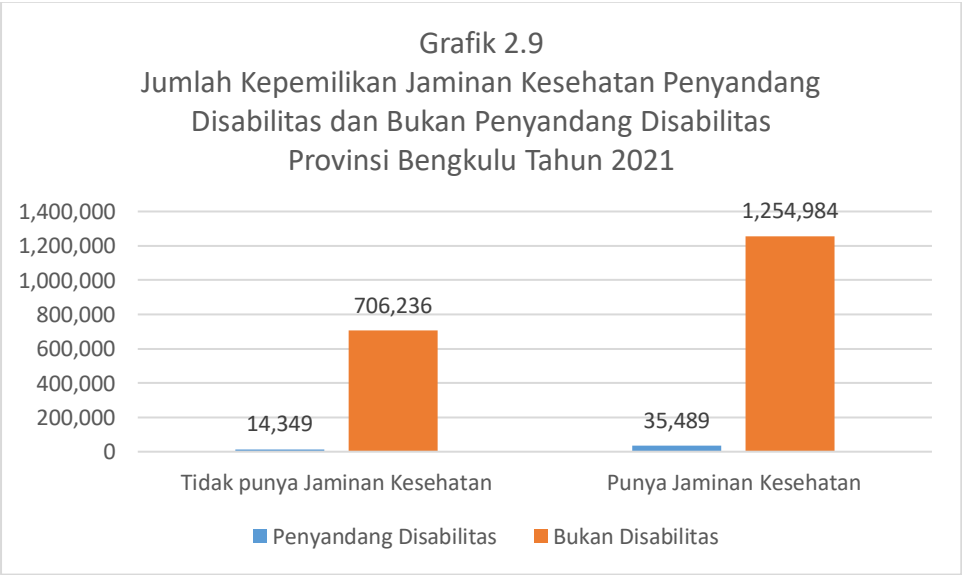
Peraturan yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Salah satu aspek taraf hidup penyandang disabilitas yang juga perlu diperhatikan lebih mendalam ialah terkait akses terhadap fasilitas kesehatan. Akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang cukup mendasar bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas perlu melakukan terapi maupun menggunakan alat bantu yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan

professional. Hal ini dapat berarti bahwa akses terhadap kesehatan menjadi pintu pertama bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan taraf hidupnya, yakni melalui terapi maupun alat bantu yang dapat mengurangi kendala yang dialami. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur progress atau perbaikan akses kesehatan penyandang disabilitas, seperti kepemilikan jaminan kesehatan.

Berdasarkan kepemilikannya, penyandang disabilitas yang tidak punya jaminan kesehatan sebesar 28,79% atau 14.349 orang. Sedangkan bukan penyandang disabilitas yang tidak punya jaminan kesehatan sebesar 36,01% atau sebesar 706.236 orang. Untuk penyandang disabilitas yang punya jaminan kesehatan sebesar 71,21% atau sebesar 35.489 orang. Sedangkan bukan penyandang disabilitas yang punya jaminan kesehatan sebesar 63,99% atau sebesar 1.254.984 orang.



Sumber: BPS, Susenas, 2021



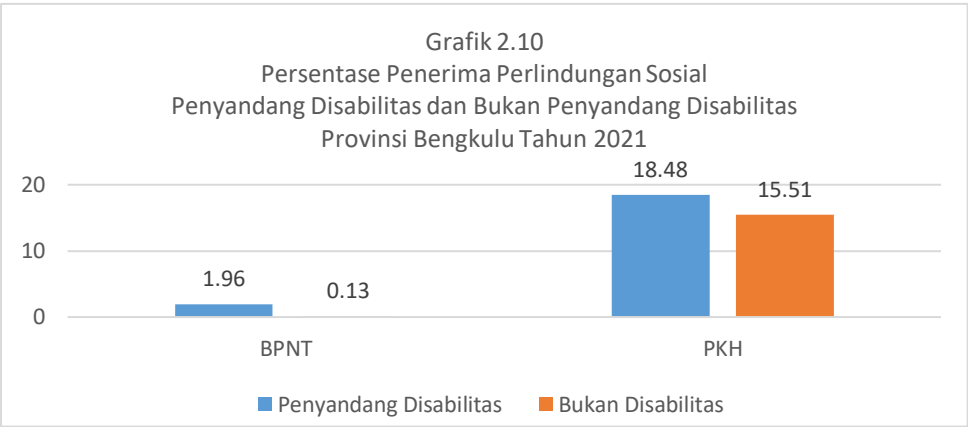
Sumber: BPS, Susenas, 2021

Berdasarkan Pasal 96 UU 8 /2016 , Pemerintah diamanatkan untuk membentuk PP yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini disahkan pada tanggal 26 Juli 2019 dengan menjadikan Kementerian Sosial sebagai leading actor pelaksanaan peraturan ini. PP 52/2019 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin

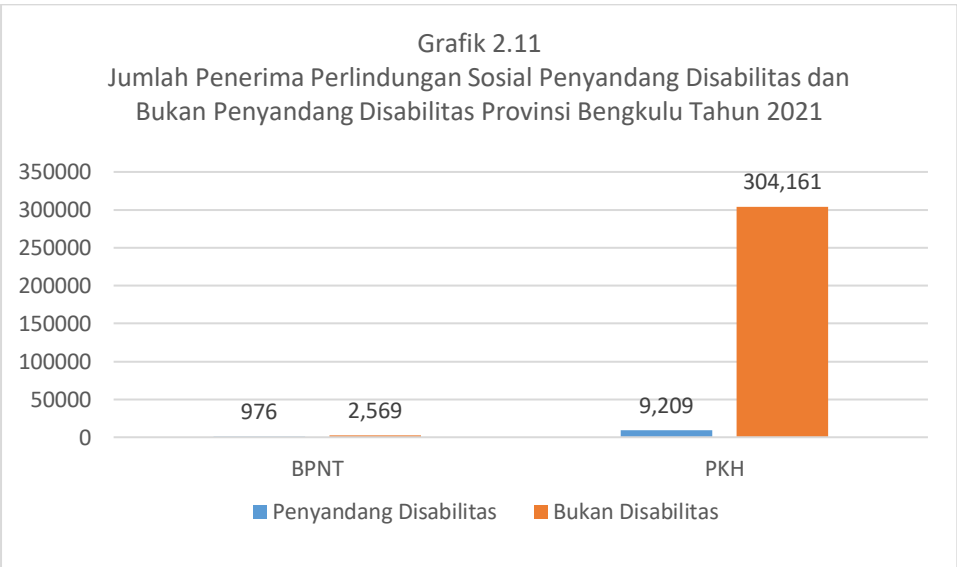
pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, dan mewujudkan masyarakat inklusi. Lalu peraturan ini mengatur perihal rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta yang terakhir adalah pendanaan.

Dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, persentase penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) lebih tinggi dibandingkan non disabilitas. Penyandang disabilitas yang menerima program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 1,96 persen atau sebesar 976 orang. Sedangkan bukan penyandang disabilitas sebesar 0,13 persen atau sebesar 2.569 orang. Penyandang disabilitas yang menerima proram Keluarga Harapan (PKH) sebesar 18,48 persen atau sebesar 9.209 persen. Sedangkan bukan penyandang disabilitas sebesar 15,51 persen atau sebesar 304.161 orang.

Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas relatif lebih tinggi terutama untuk penopang hidup lainnya, seperti alat bantu, transportasi, kebutuhan belajar, dsb. Untuk itu dibutuhkan skema perlindungan sosial yang dapat menjawab kebutuhan khusus tersebut.



Sumber: BPS, Susenas, 2021



Sumber: BPS, Susenas, 2021

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Untuk memperkuat layanan bidang ketenagakerjaan kepada tenaga kerja maupun telah pemberi kerja penyandang disabilitas, maka Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang regulasinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang ULD Bidang Ketenagakerjaan. Melalui penetapan PP tersebut diharapkan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik, hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam UU yang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan minimal dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu bagi perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.

Berdasarkan persebaran provinsi, Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas usia kerja di Indonesia tinggal di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 2,71 juta orang atau sebesar 16,43 persen, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2,55 juta orang atau sebesar 15,42 persen, serta Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,31 juta orang atau sebesar 13,99 persen. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin dan provinsi, mereka yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1,19 juta orang atau sekitar 15,77 persen, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,14 juta orang atau sekitar 15,16 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1,06 juta orang atau sekitar 14,07 persen. Sementara mereka yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1,53 juta orang atau sekitar 16,98 persen, di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,41 juta orang atau sekitar 15,64 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1,25 juta orang atau sekitar 13,93 persen. Provinsi Bengkulu sebesar 125.030 atau sekitar 0,76 persen terdiri 54.10 orang laki-laki dan 70.020 orang perempuan, dan berada pada posisi 27 dari 34 Provinsi se Indonesia.

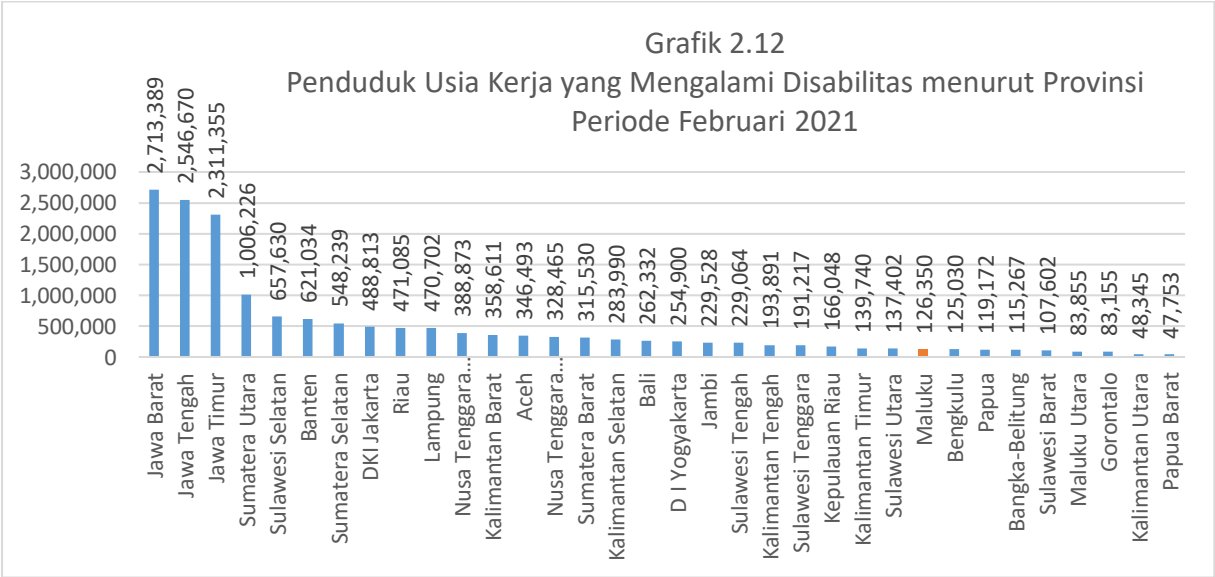
Tabel 2.5

Penduduk Usia Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Periode Februari 2021

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	152.563	193.930	346.493
Sumatera Utara	446.996	559.230	1.006.226
Sumatera Barat	133.804	181.726	315.530
Riau	224.157	246.928	471.085
Jambi	108.230	121.298	229.528
Sumatera Selatan	272.959	275.280	548.239
Bengkulu	54.010	71.020	125.030
Lampung	239.606	231.096	470.702
Bangka-Belitung	53.090	62.177	115.267
Kepulauan Riau	89.067	76.981	166.048
DKI Jakarta	219.867	268.946	488.813
Jawa Barat	1.186.603	1.526.786	2.713.389
Jawa Tengah	1.140.459	1.406.211	2.546.670
D I Yogyakarta	118.426	136.474	254.900
Jawa Timur	1.058.286	1.253.069	2.311.355
Banten	278.524	342.510	621.034
Bali	127.169	135.163	262.332
Nusa Tenggara Barat	143.768	184.697	328.465
Nusa Tenggara Timur	182.360	206.513	388.873
Kalimantan Barat	173.051	185.560	358.611
Kalimantan Tengah	96.177	97.714	193.891
Kalimantan Selatan	117.831	166.159	283.990
Kalimantan Timur	67.441	72.299	139.740
Kalimantan Utara	24.845	23.500	48.345
Sulawesi Utara	65.949	71.453	137.402
Sulawesi Tengah	111.769	117.295	229.064
Sulawesi Selatan	282.728	374.902	657.630
Sulawesi Tenggara	92.336	98.881	191.217
Gorontalo	32.866	50.289	83.155
Sulawesi Barat	41.626	65.976	107.602
Maluku	60.213	66.137	126.350
Maluku Utara	39.588	44.267	83.855
Papua Barat	24.081	23.672	47.753
Papua	63.719	55.453	119.172
Total	7.524.164	8.993.592	16.517.756

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah Pusdatik Kemnaker



Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah

Berdasarkan persebaran provinsi, pada Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa sebagian besar Angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia tinggal di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 1,04 juta orang atau sebesar 14,65 persen, kemudian diikuti

dengan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 990,61 ribu orang atau sebesar 13,94 persen, serta Provinsi Jawa Timur sebanyak 912,31 ribu orang atau sebesar 12,84 persen. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin dan provinsi, mereka yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 629,44 ribu orang atau sekitar 15,24 persen, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 561,08 ribu orang atau sekitar 13,58 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 541,6 ribu orang atau sekitar 13,11 persen. Sementara mereka yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 429,53 ribu orang atau sekitar 14,44 persen, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 411,77 ribu orang atau sekitar 13,84 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 370,71 ribu orang atau sekitar 12,46 persen. Provinsi Bengkulu sebanyak 67.279 orang atau sekitar 0,95 persen, sementara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34.558 orang dan perempuan sebanyak 32.721 orang berada pada posisi 24 dari 34 provinsi.

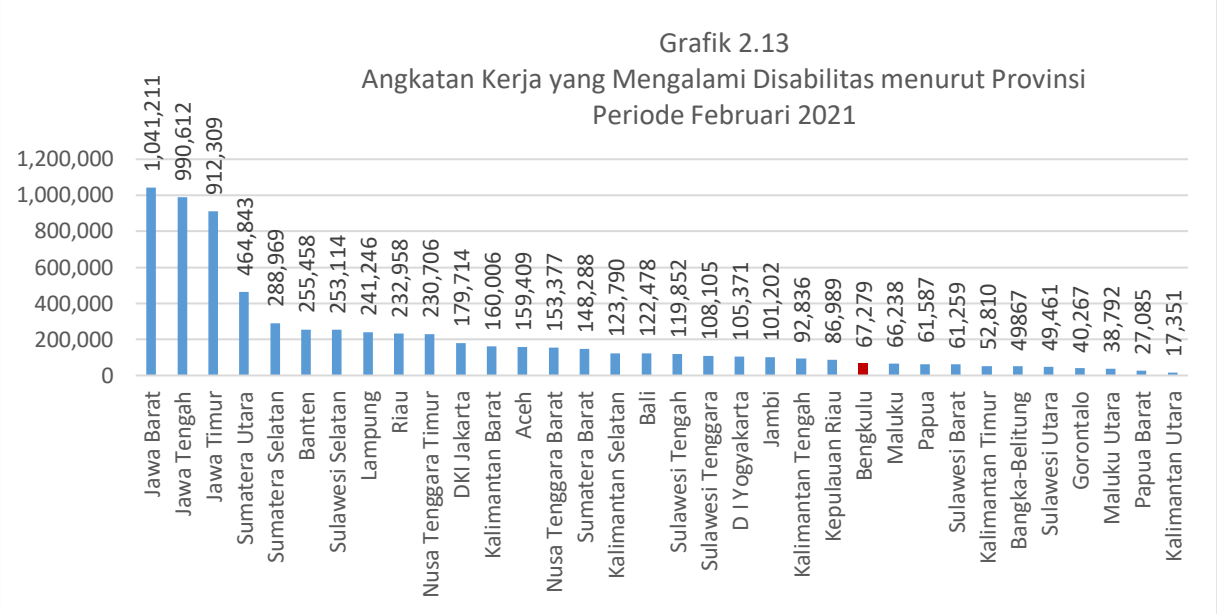
Tabel 2.6

Angkatan Kerja yang Mengalami Disabilitas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Periode Februari 2021

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	84.405	75.004	159.409
Sumatera Utara	245.837	219.006	464.843
Sumatera Barat	79.744	68.544	148.288
Riau	150.992	81.966	232.958
Jambi	59.912	41.290	101.202
Sumatera Selatan	174.885	114.084	288.969
Bengkulu	34.558	32.721	67.279
Lampung	161.506	79.740	241.246
Bangka-Belitung	31.526	18.341	49.867
Kepulauan Riau*	56.703*	30.286*	86.989*
DKI Jakarta	86.806	92.908	179.714
Jawa Barat	629.441	411.770	1.041.211
Jawa Tengah	561.080	429.532	990.612
DI Yogyakarta	61.864	43.507	105.371
Jawa Timur	541.597	370.712	912.309
Banten	131.208	124.250	255.458
Bali	69.158	53.320	122.478
Nusa Tenggara Barat	82.261	71.116	153.377
Nusa Tenggara Timur	118.474	112.232	230.706
Kalimantan Barat	93.180	66.826	160.006
Kalimantan Tengah	60.238	32.598	92.836
Kalimantan Selatan	75.544	48.246	123.790
Kalimantan Timur*	38.915	13.895*	52.810
Kalimantan Utara*	12.089*	5.262	17.351
Sulawesi Utara	29.307	20.154	49.461
Sulawesi Tengah	74.538	45.314	119.852
Sulawesi Selatan	150.440	102.674	253.114
Sulawesi Tenggara	62.134	45.971	108.105
Gorontalo	22.804	17.463	40.267
Sulawesi Barat	31.081	30.178	61.259
Maluku	39.328	26.910	66.238
Maluku Utara	21.936	16.856	38.792
Papua Barat	16.705	10.380	27.085
Papua	39.957	21.630	61.587
Total	4.130.153	2.974.686	7.104.839

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah Pusdatik Kemnaker



Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah

Berdasarkan persebaran provinsi, dari Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang bekerja tinggal di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 993,09 ribu orang atau sebesar 14,44 persen, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 960,84 ribu orang atau sebesar 13,97 persen, serta Provinsi Jawa Timur sebanyak 898,39 ribu orang atau sebesar 13,06 persen. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin dan provinsi, mereka yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 587,27 ribu orang atau sekitar 14,79 persen, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 542,28 ribu orang atau sekitar 13,66 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 531,71 ribu orang atau sekitar 13,40 persen. Sementara mereka yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 418,56 ribu orang atau sekitar 14,39 persen, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 405,85 ribu orang atau sekitar 13,97 persen, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 366,68 ribu orang atau sekitar 13,06 persen. Provinsi Bengkulu sebanyak 67.279 orang atau sekitar 0,95 persen, sementara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34.558 orang dan perempuan sebanyak 32.721 orang berada pada posisi 24 dari 34 provinsi.

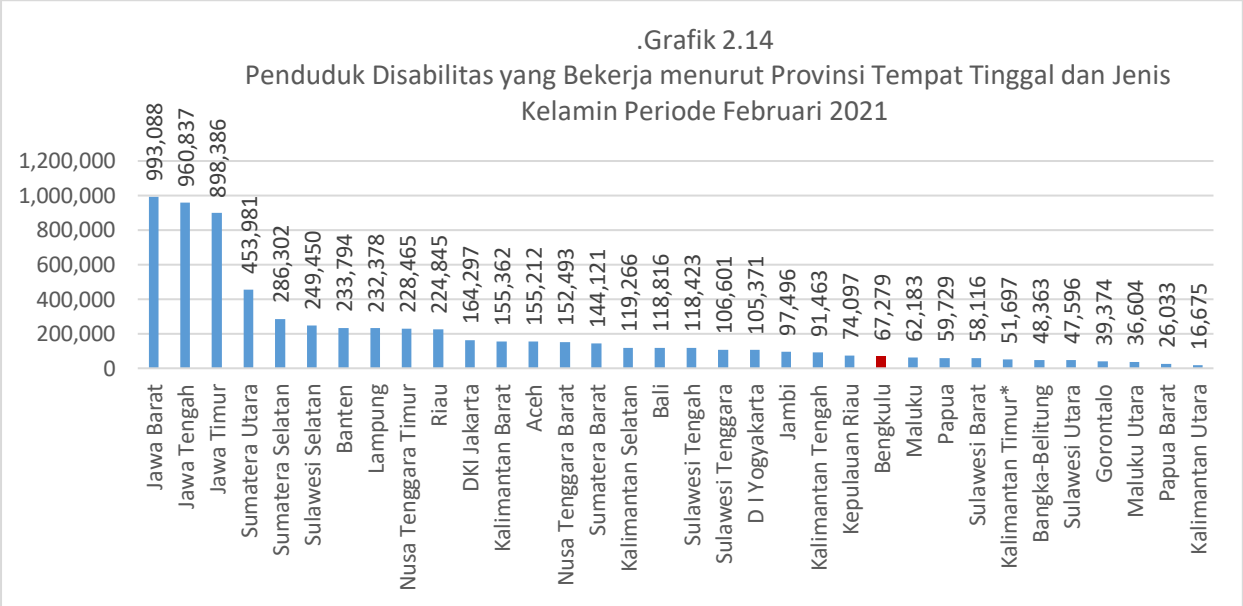
Tabel 2.7

Penduduk Disabilitas yang Bekerja menurut Provinsi Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Periode Februari 2021

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	82.989	72.223	155.212
Sumatera Utara	241.743	212.238	453.981
Sumatera Barat	75.854	68.267	144.121
Riau	144.589	80.256	224.845
Jambi	58.982	38.514	97.496
Sumatera Selatan	172.218	114.084	286.302
Bengkulu	34.558	32.721	67.279
Lampung	153.708	78.670	232.378
Bangka-Belitung	30.022	18.341	48.363
Kepulauan Riau*	43.811*	30.286*	74.097*

DKI Jakarta	77.776	86.521	164.297
Jawa Barat	587.236	405.852	993.088
Jawa Tengah	542.279	418.558	960.837
D I Yogyakarta	61.864	43.507	105.371
Jawa Timur	531.710	366.676	898.386
Banten	119.536	114.258	233.794
Bali	66.749	52.067	118.816
Nusa Tenggara Barat	81.377	71.116	152.493
Nusa Tenggara Timur	118.466	109.999	228.465
Kalimantan Barat	88.536	66.826	155.362
Kalimantan Tengah	58.865	32.598	91.463
Kalimantan Selatan	71.260	48.006	119.266
Kalimantan Timur*	37.802	13.895*	51.697
Kalimantan Utara*	11.504*	5.171	16.675*
Sulawesi Utara	28.842	18.754	47.596
Sulawesi Tengah	73.819	44.604	118.423
Sulawesi Selatan	149.656	99.794	249.450
Sulawesi Tenggara	60.630	45.971	106.601
Gorontalo	22.410	16.964	39.374
Sulawesi Barat	29.742	28.374	58.116
Maluku	36.675	25.508	62.183
Maluku Utara	20.435	16.169	36.604
Papua Barat	15.653	10.380	26.033
Papua	38.099	21.630	59.729
Total	3.969.395	2.908.798	6.878.193

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah Pusdatik Kemnaker



Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah

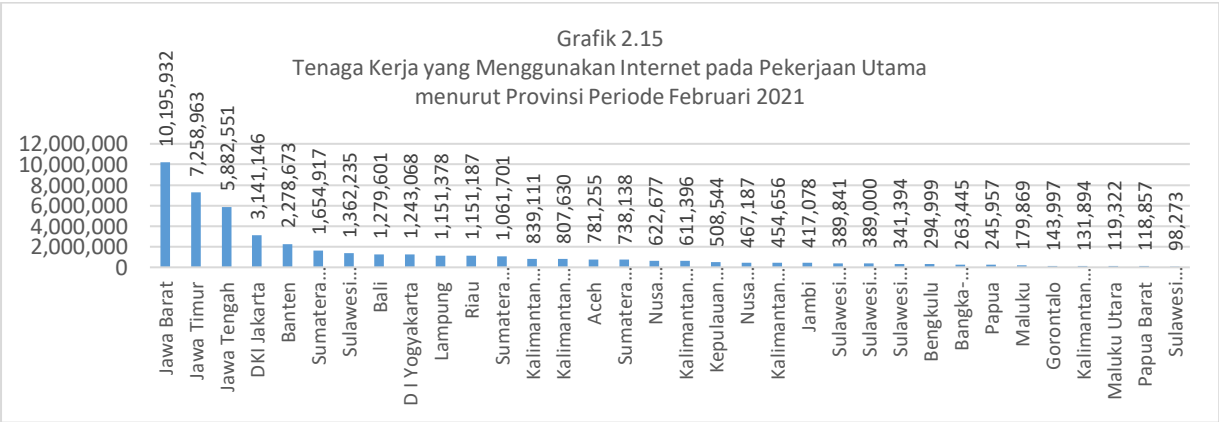
Dalam hal akses terhadap teknologi yang dicerminkan dari dua indikator yakni kepemilikan telepon genggam (handphone) dan penggunaan internet. Berdasarkan persebaran provinsi, Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja yang menggunakan internet pada pekerjaan utama dan tinggal di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 6,65 juta orang atau sebesar 21,87 persen, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,5 juta orang atau sebesar 15,57 persen, serta Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3,55 juta orang atau sebesar 12,62 persen. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin dan provinsi, mereka yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3,54 juta orang atau sekitar 21,16 persen, Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,76 juta orang atau sekitar 15,66 persen, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2,33 juta orang atau sekitar 12,37 persen. Sementara mereka yang berjenis kelamin perempuan

lebih banyak yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3,54 juta orang atau sekitar 19,80 persen, di Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,76 juta orang atau sekitar 15,43 persen, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2,33 juta orang atau sekitar 13,01 persen. Untuk Provinsi Bengkulu yang menggunakan internet baru sebanyak 294.999 orang atau sekitar 0,37 persen, sementara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 174.415 orang dan perempuan sebanyak 120.584 orang dan berada pada posisi 26 dari 34 provinsi.

Tabel 2.8
Tenaga Kerja yang Menggunakan Internet pada Pekerjaan Utama
menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

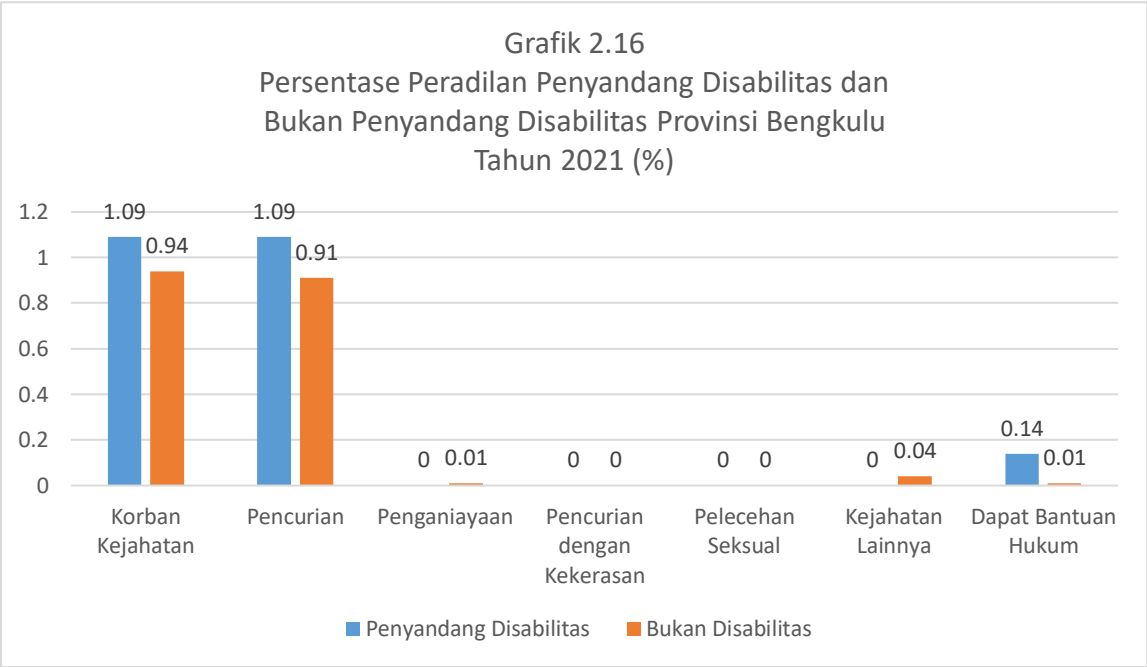
Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	485.554	295.701	781.255
Sumatera Utara	946.232	708.685	1.654.917
Sumatera Barat	424.819	313.319	738.138
Riau	691.078	460.109	1.151.187
Jambi	258.424	158.654	417.078
Sumatera Selatan	606.639	455.062	1.061.701
Bengkulu	174.415	120.584	294.999
Lampung	676.144	475.234	1.151.378
Bangka-Belitung	159.000	104.445	263.445
Kepulauan Riau	335.166	173.378	508.544
DKI Jakarta	2.000.326	1.140.820	3.141.146
Jawa Barat	6.651.032	3.544.900	10.195.932
Jawa Tengah	3.553.012	2.329.539	5.882.551
D I Yogyakarta	724.577	518.491	1.243.068
Jawa Timur	4.496.760	2.762.203	7.258.963
Banten	1.447.268	831.405	2.278.673
Bali	768.732	510.869	1.279.601
Nusa Tenggara Barat	360.737	261.940	622.677
Nusa Tenggara Timur	277.644	189.543	467.187
Kalimantan Barat	365.483	245.913	611.396
Kalimantan Tengah	279.761	174.895	454.656
Kalimantan Selatan	534.076	305.035	839.111
Kalimantan Timur	509.779	297.851	807.630
Kalimantan Utara	83.842	48.052	131.894
Sulawesi Utara	222.735	167.106	389.841
Sulawesi Tengah	212.058	176.942	389.000
Sulawesi Selatan	761.672	600.563	1.362.235
Sulawesi Tenggara	190.840	150.554	341.394
Gorontalo	68.688	75.309	143.997
Sulawesi Barat	52.593	45.680	98.273
Maluku	94.372	85.497	179.869
Maluku Utara	73.547	45.775	119.322
Papua Barat	73.225	45.632	118.857
Papua	164.158	81.799	245.957
Total	28.724.388	17.901.484	46.625.872

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah Pusdatik

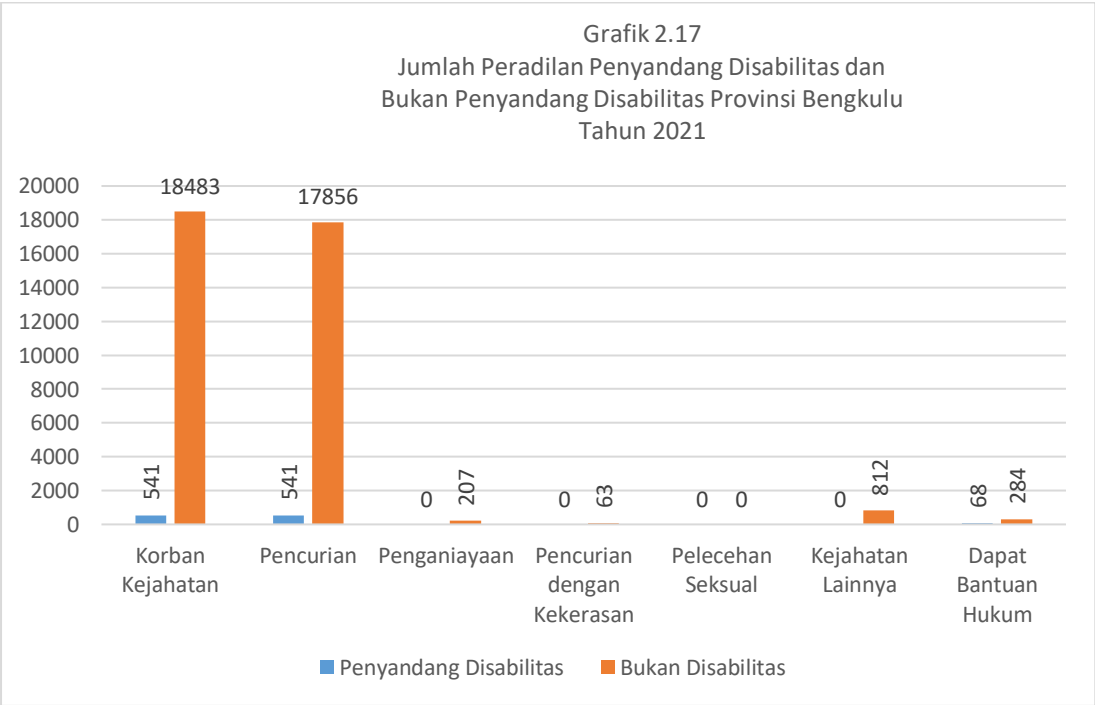


Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021, diolah

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu yang menjadi korban kejahatan sebanyak 1,09 persen atau 541 orang, Korban Pencurian 1,09 persen atau 541 orang. Sedangkan yang mendapat Bantuan Hukum baru sebanyak 0,14 persen atau 68 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber: BPS, Susenas, 2021



Sumber: BPS, Susenas, 2021

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Penghasilan Perbulan <500.000 sebanyak 3.209 orang dan >500.000 sebanyak 941 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Jumlah Penghasilan Perbulan <500.000 terbanyak di Rejang Lebong sebanyak 1.043 orang, Kepahiang 642 orang, Lebong 347 orang, Seluma 331 orang, Kaur 296 orang, Bengkulu Selatan 263 orang, Bengkulu Utara

167 orang dan Kota Bengkulu 120 orang (Kabupaten Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

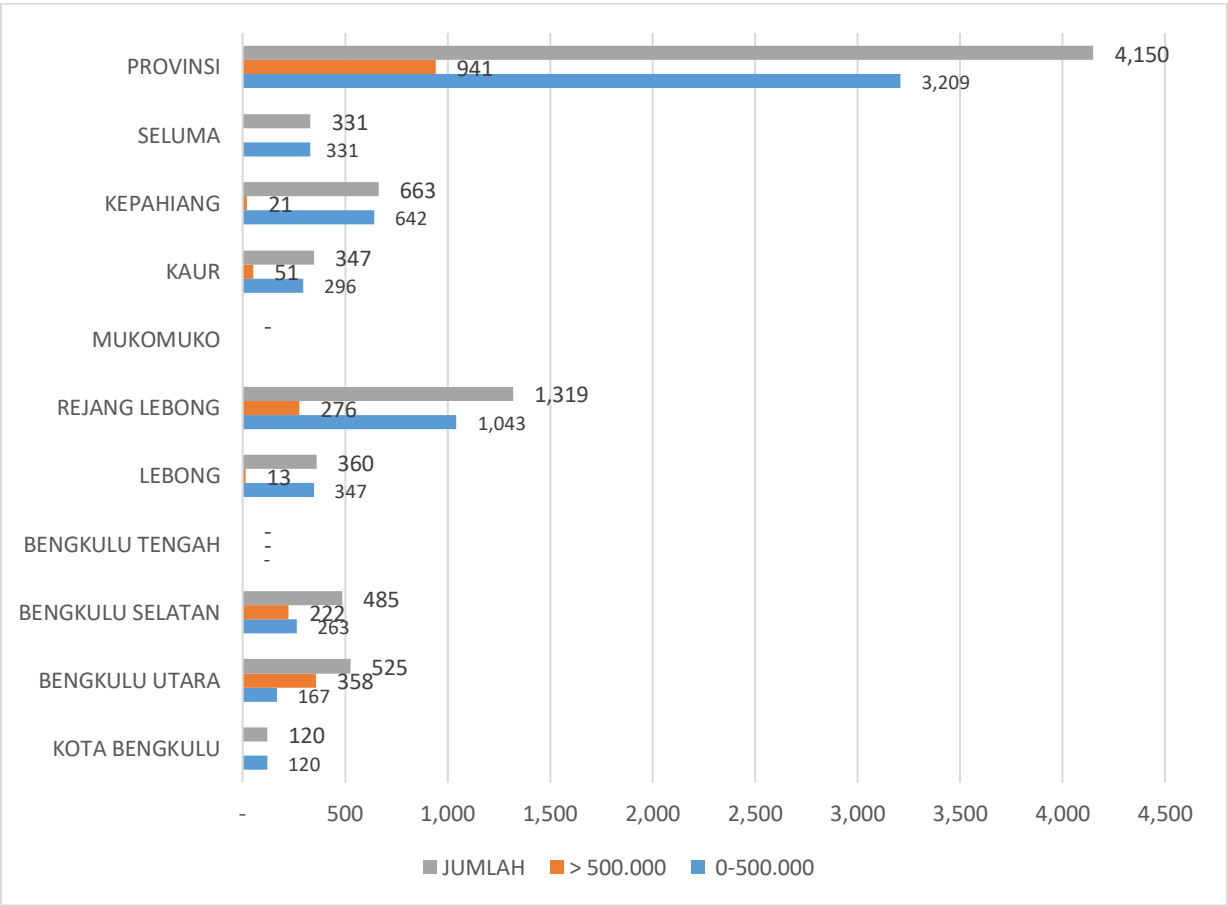
Tabel 2.9
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penghasilan Perbulan Tahun 2023

PENGHASILAN PERBULAN	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
0-500.000	120	167	263	-	347	1.043		296	642	331	3.209
> 500.000		358	222	-	13	276		51	21		941
JUMLAH	120	525	485	-	360	1.319	-	347	663	331	4.150
Keterangan : Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia											

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

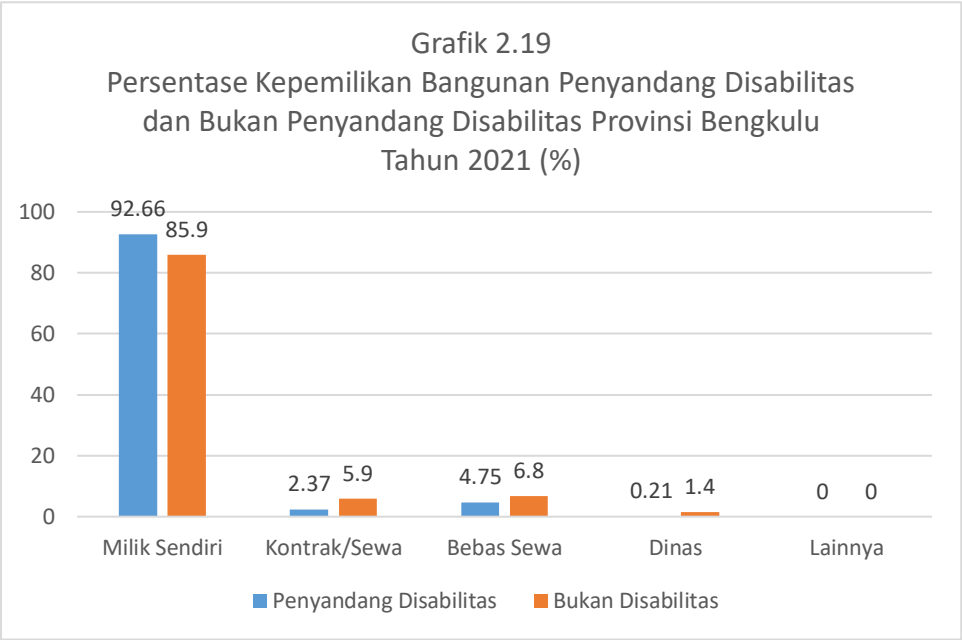
Grafik 2.18
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penghasilan Perbulan Tahun 2023



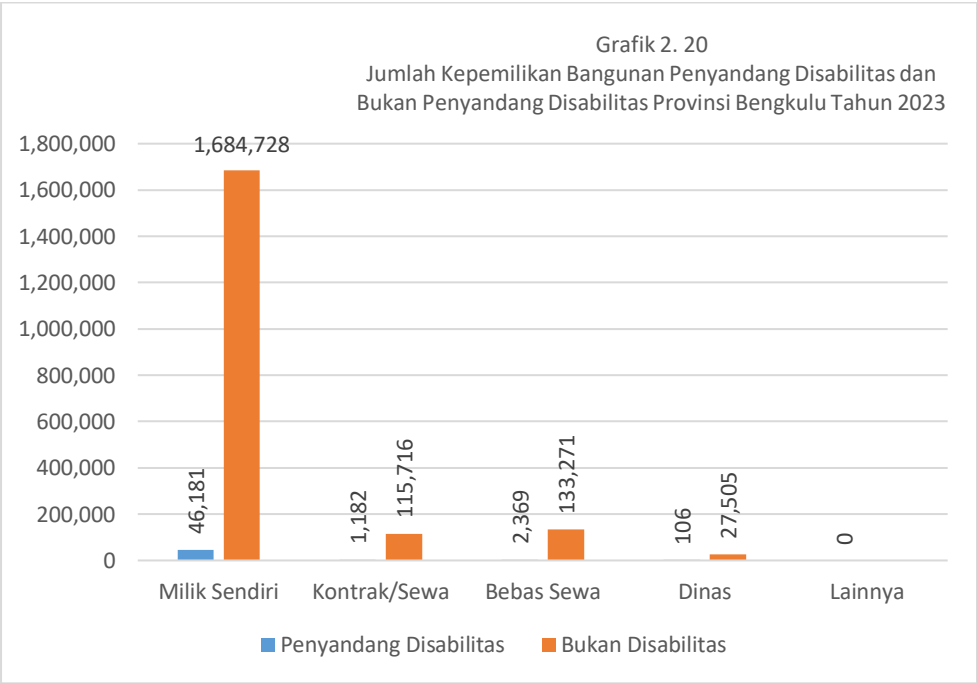
Keterangan : Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kepemilikan Bangunan Milik Sendiri berjumlah 46.181 rumah dan Bukan Penyandang Disabilitas sebesar berjumlah 1.684.728 rumah. Jumlah Rumah Sewa/Kontrak Penyandang Disabilitas sebesar 1.182 rumah dan Bukan Penyandang Disabilitas sebanyak 115.716

rumah. Jumlah rumah Bebas Sewa Penyandang Disabilitas sebanyak 2.369 rumah dan Bukan Penyandang Disabilitas sebanyak 133.271. Jumlah Rumah Dinas Penyandang Disabilitas sebanyak 106 rumah dan Bukan Penyandang Disabilitas sebanyak 27.505 rumah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, Susenas, diolah



Sumber: BPS, Susenas, diolah

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kondisi Rumah Yang Layak berjumlah 3.676 rumah dan Tidak Layak berjumlah 518 rumah. Kondisi Rumah Tidak Layak terbanyak berada pada kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 261 rumah, Rejang Lebong sebanyak 155 rumah, Kota Bengkulu 150 rumah, Bengkulu Selatan 85 rumah, Kaur 49 rumah, Kepahiang 40 rumah, dan Lebong 39 rumah (Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi Rumah

Tahun 2023

KONDISI RUMAH	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
LAYAK	539		400	172	321	1.164		298	623	331	3.676
TIDAK LAYAK	150		85	261	39	155		49	40		518

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia

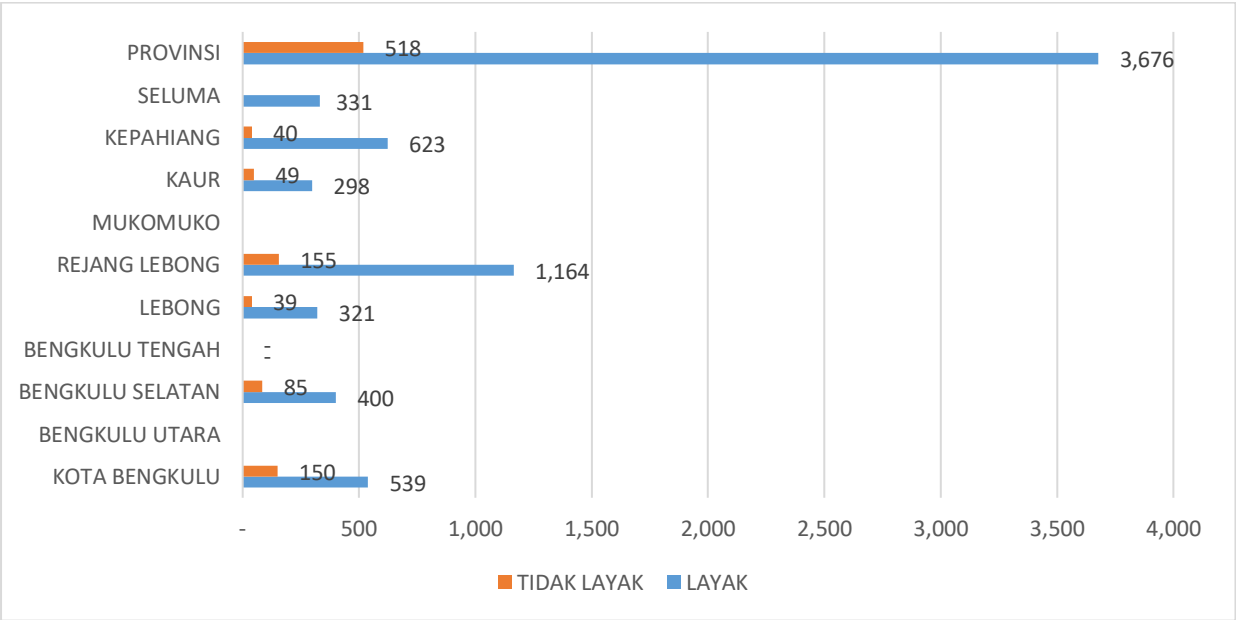
Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.21

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi Rumah

Tahun 2023

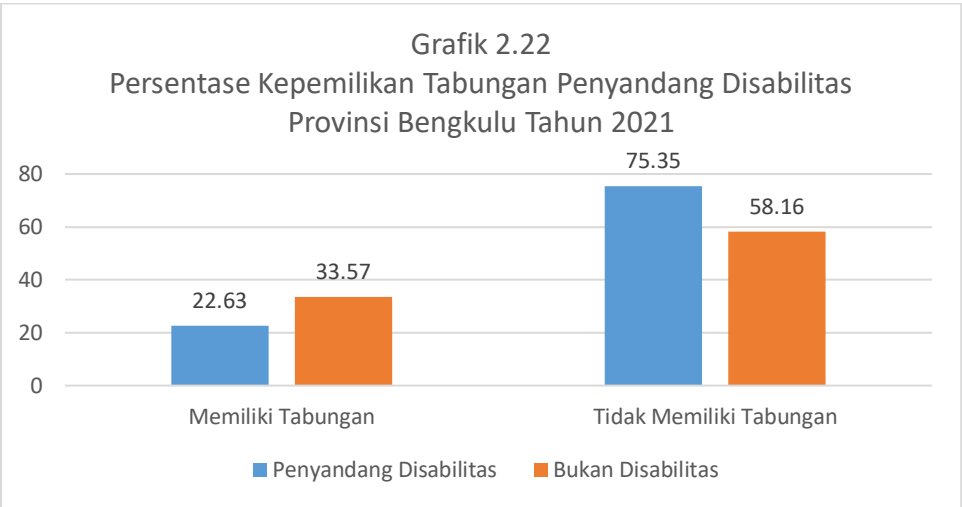


Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia

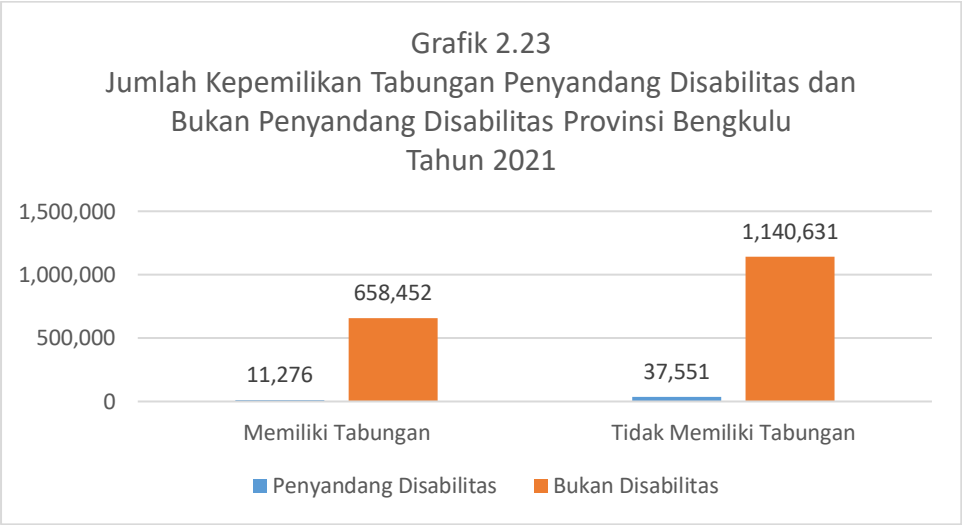
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Akses pada layanan keuangan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dan memberikan akses terhadap berbagai jenis pekerjaan. Tanpa rekening bank, misalnya, individu seringkali menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk melakukan transaksi keuangan melalui penyedia layanan keuangan alternatif. Namun, layanan keuangan tidak selalu dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan Grafik dibawah ini, terlihat bahwa masih ada 37.551 orang penyandang disabilitas yang tidak mempunyai rekening perbankan

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kepemilikan Tabungan berjumlah 11.276 orang dan Bukan Penyandang Disabilitas sebanyak 658.452 orang. Jumlah Penyandang Disabilitas Tidak Memiliki Tabungan sebesar 37.551 orang dan Bukan Penyandang Disabilitas sebanyak 1.140.631. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, Susenas, 2021 diolah



Sumber: BPS, Susenas, 2021 diolah

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.544 orang dan Tidak Layak sebanyak 161 orang. Kelayakan Penerima PKH terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1.162 orang, Kepahiang 662 orang, Bengkulu Selatan 485 orang, Lebong 358 orang, Kaur 346 orang, Seluma 331 orang, dan Kota Bengkulu 200 orang (Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023

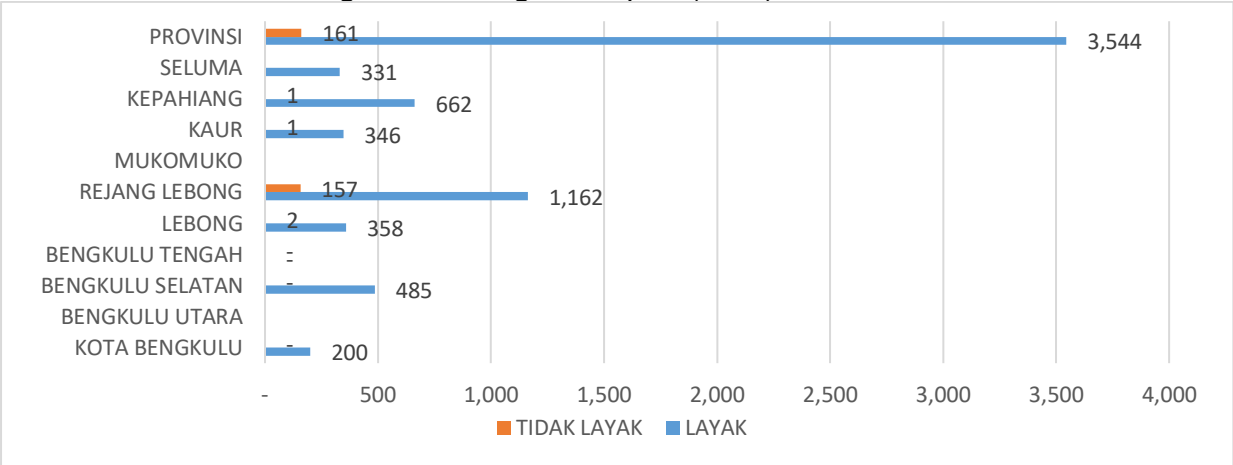
KELAYAKAN PENERIMA PKH	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
LAYAK	200		485	-	358	1.162		346	662	331	3.544
TIDAK LAYAK	-		-	-	2	157		1	1		161

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.24
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023



Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir sebanyak 971 orang dan Tidak Memiliki Akta Lahir sebanyak 2.429 orang. Tidak Ada Akta Lahir terbanyak berada pada Kota Bengkulu sebanyak 659 orang, Bengkulu Utara sebanyak 509 orang, Bengkulu Selatan 485 orang, Kepahiang 400 orang, Lebong 360 orang, Kaur 12 orang dan Seluma 4 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

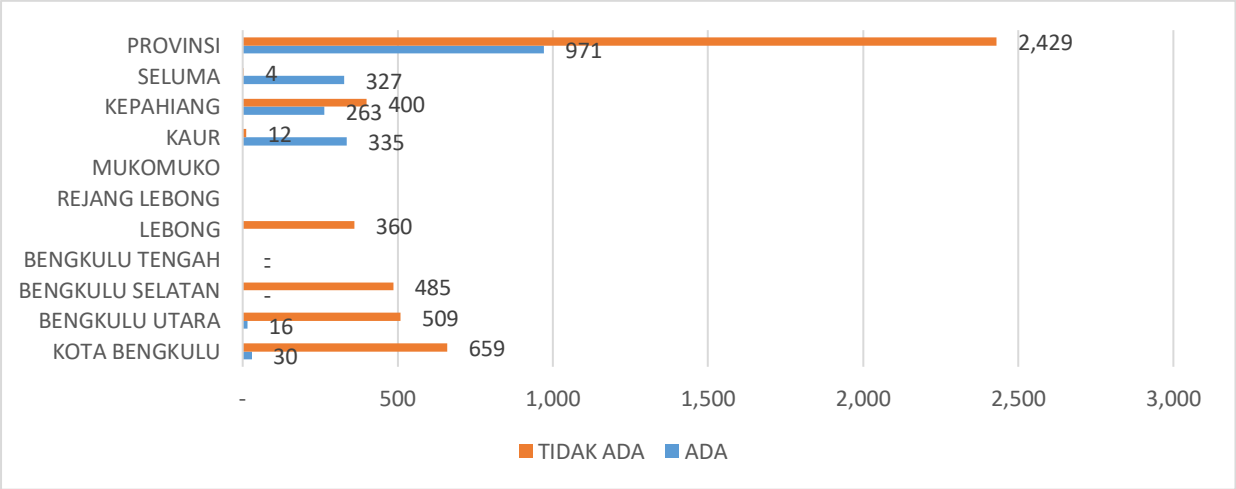
Tabel 2.12
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir Tahun 2023

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ADA	30	16	-	-	-	-	-	335	263	327	971
TIDAK ADA	659	509	485	-	360	-	-	12	400	4	2.429

Keterangan : Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, dan Mukomuko data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.25
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir Tahun 2023



Keterangan : Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, dan Mukomuko data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu sebanyak 1.201 orang dan Tidak Butuh Alat Bantu 2.038 orang. Kebutuhan Alat Bantu terbanyak di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 269 orang, Rejang Lebong 234 orang, Kaur 225 orang, Kepahiang 219 orang, Kota Bengkulu 214 orang, Bengkulu Selatan 125 orang, Lebong 102 orang, dan Bengkulu Utara 82 orang (Kabupaten Mukomuko dan Seluma data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

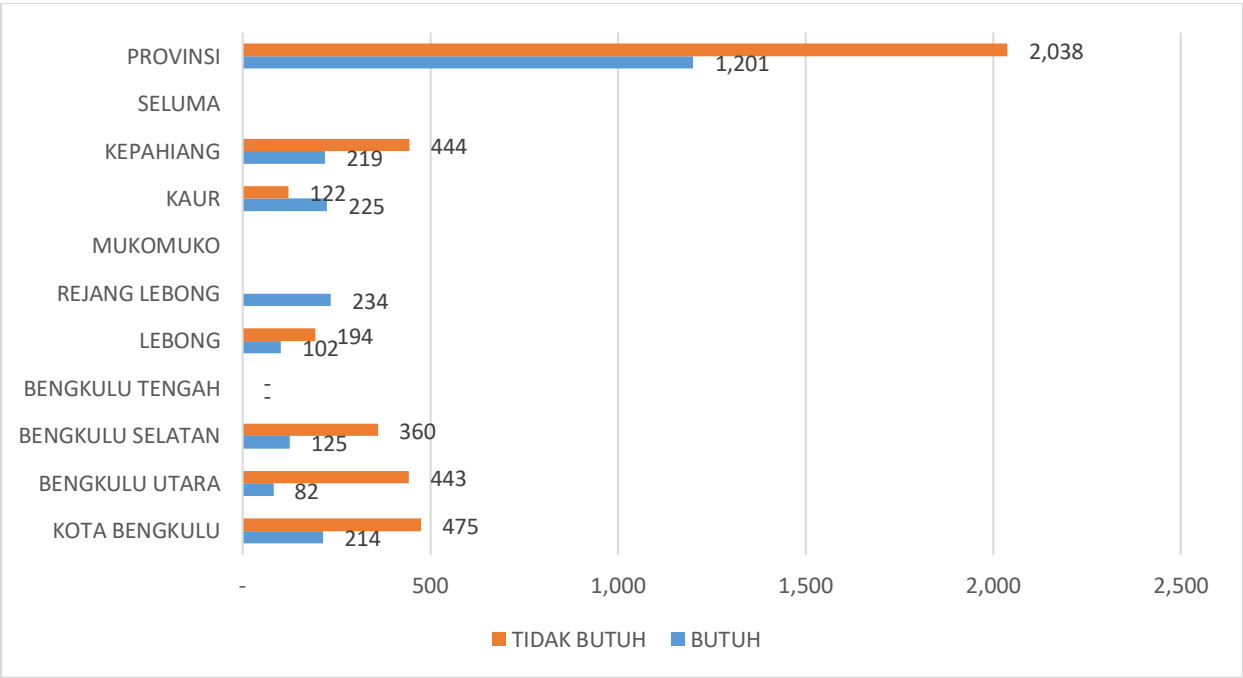
Tabel 2.13
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu Tahun 2023

KEBUTUHAN ALAT BANTU	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
BUTUH	214	82	125	269	102	234		225	219		1.201
TIDAK BUTUH	475	443	360	-	194			122	444		2.038

Keterangan : Kabupaten Mukomuko dan Seluma Data Tidak Tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.26
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kebutuhan Alat Bantu Tahun 2023



Keterangan : Kabupaten Mukomuko dan Seluma Data Tidak Tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu berdasarkan Kepemilikan PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri sebanyak 2.899 orang dan Tidak Ada PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri sebanyak 1.485 orang. Jumlah Penyandang Disabilitas Tidak Ada PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri terbanyak di Bengkulu Utara sebanyak 459 orang, Lebong 297 orang, Kota Bengkulu 289 orang, Lebong 297 orang, Seluma 144 orang, dan Kepahiang 30 orang (Kabupaten Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14

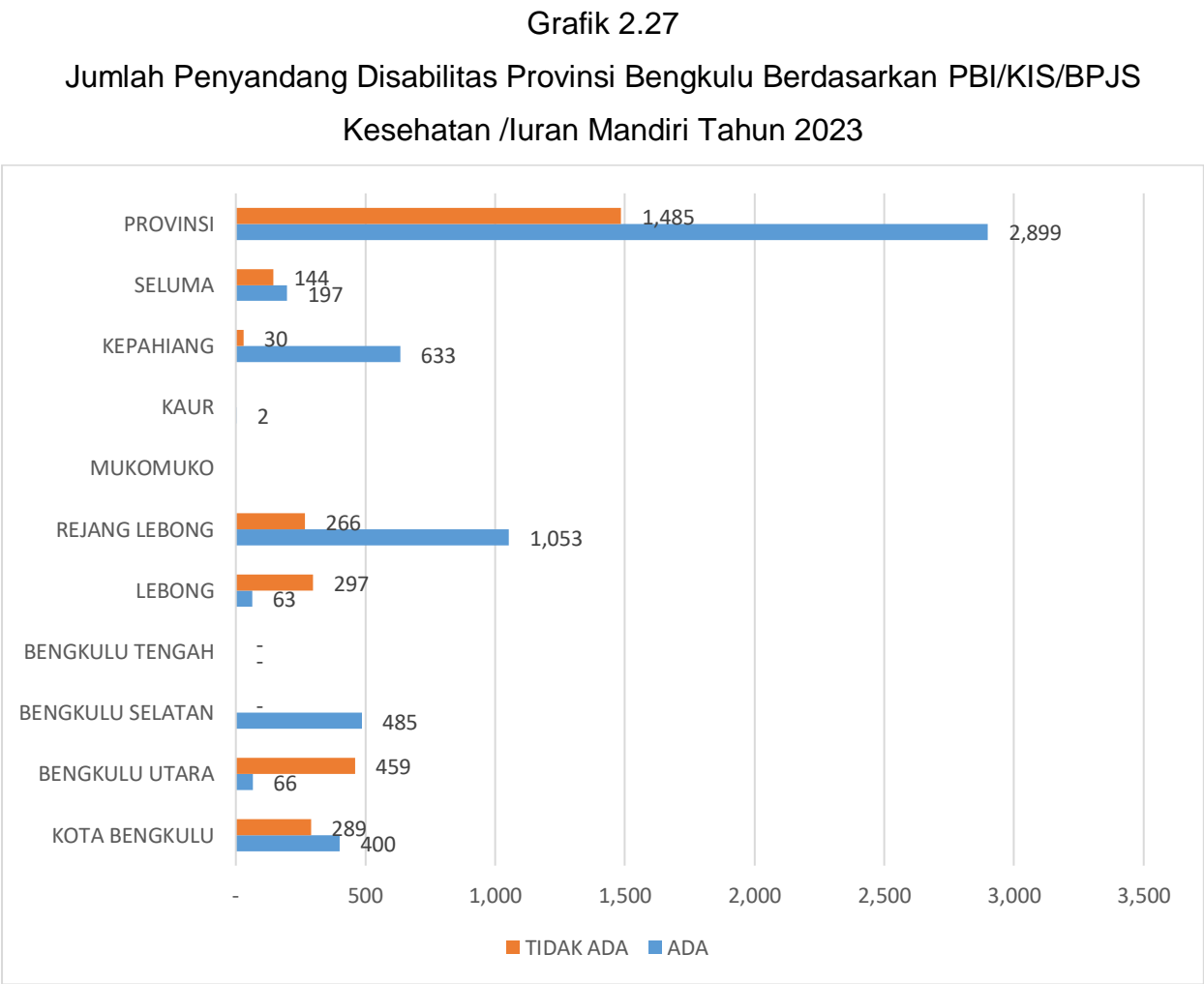
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan PBI/KIS/BPJS Kesehatan /Iuran Mandiri Tahun 2023

PBI/KIS/BPJS KESEHATAN /IURAN MANDIRI	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ADA	400	66	485	-	63	1.053		2	633	197	2.899
TIDAK ADA	289	459	-	-	297	266			30	144	1.485

Keterangan : Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Keterangan : Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kepemilikan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 55 orang, sedangkan yang Tida Ada BPJS Tenaga Kerja sebanyak 3.461 orang. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tida Ada BPJS Tenaga Kerja terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1.314 orang, Kepahiang 663 orang, Kota Bengkulu 639 orang, Bengkulu Selatan 485 orang, dan Lebong 360 orang (Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur, dan Seluma data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan BPJS Tenaga Kerja

Tahun 2023

BPJS TENAGA KERJA	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ADA	50		-	-		5			-		55
TIDAK ADA	639		485	-	360	1.314			663		3.461
Keterangan : Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur dan Seluma Data Tidak Tersedia											

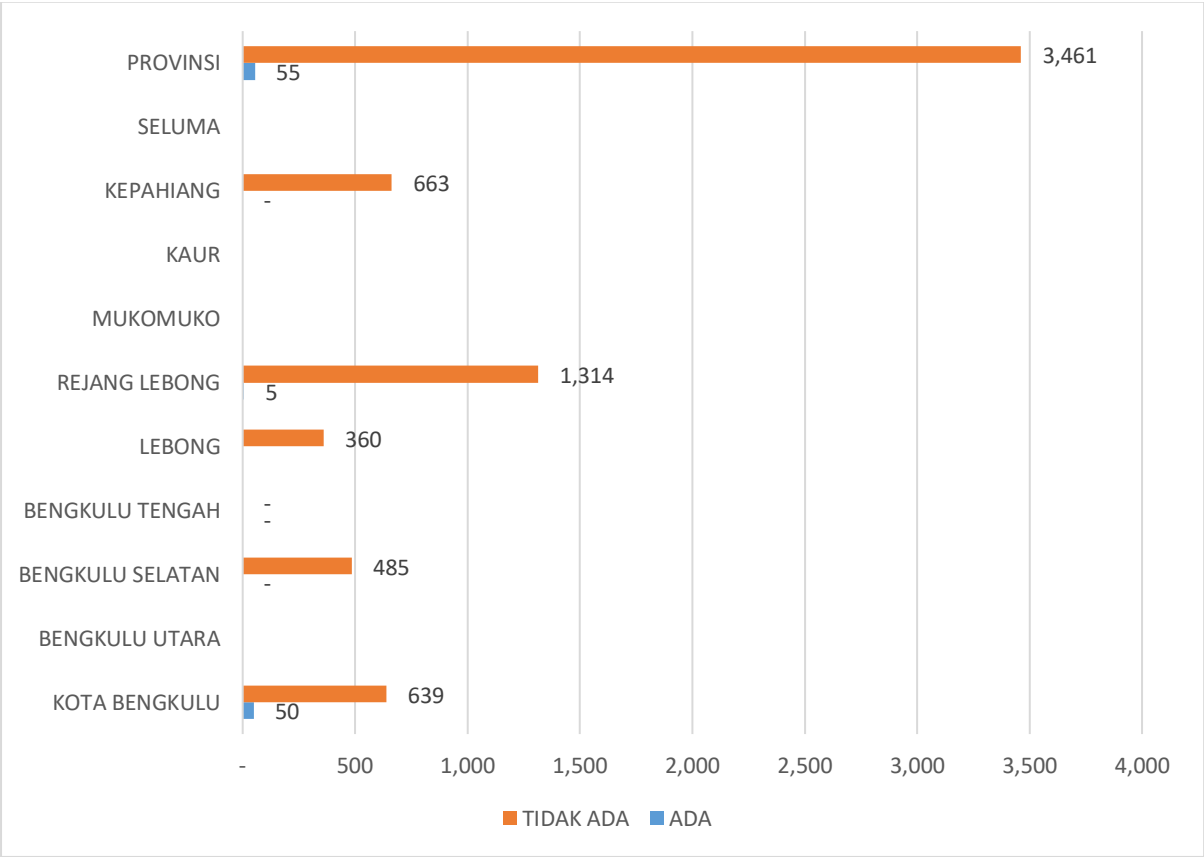
Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.28

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan BPJS Tenaga Kerja

Tahun 2023



Keterangan : Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur dan Seluma Data Tidak Tersedia

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keadaan Rumah Ada Toilet sebanyak 3.634 rumah, sedangkan yang Tida Ada Toilet sebanyak 453 rumah. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tidak Ada Toilet terbanyak di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 295 rumah, Lebong 253 rumah, Rejang Lebong 155 rumah, Kepahiang 23 rumah, Kaur 20 rumah, dan Seluma 2 rumah (Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keadaan Rumah

Tahun 2023

KEADAAN RUMAH	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ADA TOILET	689		485	138		1.164		327	640	329	3.634
TIDAK ADA TOILET	-		-	295	253	155		20	23	2	453

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia

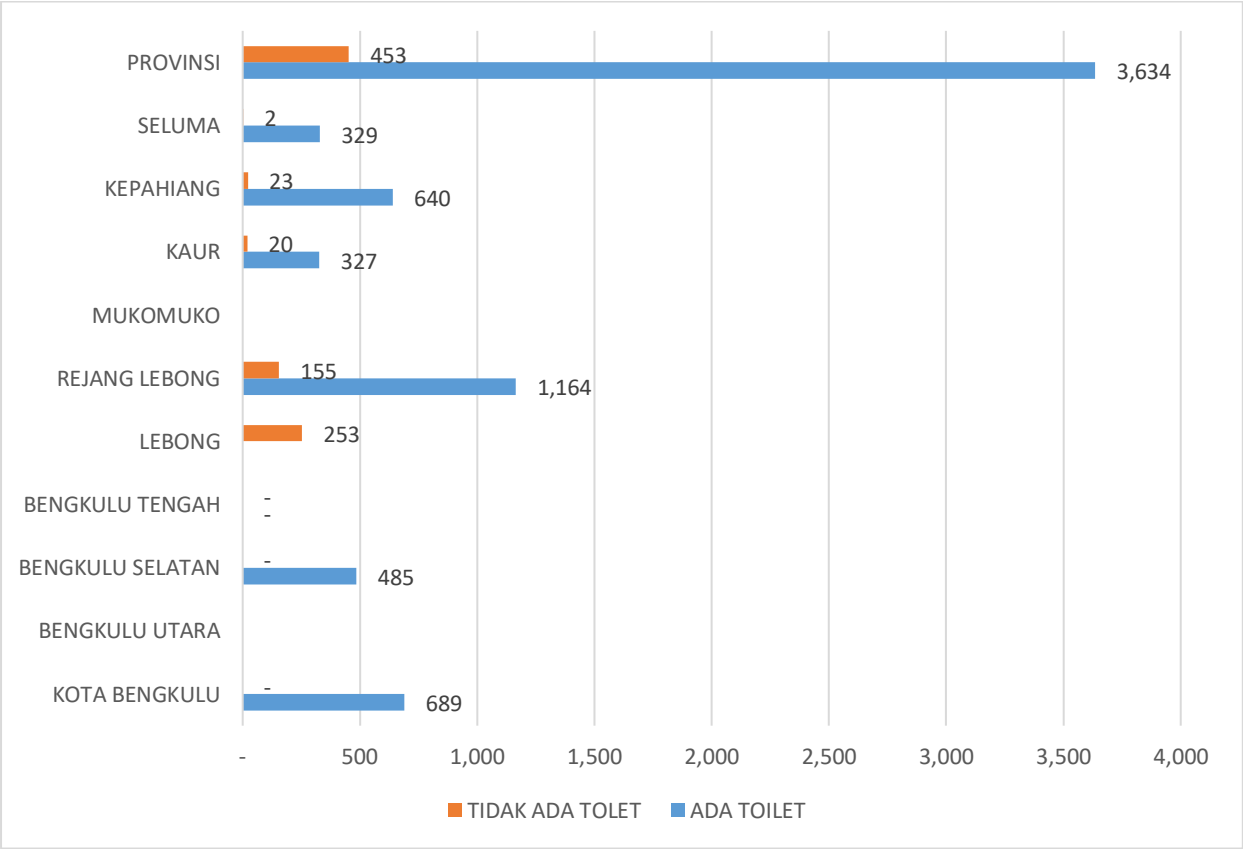
Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.29

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keadaan Rumah

Tahun 2023



Keterangan : Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur dan Seluma Data Tidak Tersedia

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Ketersediaan Sumber Air sebanyak 3. 653 rumah, sedangkan yang Tidak Ada Sumber Air sebanyak 181 orang. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tidak Ada Sumber Air terbanyak di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 309 rumah, Rejang Lebong 155 rumah, Kaur 20 rumah, Kepahiang 4 rumah, dan Seluma 4 rumah (Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, dan Mukomuko data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Sumber Air

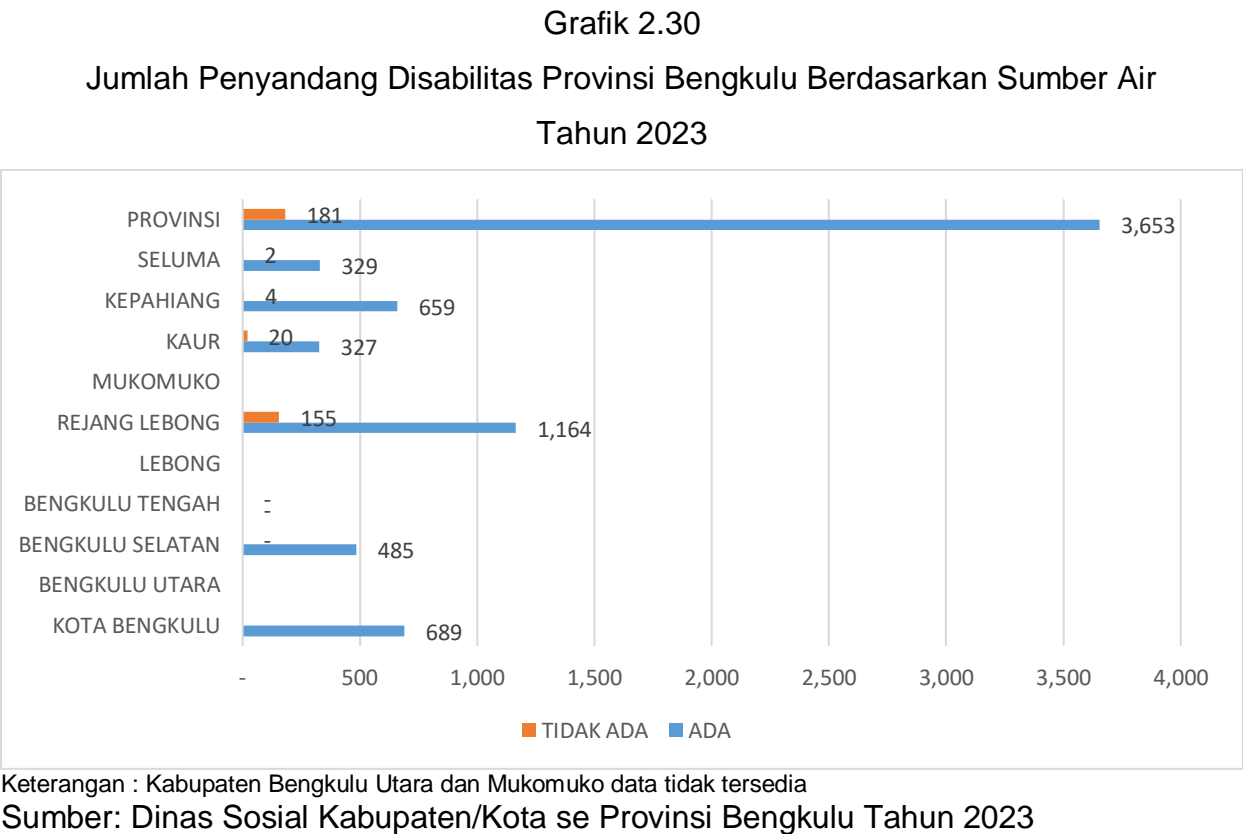
Tahun 2023

SUMBER AIR	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ADA	689		485	124		1.164		327	659	329	3.653
TIDAK ADA			-	309		155		20	4	2	181

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan BPNT Yang Sudah Diberikan sebanyak 699 orang, terbanyak di Rejang Lebong sebanyak 326 orang, Kota Bengkulu sebanyak 200 orang, Bengkulu Utara 75 orang, Bengkulu Selatan 52 orang, Lebong 26 orang, dan Kepahiang 20 orang (Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Seluma data tidak tersedia). Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan Kursi Roda Yang Sudah Diberikan sebanyak 404 orang, terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 175 orang, Kaur 87 orang, Bengkulu Selatan 63 orang, Kepahiang 40 orang, Kota Bengkulu 20 orang, Lebong 17 orang, dan Bengkulu Utara 2 orang (Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Seluma data tidak tersedia). Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan selain BPNT dan Kursi Roda Yang Sudah Diberikan sebanyak 953 orang, terbanyak di Rejang Lebong sebanyak 491 orang, Kepahiang 212 orang, Lebong 205 orang, dan

Bengkulu Utara 45 orang (Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Seluma data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan Yang Sudah Diberikan Tahun 2023

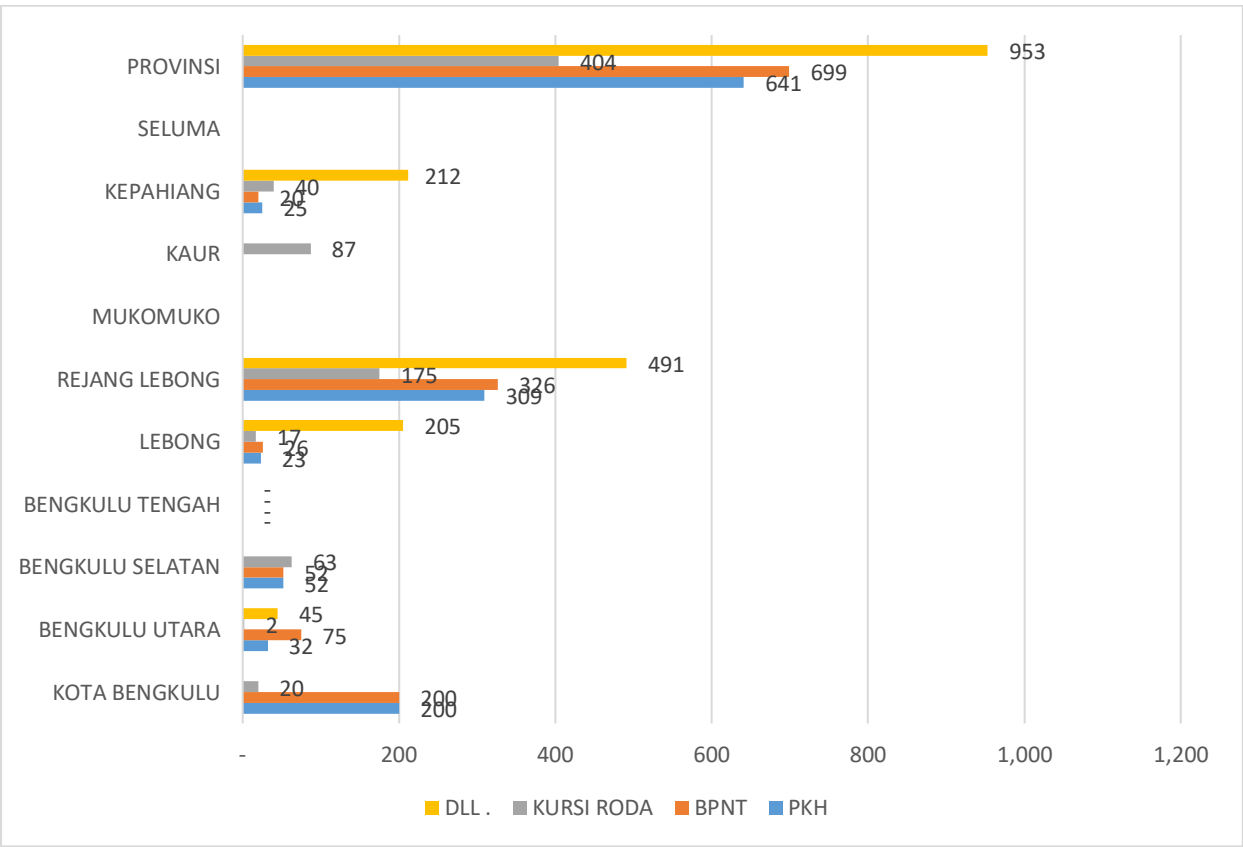
BANTUAN LAIN YANG SUDAH DIDAPATKAN	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
BPNT	200	75	52	-	26	326			20		699
KURSI RODA	20	2	63	-	17	175		87	40		404
DLL .		45		-	205	491			212		953

Keterangan : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.31

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bantuan Yang Sudah Diberikan Tahun 2023



Keterangan : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Mukomuko data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Yang Diperlukan sebanyak 3.677 orang dari 12 Jenis Bantuan yang tersebar di 10 kabupaten/Kota. Bantuan yang diperlukan terbanyak adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 1.276. UEP merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga yang diorientasikan kepada kegiatan individu atau kelompok untuk pemberdayaan masyarakat dengan bantuan penguatan modal usaha

dan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi warga penyalah gunaan nafza, tunanetra, lansia, dan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan Sembako yang diperlukan adalah 1.142 bantuan. Bantuan Alat Bantu Kursi Roda yang diperlukan sebanyak 403 buah, Bantuan Kursi Roda Khusus Anak yang diperlukan sebanyak 256 buah, Bantuan Kruk yang diperlukan sebanyak 147 buah, Bantuan Alat Bantu Dengar yang diperlukan sebanyak 195 buah, Bantuan Tongkat Netra yang diperlukan sebanyak 100 buah, Bantuan Kaki Palsu yang diperlukan sebanyak 47 buah, Bantuan Tangan Palsu yang diperlukan sebanyak 6 buah, Bantuan Kursi Roda Adaktif yang diperlukan sebanyak 5 buah, Bantuan Kacamata yang diperlukan sebanyak 95 buah, Bantuan Tongkat Kaki IV yang diperlukan sebanyak 5 buah (Kabupaten Seluma data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

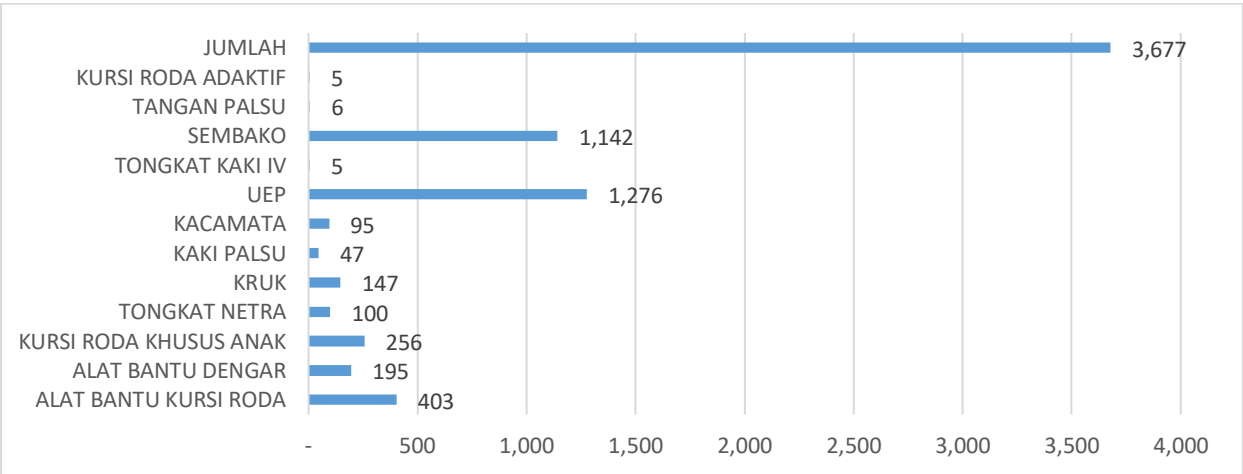
Tabel 2.19
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Yang Diperlukan Tahun 2023

JENIS BANSOS YANG DIPERLUKAN	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
ALAT BANTU KURSI RODA	40	50	150	78	10	98	3	22	30		403
ALAT BANTU DENGAR	18	7	60	26	17	57	1	10	25		195
KURSI RODA KHUSUS ANAK	40	2	162	7	7	37		3	5		256
TONGKAT NETRA	15	2	50	15	11	10	1	8	3		100
KRUK	45	15	50	18	3	25		4	5		147
KAKI PALSU	25	3	-	-	6		2	2	9		47
KACAMATA	10		50	-	13	7		15			95
UEP	200	60	165	-	235	35		256	325		1.276
TONGKAT KAKI IV		2					3				5
SEMBAKO	20			433		689					1.142
TANGAN PALSU		1			2				3		6
KURSI RODA ADAKTIF				5							5
JUMLAH	413	142	687	438	304	958	10	320	405	-	3.677

Keterangan : Kabupaten Seluma data tidak tersedia

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinai dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.32
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Bantuan Sosial Yang Diperlukan Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

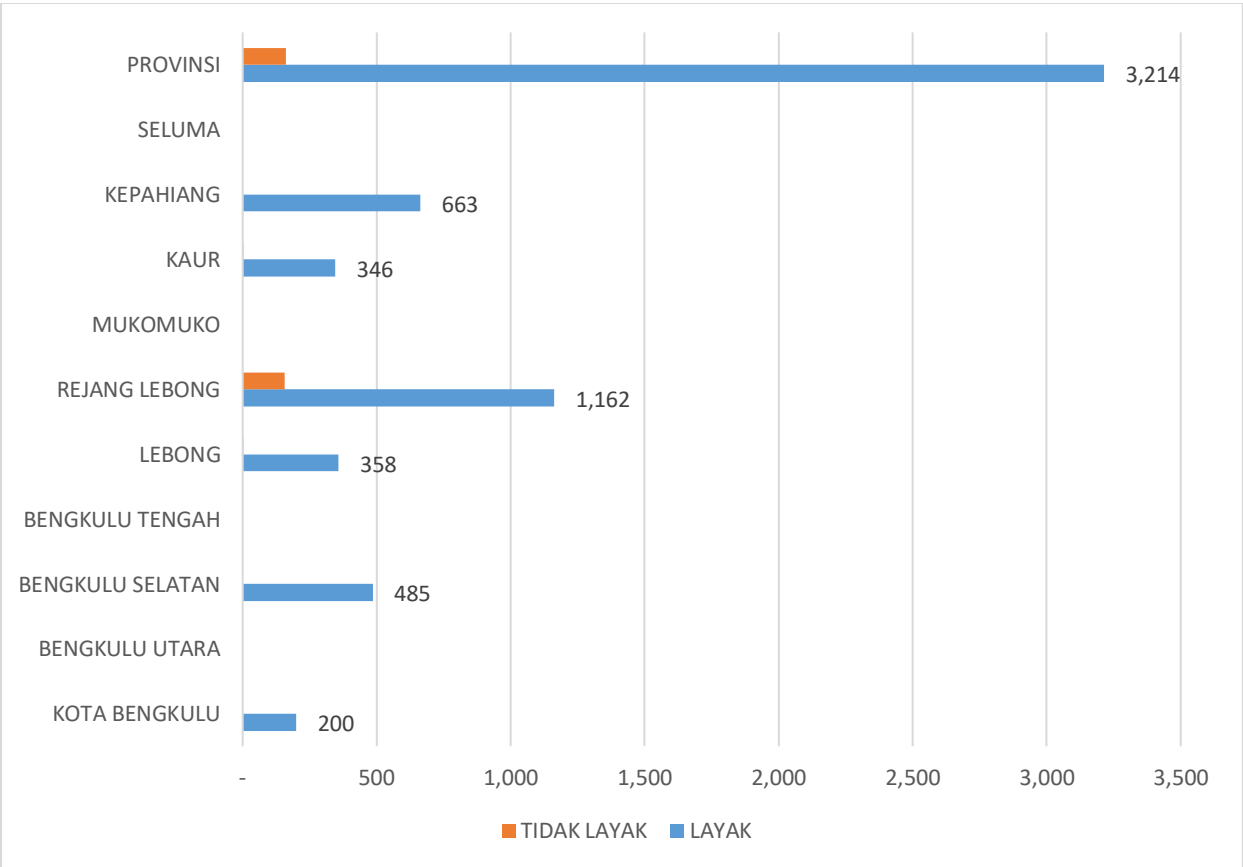
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT sebanyak 3.214 orang, sedangkan yang Tidak Layak Penerima PKH/BPNT sebanyak 160 orang. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT terbanyak di Rejang Lebong sebanyak 1.162 orang, Kepahiang 663 orang, Bengkulu Selatan 485 orang, Lebong 358 orang, Kaur 346 orang, dan Kota Bengkulu 200 orang (Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Seluma data tidak tersedia). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT Tahun 2023

KELAYAKAN PENERIMA PKH/ BPNT	KOTA BENGKULU	BENGKULU UTARA	BENGKULU SELATAN	BENGKULU TENGAH	LEBONG	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	KAUR	KEPAHIANG	SELUMA	PROVINSI
LAYAK	200		485		358	1.162		346	663		3.214
TIDAK LAYAK	-		-	-	2	157		1			160
Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko data tidak tersedia											

Keterangan : Data by name by address tersedia pada Dinas Sosial Provinai dan Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Grafik 2.33
Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kelayakan Penerima PKH/BPNT Tahun 2023



Keterangan : Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko data tidak tersedia
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2023

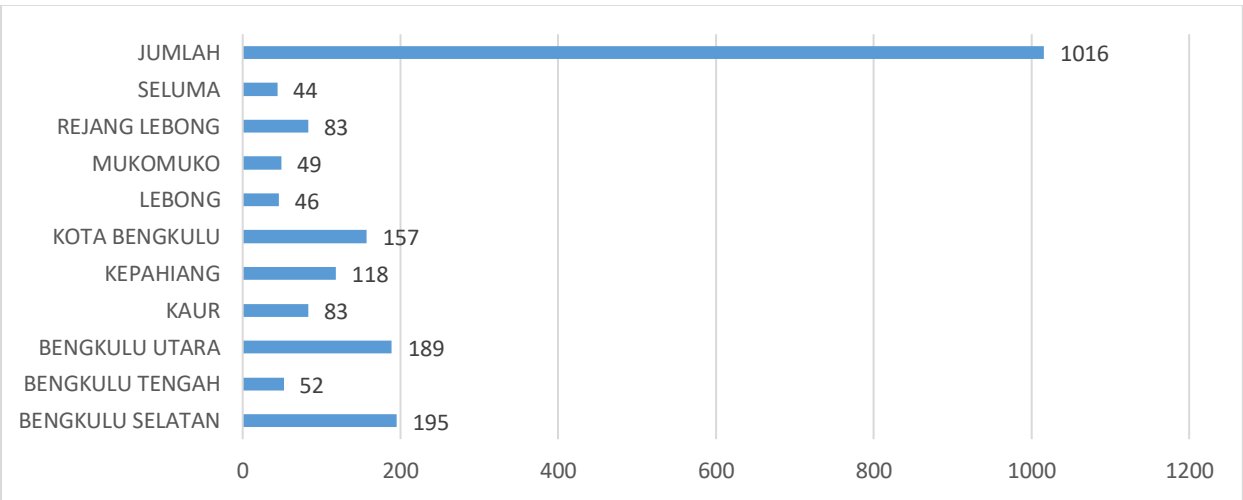
Penyandang disabilitas masuk satu kategori bansos PKH (Program Keluarga Harapan) 2023 dari 7 kategori. Bansos BLT Penyandang Disabilitas ini akan disalurkan 4 kali tahapan dalam tiga bulan sekali. Jumlah Komponen Disabilitas Program Keluarga Harapan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebanyak 1.016 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Data Jumlah Komponen Disabilitas Program Keluarga Harapan
Provinsi Bengkulu Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KOMPONEN DISABILITAS
1	BENGKULU SELATAN	195
2	BENGKULU TENGAH	52
3	BENGKULU UTARA	189
4	KAUR	83
5	KEPAHIANG	118
6	KOTA BENGKULU	157
7	LEBONG	46
8	MUKOMUKO	49
9	REJANG LEBONG	83
10	SELUMA	44
	JUMLAH	1.016

Sumber : Data Diambil Dari Jumlah KPM PKH SP2D Tahap 1

Grafik 2.34
Data Jumlah Komponen Disabilitas Program Keluarga Harapan
Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Sumber : Data Diambil Dari Jumlah KPM PKH SP2D Tahap 1

Dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 5 disebutkan: Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemili (BAWASLU) bersama DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Nomor: 066/HK.02.03/2023 dan Nomor : 04/PPUAD-BKL/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia. Adapun maksud dari nota kesepahaman untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dan mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024.

Tujuan kesepahaman adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 tang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aksesibel bagi penyandang disabilitas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 berdasarkan data KPU Provinsi Bengkulu tercatat 9.197 orang yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 129 Kecamatan, dan 1.513 Kelurahan/Desa yang terdiri dari Disabilitas Fisik 3.909 orang, Disabilitas Intelektual 627 orang, Disabilitas Mental 2.124 orang, Disabilitas Sensorik Wicara 1.024, Disabilitas Sensorik Rungu 535 orang, Disabilitas Sensorik Netra 979 orang.

Tabel 2. 22
Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu

NO	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	JENIS DISABILITAS						JUMLAH
				(1) DISABILITAS FISIK	(2) DISABILITAS INTELEKTUAL	(3) DISABILITAS MENTAL	(4) DISABILITAS SENSORIK WICARA	(5) DISABILITAS SENSORIK RUNGU	(6) DISABILITAS SENSORIK NETRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+10
1	BENGKULU SELATAN	11	158	455	93	238	113	78	142	1119
2	REJANG LEBONG	15	156	425	83	272	90	43	89	1002
3	ENGKULU UTARA	19	220	688	112	314	149	86	147	1496
4	KAUR	15	195	361	46	193	86	64	84	834
5	SELUMA	14	202	417	58	302	131	96	160	1164
6	MUKOMUKO	15	151	412	53	161	147	63	88	924
7	LEBONG	12	104	245	54	126	65	31	59	580
8	KEPAHIANG	8	117	245	29	174	60	22	50	580
9	BENGKULU TENGAH	11	143	198	39	93	65	26	83	504
10	KOTA BENGKULU	9	67	463	60	251	118	26	76	994
Jumlah	10 Kabupaten/ Kota	129	1513	3909	627	2124	1024	535	978	9197

Sumber : KPU Provinsi Bengkulu

Yayasan yang ada di Kota Bengkulu yang menangani Penyandang Disabilitas adalah :

1. Binaan Yayasan Pijar Qalisya Tahun 2023
2. Yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Bina Netra Amal Mulia Kota Bengkulu

Adapun data Penyandang Disabilitas setiap yayasan dapat dilihat secara rinci ada pada yayasan tersebut diatas.

2.3 Tantangan Dalam Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah

Sebagian besar penyandang disabilitas di Bengkulu hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, jumlah penyandang disabilitas yang semakin meningkat, Tingkat partisipasi yang masih rendah dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan lain-lain), masih mengalami eksklusi, karena belum terpenuhinya aksesibilitas di lingkungan social, masih terbatasnya akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, mewujudkan kesamaan hak menuju kehidupan yg sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, dan belum tersedianya basis data yang terintegrasi secara nasional (lintas sektoral).

Penjangkauan terhadap penyandang disabilitas mengalami tantangan dari berbagai aspek akibat adanya stigma dan sulitnya melakukan deteksi, khususnya bagi penyandang disabilitas mental/psikososial dan penyandang disabilitas intelektual.

A. Impian Menerapkan Sistem Ketenagakerjaan dan Ekonomi Inklusif

Saat ini, sektor ketenagakerjaan masih menyimpan sejumlah hambatan bagi penyandang disabilitas. Inklusi-disabilitas di sektor ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Beberapa hambatan tersebut teridentifikasi adalah pada aksesibilitas di lingkungan, transportasi, produk dan jasa; desain perlindungan sosial yang kurang menguntungkan; pendidikan dan pelatihan vokasi yang non-inklusif; kurangnya dukungan bagi kaum muda penyandang disabilitas dalam proses transisi dari sekolah ke tempat kerja; ketiadaan pelayanan ketenagakerjaan publik yang mendukung penyandang disabilitas; dan masih rendahnya kesadaran tiap-tiap penyedia kerja untuk patuh terhadap kewajiban kuota yang diamanatkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di tingkat pemberi kerja, baik pemerintah maupun pihak swasta, masih tampak kurang kesadaran dan keyakinan untuk melibatkan penyandang disabilitas di tempat kerja. Selain itu, jika penyandang disabilitas bekerja, maka pekerja penyandang disabilitas akan menghadapi kondisi di mana tempat dan peralatan kerja yang tersedia sulit dijangkau dan fasilitas TIK yang tidak akses. Lalu, masih kurangnya upaya penyesuaian tempat kerja dan rendahnya dukungan untuk mempertahankan pekerjaan dan mengembangkan karir bagi penyandang disabilitas untuk jangka panjang; serta kurangnya dukungan bagi UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Aspek lain dari ketenagakerjaan yang juga teridentifikasi dan menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam bekerja adalah keberadaan asosiasi atau serikat pekerja dan pengusaha masih rendah perhatiannya terhadap penyandang disabilitas, baik calon pekerja maupun mereka yang bekerja. Begitu pula masih tingginya pemikiran dan

perlakuan stigmatik (labelis, stereotif, segregatif dan diskriminatif) dan cenderung lebih terekspos ke kekerasan dan pelecehan termasuk di tempat kerja.

Akar permasalahan di atas dalam banyak pandangan penyandang disabilitas adalah minimnya pengetahuan tentang kebijakan disabilitas dalam dunia kerja dan kesadaran tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif disabilitas, terutama pada proses implementasinya. Stigmatisasi disabilitas juga berpengaruh besar pada munculnya kesulitan penyandang disabilitas dalam bekerja. Misalnya adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan dipandang sebagai beban dalam keluarga. Hal lain yang teridentifikasi adalah kurangnya ketersediaan informasi mengenai penyandang disabilitas potensial untuk bekerja, mengingat penyandang disabilitas kebanyakan menjadi warga negara yang tidak tampak, tersembunyi dan terabaikan. Hal ini menjadi seperti lingkaran setan yang terus menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kondisi rentan dan kerentanan membawanya pada kesulitan-kesulitan berikutnya hingga keberadaannya menjadi sangat terpinggir bahkan tak terlihat lagi secara struktural.

Inilah yang menjadi tantangan pemerintah dan organisasi pergerakan disabilitas saat ini dan di masa-masa mendatang. Beberapa tawaran yang diajukan pemerintah adalah melalui program lima tujuan kunci pembangunan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mengantisipasi lapangan kerja masa depan. Pertama, menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru dan hubungan kerja yang dapat mengintegrasikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kedua, pengembangan keahlian dan lifelong learning inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketiga, universal design menjadi acuan dari pembangunan infrastruktur, serta pengembangan produk dan jasa. Keempat, assistive technology terjangkau dan tersedia. Kelima, upaya nyata untuk mengikutkan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 “Setiap Tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Kewajiban Pemerintah & Pemerintah Daerah (Pasal 45-46 UU 8 Th 2016) menyebutkan :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. (Pasal 45)

- b. Pasal 46 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- c. Pasal 46 ayat (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Penanganan Isu Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagai bagian Kelompok Rentan dapat dilakukan melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja bagi kelompok marjinal, mengalami diskriminasi, atau hidup dengan hambatan, ketenagakerjaan Inklusif sangat berkait erat dengan pelayanan dan fasilitas ketenagakerjaan termasuk di antaranya dan diskriminasi di tempat kerja, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

UU NO. 8 Tahun 2016 & Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan Dan Koperasi Pasal 53 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pekerjaan :

- 1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- 2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- 3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- 4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- 5. mendapatkan program kembali bekerja;
- 6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- 7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- 8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan

Tantangan Ketenagakerjaan Inklusif :

- 1. Kurangnya Enabling Environment
 - a. Hambatan aksesibilitas di lingkungan, transportasi, produk dan jasa
 - b. Desain perlindungan sosial yang kurang menguntungkan
 - c. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang non-inklusif
 - d. Kurangnya dukungan bagi kaum muda dengan disabilitas dalam proses transisi dari sekolah ke tempat kerja
 - e. Ketidakadaan pelayanan ketenagakerjaan publik yang mendukung
 - f. Rendahnya kesadaran untuk patuh terhadap kewajiban kuota

2. Pemberi Kerja

- a. Kurangnya kesadaran dan keyakinan untuk melibatkan penyandang disabilitas di tempat kerja
- b. Tempat dan peralatan kerja sulit dijangkau, termasuk TIK
- c. Kurangnya upaya penyesuaian tempat kerja
- d. Kurangnya dukungan untuk mempertahankan pekerjaan dan mengembangkan karir
- e. Kurangnya dukungan bagi UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas

3. Serikat Pekerja & Asosiasi Pengusaha

Kurangnya perhatian bagi penyandang disabilitas, baik calon pekerja maupun mereka yang bekerja

4. Masyarakat Umum

- a. Adanya stigma dan stereotype
- b. Diskriminasi dan cenderung lebih terekspos ke kekerasan dan pelecehan termasuk di tempat kerja

Upaya Koordinasi & Kolaborasi dilakukan berdasarkan Surat Menaker Nomor. BM/332/PK.01.03/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020, Tentang Permohonan Dukungan Atas Percepatan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, Tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

B. Layanan Kesehatan Inklusif Fasilitas Kesehatan Dasar sampai Rumah Sakit

Layanan kesehatan inklusif disabilitas mencakup banyak hal, salah satu yang cukup krusial adalah layanan yang diberikan pemerintah baik melalui Fasilitas Kesehatan Dasar maupun rumah-rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, tenaga kesehatan juga dinilai belum mampu menangani kebutuhan penyandang disabilitas.

Karena keterbatasan dan posisi penyandang disabilitas yang rentan, penyandang disabilitas memerlukan bantuan diantaranya asuransi kesehatan. Mereka tidak tahu cara mengetahui adanya bantuan atau anggaran terkait dengan disabilitas. Penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasi akan adanya bantuan, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat. Hampir seluruh penyandang disabilitas (juga tidak mengetahui anggaran-anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyandang disabilitas (terkait program bantuan untuk penyandang disabilitas).

Masih banyaknya lingkungan yang tak ramah penyandang disabilitas (stigmatik, tidak akses, rendah ketersediaan akomodasi yang layak) membuat warga dengan

disabilitas harus membayar lebih mahal ketika hendak mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan peta jalan layanan kesehatan inklusi. Peta jalan ini akan menjadi acuan pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas di sektor kesehatan. Berikut adalah kategori dalam aspek-aspek bilogi ini.

Pertama, Penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan aturan layanan kesehatan inklusif; kemudian, kabupaten/ kota memiliki regulasi ramah disabilitas. Kedua, Penguatan peran serta masyarakat termasuk Penyandang Disabilitas dan kerjasama dengan sektor Kesehatan; Kabupaten/Kota yang memiliki paling kurang 1 Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM). Ketiga, Peningkatan akses pelayanan kesehatan inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Kabupaten/Kota memiliki paling kurang 50% Puskesmas Ramah Disabilitas 1 Rehabilitasi. Keempat, penguatan sistem surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan; Kabupaten/Kota memiliki Pencatatan dan Pelaporan tentang Disabilitas. Kelima, penyediaan sumber daya yang mampu melayani Penyandang Disabilitas; Kabupaten/Kota memiliki Nakes terlatih sensitivitas dan interaksi Disabilitas.

C. Pembenahan Infrastruktur Menuju Penyandang Disabilitas Bebas Hambatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi. Selain itu juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara.

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 terdapat konsep affirmative action bagi orang penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CRPD. Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi diatur mengenai kewajiban untuk memenuhi hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas telah dapat dimungkinkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D. Akses kepada keadilan juga telah diatur dengan memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk

melakukan klaim manakala hak-haknya tidak terpenuhi. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 juga memberikan kekhususan dalam hal transportasi bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini tercermin melalui sarana transportasi umum yang tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung bagi penyandang disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak cocok bagi penyandang disabilitas, elevator yang terlalu sempit, sarana sanitasi yang tidak mendukung, dan juga jalanan yang licin serta tidak rata yang tidak dapat dilewati oleh penyandang disabilitas. Hukum berjalan tanpa implementasi yang layak. Hukum dan kebijakan dibuat dengan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan. Masalahnya juga menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis penyandang disabilitas dimana kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak selalu sama. Namun demikian, pemerintah harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara progresif. Kesenjangan juga terjadi ketika masyarakat kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas.

Salah satu hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas adalah infrastruktur dan sarana publik yang belum sepenuhnya menjamin aksesibilitas. Masih banyak penyandang disabilitas sulit mengakses rumah ibadah akses, ruang-ruang kelas di sekolah umum, pusat layanan publik, dan seterusnya. Pemerintah belum menerapkan standar ‘desain universal’ yaitu standar desain yang akomodatif atas semua pengguna. Disahkannya “Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas sarana publik dan permukiman serta perlindungan dalam situasi bencana bagi penyandang disabilitas”, serta sejumlah aturan yang telah ada sebelumnya perlu didorong percepatan implementasinya.

Pemahaman tentang aspek ragam aksesibilitas masih kurang dan belum sepenuhnya masuk ke dalam persyaratan IMB sehingga masih banyak pembangunan fasilitas publik yang belum memiliki aksesibilitas. Jikapun aspek aksesibilitas sudah masuk Detail Engineering Design (DED), pengadaan barang dan jasa belum konsisten terhadap aksesibilitas dan penegakan hukum belum terlihat atau masih parsial.

D. Pendataan Disabilitas dan Program Perlindungan Sosial Penyandang disabilitas

Jika mengaitkan pendataan disabilitas dengan konteks sistem perlindungan sosial, maka data disabilitas dikaitkan dengan warga penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan perlindungan sosial, yakni mereka yang masuk kategori sebagai miskin, tidak mampu dan cacat total tetap (UU No. 40/tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional). Dalam konteks ini, melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada 28 Juli 2020, pemerintah terus mengembangkan satu sistem pendataan yang disebut DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Dengan demikian, DTKS bukanlah data keseluruhan penyandang disabilitas. Pemerintah harus dan sedang berupaya menyiapkan data disabilitas secara menyeluruh.

Perluasan jaring pengaman sosial dan ekonomi yang inklusif perlu dikembangkan dan dipastikan menjangkau keluarga penyandang disabilitas yang rentan. Untuk itu, pemerintah harus memasukkan unsur disabilitas sebagai kriteria. Kemudian perlu melakukan perpanjangan dan kemudahan relaksasi kredit dan perluasan subsidi listrik, Ekosistem ekonomi yang inklusif Penguatan kapasitas di sektor informal.

Bagi penyandang disabilitas, perlindungan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 CRPD, diorientasikan pada dua hal pokok. Dua hal tersebut adalah perlindungan untuk tetap dapat memperoleh dan menikmati standar hidup yang layak (berorientasi kemiskinan dan tingkat kesejahteraan), dan dukungan untuk dapat berpartisipasi secara inklusif (berorientasi kebutuhan disabilitas). Dua hal inilah yang dalam indikator struktur akan dianalisa keberadaannya dengan melihat regulasi yang berlaku mengenai perlindungan sosial.

Penyelenggaraan skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat memberikan perubahan partisipasi yang lebih efektif bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan antara angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas, dibandingkan dengan angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya yang biasa dikeluarkan oleh BPS. Tantangannya adalah kemungkinan data ini belum bisa diperoleh mengingat belum adanya data pilah penyandang disabilitas dalam sensus penduduk. Untuk itulah, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi negara kita, dan khususnya untuk kepentingan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusi.

E. Layanan Pendidikan Inklusif Fasilitas Pendidikan

Pendidikan harus mudah dijangkau terlepas status setiap anak. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Namun, dalam isu penyandang disabilitas (di Indonesia), visi ini sangat sulit dicapai. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut

menyatakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan khusus bagi dan setara bagi penyandang disabilitas. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditambahkan bahwa setiap tingkatan pendidikan harus menerima peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan kondisi fisik dan mental.

Semangat non-diskriminasi telah muncul di dalam kebijakan sektor pendidikan. Namun di tahap pelaksanaan, hak untuk diperlakukan secara setara di sekolah umum tidak dapat berjalan. Pendidikan konvensional melihat bahwa masalah disabilitas sebagai hambatan siswa untuk memperoleh pencapaian sebagaimana 'siswa normal'. Pada kebanyakan kasus, siswa yang berasal dari sekolah khusus menghadapi perlakuan diskriminatif karena pencapaian/tingkat pendidikannya direndahkan dan dibedakan. Salah satunya adalah dengan ijazah yang mereka miliki tidak dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.

Pendidikan bagi siswa disabilitas perlu mendapatkan perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan para pihak penyelenggara layanan Pendidikan termasuk di lingkungan Pendidikan berbasis keagamaan, agar menyiapkan panduan pembelajaran yang tetap aksesibel, yaitu disediakan dalam berbagai format. Kemudian, melakukan inovasi metode dan media belajar yang mudah diterima bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kemampuannya. Untuk memudahkan upaya inovatif agar pihak dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam menyusun dan mendiseminasi Aksesibilitas platform pembelajaran.

Keberadaan program untuk mengakui dan mempromosikan agar orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, termasuk mengembangkan potensi intelektual dan kreatifitas mereka.

F. Kerentanan Perempuan Penyandang disabilitas dan Hak Akses Penyandang disabilitas Atas Keadilan

Penyandang Disabilitas Perempuan memiliki multikerentanan. Untuk itu, keberadaannya perlu menjadi pertimbangan pemerintah dan arus utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kementerian/ Lembaga terkait yang mengurus perempuan diantaranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau disingkat KPPPA dan di tingkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), kementerian sosial, P2TP2A (Kapolresta), dan Dinas Sosial.

Pemenuhan hak perempuan disabilitas dari indikator struktur akan berkaitan dengan sejumlah regulasi dan panduan legal lainnya. Misalnya ketersediaan regulasi baik setingkat UU, PP maupun Permen dan termasuk peraturan daerah. Saat ini misalnya telah tersedia Permen KPPPA No. 23/2010 tentang panduan pembuatan Pusat

Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD), juga telah ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A serta Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Jika ditelusuri secara seksama, proses pemantauan memungkinkan identifikasi regulasi ini meluas. pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, pemantauan ini akan menelusuri bagaimana KPPPA maupun lembaga dan dinas-dinas terkait menghimpun data atau mengelola himpunan data menjadi data terpilah perempuan penyandang disabilitas, dan memberikan layanan publik kepada warga perempuan penyandang disabilitas.

Lembaga yudikatif atau lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung merupakan pelaksana layanan peradilan. Namun, untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, ada bagian yang juga menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga lainnya.

Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan dan pengelolaan penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk di dalamnya kebijakan penganggaran, penerbitan regulasi pendukung, serta kontrol dan harmonisasi atas regulasi terkait. Demikian pula, BAPPENAS mempunyai peran penting dalam harmonisasi perencanaan agar sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan dan memonitor implementasinya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, dimana menyebutkan Penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bertujuan untuk:

- a. memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
- b. memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai.

Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Penerima manfaat penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditujukan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada:

- a. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B;
- d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C;
- e. Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa; dan
- f. Perguruan Tinggi.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum

Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak secara bertahap kepada seluruh Satuan Pendidikan dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pemutakhiran data pada sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai kebutuhannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

G. Partisipasi Politik Penyandang disabilitas bukan sekadar Hak Memilih

Partisipasi politik penyandang disabilitas selama ini dicermati hanya pada aspek kepemiluan saja. Hal ini merupakan penyempitan makna partisipasi politik penyandang disabilitas yang bisa menjangkau segala aspek relasi kekuasaan, bukan hanya di ranah kontestasi elektoral. Beberapa arena politik lainnya adalah di ranah pergerakan penyandang disabilitas di mana organisasi disabilitas melakukan kerja pemberdayaan

warga penyandang disabilitas, advokasi penyandang disabilitas dan perubahan kebijakan publik, dan pertarungan gagasan dalam pergulatan wacana (diskursus). Partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, yakni pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Selain itu pada Pasal 29 (UU NO. 19/2011) disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih setara dengan orang lain. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dengan disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih dan kandidat yang dipilih. Sementara pengertian “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas (2019), jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 orang. Terdiri dari disabilitas fisik (7%, 83,1 ribu pemilih), disabilitas netra (13%, 166,3 ribu), disabilitas rungu/wicara (20%, 249,5 ribu), disabilitas intelektual (27%, 332,7 ribu) dan disabilitas lainnya sebanyak (33%, 415,9 ribu). Angka ini masih sangat rendah.

Rendahnya partisipasi politik ini disebabkan oleh masih lazim ditemui hambatan oleh penyandang disabilitas dalam menyuarkan hak-hak politiknya. Mulai dari hambatan struktural (kebijakan yang melemahkan seperti persyaratan sehat jasmani dan rohani), hambatan yang disebabkan oleh teknologi pendataan, kampanye maupun pencoblosan masih minimalis, serta masih kuatnya pemikiran dan perlakuan stigmatik bukan hanya di sejumlah kalangan keluarga penyandang disabilitas namun juga di tengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pemilu hingga saat ini, memang ada sejumlah perubahan yang baik dalam upaya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas. Misalnya pihak KPU telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses seleksi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Badan Ad Hoc KPU seperti PPK, PPS, dan KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU 36/2018 Pasal 36 ayat (5): Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, seperti diatur pada PKPU 20/2018 Pasal 7 ayat (2) dan (3), KPU tidak membatasi penyandang disabilitas sebagai Caleg maupun Calon Kepala Daerah. Juga KPU menyatakan bahwa Penyandang disabilitas tidak termasuk orang yang memiliki gangguan kesehatan yang dapat menggugurkan calon.

Pada PKPU 3/2017 Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Hingga saat ini, selain melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas sejak 2014, KPU juga melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih mengenai pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. KPU juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok strategis dalam Relawan Demokrasi, selain: pemilih pemula, pemilih muda, kelompok perempuan, netizen, kelompok keagamaan, kelompok marjinal, dll.

2.4 Potensi Daerah Dalam Upaya Penghormatan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Setelah adanya UU Penyandang Disabilitas, kerja panjang negara adalah menurunkan norma hak asasi yang tercantum dalam CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam aturan yang lebih teknis, penegakan aturannya, penerjemahan ke dalam strategi dan program pembangunan, hingga akhirnya kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hadir secara nyata dan dirasakan oleh warga penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu. Selain menyusun pedoman pemenuhan Hak-Hak Disabilitas melalui peraturan pemerintah dan turunannya seperti Peraturan Presiden, pada saat yang sama, diperlukan upaya sistematis untuk rencana aksi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan Hak-Hak Disabilitas secara berkelanjutan.

Diskursus inklusi-disabilitas semakin hari semakin kuat dirasakan kehadirannya dalam ruang publik. Perhatian kelompok-kelompok penyandang disabilitas menyuarakan hak dan kepentingan politiknya terus menggema dan memberi efek kepengikutan ke sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan aparat pemerintah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai proses kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan berkembang perlahan-lahan, mulai dari tahapan paling awal partisipatif yang pasif sampai menjadi masyarakat penyandang disabilitas yang aktif. Perubahan ini digerakkan melalui beragam individu maupun kelompok-kelompok terorganisir baik di tingkat desa sampai organisasi penyandang disabilitas yang lebih kompleks baik organisasi dengan struktur tunggal maupun berjenjang—dengan kepengurusan pusat sampai daerah.

Jika menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya dalam konteks melawan pikiran dan perlakuan stigmatik, maka upaya kelompok-kelompok penyandang disabilitas terorganisir ini merupakan upaya destigmatisasi yang mencakup kerja delabelisasi, destereotifikasi, desegregasi, dan dediskriminasi. Saat ini kita sudah mengenal perspektif benar terkait disabilitas yang membawa sejumlah perubahan mulai dari peristilahan sampai pada pengaturan melalui kebijakan publik dan program-program pembangunan yang semakin inklusif. Walaupun belum dapat dikatakan berlaku secara

ideal dan luas, arah perubahan itu semakin dapat diprediksi sebagaimana yang diimajinasikan oleh masyarakat penyandang disabilitas, yakni menuju masyarakat Bengkulu inklusif.

Walaupun belum bisa dikatakan sepenuhnya massif, tapi perubahan-perubahan sosial ini sungguh menggembirakan. Pekerjaan mengubah perspektif, perilaku dan perlakuan stigmatik terhadap penyandang disabilitas yang masih terjadi tetap menyisakan tugas kemanusiaan untuk diselesaikan. Masih banyak aspek belum tersentuh dan keluhan atau protes penyandang disabilitas tetap harus disuarakan.

Penyandang Disabilitas mampu berperan secara formal, jika diberikan kesempatan dengan memperhatikan:

- a. Akses Informasi Bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Ragam Dan Potensi Kelebihan Disabilitas;
- c. Layanan Yang Aksesibel Kepada Penyandang Disabilitas ;
- d. Klasifikasi Jabatan Pekerjaan Yang Potensial Bagi Penyandang Disabilitas; Dan
- e. Dukungan Alat Bantu/Alat Bantu Kerja Penyandang Disabilitas Yang Memadai.

DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu telah melakukan Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Bengkulu Nomor: 066/HK.02.03/2023 dan Nomor: 04/PPUD-BKL/02/2023 Tanggal 16-3-2023 Tentang Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman bertujuan untuk sebagai pedoman pelaksanaan kerja pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) Bengkulu telah melakukan Perjanjian Kersama Dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Nomor: 428/UN30.9/KS/2022 dan Nomor: 44/EIs-MMI/X/2022 Tanggal 30-9-2022 Tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Maksud dan tujuan kerjasama adalah sebagai landasan para pihak untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dan terwujudnya sinergitas para pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Provinsi Bengkulu telah memiliki 15 (lima belas) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022				
No	Nama LKS	Alamat	Tlp/Hp	Penanggung jawab
1	DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bengkulu	Jalan Indragiri 12 Padang Harapan	85268031832	Liana Lestari
2	Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif	Jalan Airmusi No 494 Rt 43 Perum Betungan Asri Kota Bengkulu	0813-7384-5688	Irna Riza Yulastuty
3	DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas		0823-7796-8555	Takrim Nusarto
4	YPAC Bengkulu	Jalan Kampar 2 No. 11 C Padang Harapan Kota Bengkulu	Sri : 0811-7317-475 / Erni : 0813-6895-5703	Sri Hartika / Erni Vransiska
5	DPD Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Runggu Indonesia (Gerkatun) Bengkulu		0896-3304-4498	Boyke Ansari
6	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)Bengkulu		0812-7816-1587	Ikhsan
7	DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bengkulu		syaaf : 0813-1762-0974 / Dodi : 0852-5457-3707	Sya'af / Dodi Ahmad
8	Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK PPD)		0898-5478-736	Nety Suprihatin
9	Difabelpreuner Center (DCM)	Jalan Indragiri 12 Padang Harapan	0898-3670-647	Arifah Azzahra
10	Koperasi Disabilitas Indonesia (KDI)		0821-8094-2220	Dedi Syahputra
11	Forum Pemantauan Hak Disabilitas Indonesia (FORMASI) Wilayah Bengkulu	Jalan Indragiri 12 Padang Harapan	0852-6853-6806	Rahmat Istari
12	YDBKS Orkes Bina Netra	Pasar melintang	0813-7322-9961	Wirda, S.Pd
13	YDBKS Amal mulia	Pasar melintang	0811-7377657	Hj. Hetty Hartaty, M.Pd

14	Pijar Qalisya	Jl.Enggang No 23 Lingkar barat	0853-79736656	Ita
15	LKS Sehati	Manna BS	0822-7986-9991 (mira)	Evan

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 4/4HK.01/I/2022 Tanggal 06 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 yang bertugas :

1. Melaksanakan pendampingan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);
2. Melakukan respon kasus dan manajemen kasus secara komprehensif;
3. Melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Membantu mengkaseskan pemerlu pelayanan kesejahteraan social kepada layanan yang terintegrasi; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pemerlu pelayanan kesejahteraan social di wilayahnya.

Tabel 2. 24
Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

LOKASI TUGAS		NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM
PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
BENGKULU	SELUMA	MARDIANSYAH	SMK	RELAWAN	850.000
BENGKULU	SELUMA	MUH IQBAL SH	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	SELUMA	WIWIN JULITA	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	BENGKULU SELATAN	NANDA PUSPITA SARI S Sos	SARJANA	PEKERJA SOSIAL	3.000.000
BENGKULU	KEPAHIANG	SITI ROMLAH S Sos	SARJANA	PEKERJA SOSIAL	3.000.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	SUHERMAN S Sos	SARJANA	PEKERJA SOSIAL	3.000.000
BENGKULU	LEBONG	OKTRIS EWIKA S Sos	SARJANA	PEKERJA SOSIAL	3.000.000
BENGKULU	REJANG LEBONG	AGUS SABRI ABNUR S Sos	SARJANA	PEKERJA SOSIAL	3.000.000
BENGKULU	BENGKULU UTARA	AULIA HAFIDAH	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	BENGKULU UTARA	MS FIRMAN	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	BENGKULU UTARA	PUSPITA SARI	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	BENGKULU UTARA	SUHENI INDARTI	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	BENGKULU UTARA	IRAWAN OKMAN S KEP NERS	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KEPAHIANG	DEBY DWI SAPUTRA	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KEPAHIANG	DINA MEIYANI	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KEPAHIANG	JARNELIS ARIYANTO	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KEPAHIANG	LUSIANA SUSANTI	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	DEDE SYAHPUTRA	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	MERRY SILVIANA	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	NELLYWATI	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	SAADUDDIN ALFAN SHARI	SARJANA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	KOTA BENGKULU	NURZIAH	SMA	RELAWAN	850.000
BENGKULU	REJANG LEBONG	MUSLIM	SMK	RELAWAN	850.000
BENGKULU	SELUMA	ICHSAN HADI	DIPLOMA	RELAWAN	850.000

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 4/4HK.01/I/2022 Tanggal 06 Januari 2022

BAB III

SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI

Pembangunan inklusif disabilitas berarti memastikan bahwa semua fase siklus pembangunan (desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi) mencakup dimensi disabilitas dan bahwa penyandang disabilitas berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam proses dan kebijakan pembangunan.

Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan *twin-track*:

1. Kegiatan pengarusutamaan disabilitas di seluruh program.
2. Kegiatan yang mentargetkan PwD untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak.

Prinsip-prinsip:

1. Aksesibilitas
2. Partisipasi
3. Anti-Diskriminatif

Disabilitas merupakan isu multisektor, tidak hanya terikat pada sektor sosial saja. Isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sector baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggungjawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
3. Menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah.

3.2. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

Penyusunan RAD-PD Provinsi mengacu dari apa yang telah tertuang dalam RIPD dan RAN PD. Di dalam RAN PD terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
Sasaran Strategis 1 : Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	a. Kebijakan I. Pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor b. Kebijakan II. Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas
Sasaran Strategis 2 : Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Kebijakan I. Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas b. Kebijakan II. Akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas c. Kebijakan III. Penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas d. Kebijakan IV. Penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas
Sasaran Strategis 3 : Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Kebijakan I. Menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi
Sasaran Strategis 4 : Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	b. Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat
Sasaran Strategis 5 : Pewujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	a. Kebijakan I. Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor b. Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas b. Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas c. Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas d. Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga
Sasaran Strategis 7	a. Kebijakan I. Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas b. Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif c. Kebijakan III. Perluasan kesepertaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi penyandang disabilitas d. Kebijakan IV. Penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau penyandang disabilitas

3.3. Strategi Implementasi RAD-PD

Strategi implementasi untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis telah ditentukan di dalam RAN PD dan akan diadopsi di dalam RAD PD Provinsi. Strategi implementasi tersebut perlu diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan situasi di daerah yang bersangkutan. Strategi implementasi RAD-PD Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Implementasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

SasaranStrategis/Kebijakan	Strategi Implementasi
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor	1. Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.
Kebijakan II. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran. 2. Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada 3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	1. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah. 2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas 3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas
Kebijakan II. Akses Permukiman yang	1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang

SasaranStrategis/Kebijakan	Strategi Implementasi
Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas	<p>disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.</p> <p>2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.</p>
Kebijakan III. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas	<p>1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.</p> <p>2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.</p>
Kebijakan IV. Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas	<p>1. Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi</p>
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi	<p>1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.</p> <p>2. Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik</p>
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat	<p>1. Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.</p>
Sasaran Strategis 5. Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor	<p>1. Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor</p>
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	<p>1. Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.</p> <p>2. Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas</p> <p>3. Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas</p> <p>4. Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas</p> <p>5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas</p>
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga	<p>1. Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini,</p>

SasaranStrategis/Kebijakan	Strategi Implementasi
pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas 2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas	1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal. 2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel non diskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan 3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik- Integratif 2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan. 3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/ atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	1. Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas	1. Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan. 2. Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya). 3. Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas	1. Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional 2. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas	1. Mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS

3.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Penyediaan Profil Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Data Penyandang Disabilitas Se Provinsi Bengkulu dalam bentuk Buku Agregat Kependudukan)	2 Dokumen	75,520,000	2 Dokumen	50,000,000	Dukcapil
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pendataan Penduduk Permanen dan Rentan 1 . Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas (Melakukan Pendataan dan menyusun laporan Penduduk Rentan misal Orang Dalam Gangguan Jiwa)	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Dukcapil
					Koordinasi Berkala antar lembaga Pemerintah dan 2 . Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas (Melakukan pendataan kepemilikan adminduk dan fasilitasi bagi yang belum memiliki Dokumen adminduk)	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	Dukcapil
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						DP3APP KB
					Pelebagaan PUG						
					1 Pengumpulan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas , dengan kegiatan pendataan	2 dokumen	25,000,000	50 buku	250,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan berkoordinasi dengan lembaga terkait pelaksanaan PUG dan PPRG	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	
					3 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG Kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan mendampingi lembaga untuk pelaksanaan PUG dan PPRG	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	
					4 Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG Kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan melaksanakan kegiatan sosialisasi PUG dan PPRG	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Dinsos
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti						
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					bagi Penyandang Disabilitas						
					Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA						
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.		Disabilitas oleh perangkat daerah.	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
					koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (hanya pemenuhan SPM)	4 laporan	25,000,000	4 laporan	65,000,000	
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	480,000,000	2 Dokumen	480,000,000	BPKD
					2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	220,000,000	BPKD
					3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	685,000,000	2 Dokumen	685,000,000	BPKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah				dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
					4 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	315,000,000	2 Dokumen	350,000,000	BPKD
					5 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	BPKD
					6 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	BPKD
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tidak Spesifik Disabilitas	20 Dokumen	450,000,000	20 Dokumen	450,000,000	BPKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						
					2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	10 Dokumen	120,000,000	10 Dokumen	120,000,000	BPKD
					3 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	4 Dokumen	220,000,000	4 Dokumen	250,000,000	BPKD
2	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh pemerintah daerah	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh pemerintah daerah	seluruh pemerintah daerah melampirkan pernyataan anggaran disabilitas dalam dokumen	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						DPMD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah			perencanaan dan penganggaran setiap tahun							
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (penyediaan bantuan langsung tunai pada dana desa)	1 Dokumen	50,000,000		-	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						BPSDM
					Pengembangan Kompetensi Teknis						
					1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	- Tidak Spesifik Disabilitas - ASN Disabilitas dengan kategori cacat fisik yang masih mampu melaksanakan aktivitas secara	90 ASN	450,000,000	30 ASN	200,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	mandiri/tidak membutuhkan alat bantu khusus					
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
					1 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	- Tidak Spesifik Disabilitas - ASN Disabilitas dengan kategori cacat fisik yang masih mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri/tidak membutuhkan alat bantu khusus	7 Laporan	1,000,000,000	2 Laporan	200,000,000	
					2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	- Tidak Spesifik Disabilitas - ASN Disabilitas dengan kategori cacat fisik yang masih mampu melaksanakan	400 ASN	5,844,044,000	300 ASN	4,700,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kepemimpinan, dan Prajabatan	aktivitas secara mandiri/tidak membutuhkan alat bantu khusus					
					3 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- Tidak Spesifik Disabilitas - ASN Disabilitas dengan kategori cacat fisik yang masih mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri/tidak membutuhkan alat bantu khusus	-	-	60 ASN	300,000,000	
					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Tidak Spesifik Disabilitas					Badan Kepegawa

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					DAERAH PROVINSI						Dinas Daerah
					Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Data ASN yang mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis dan pelatihan, ujian dinas dan peningkatan basis pendidikan tidak membedakan ASN penyandang disabilitas)	1 dok	40,000,000		50,000,000	
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						BPBD
					Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						
					1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan bagi ASN agar dapat melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota)	-	-	40 Orang	100,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2	"- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis Provinsi dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas; - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kawasan Gedung dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas.	Terselenggaranya Peningkatan kualitas dan kuantitas Bangunan gedung strategis provinsi dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas	Penyusunan perencanaan Peningkatan kualitas dan kuantitas Bangunan gedung strategis provinsi dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas .	Tersedianya Perencanaan Peningkatan kualitas dan kuantitas Bangunan gedung strategis provinsi dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas .	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		0,57 Persen	26,769,880,000		14,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		2 Unit	26,769,880,000	-	14,000,000,000	
					1 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung memperhatikan sensitivitas disabilitas (Ramp untuk Pengguna Kursi Roda,ubin pemandu(guiding Block) Lift Prioritas,Toilet Khusus Difabel)	1 Unit	26,769,880,000	2 Bangunan Gedung	14,000,000,000	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		0,045 Persen	15,940,000,000			

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		1 Unit	15,940,000,000			
			1 Penataan Bangunan dan Lingkungan		Penataan Bangunan memperhatikan sensitivitas disabilitas(Ramp untuk Pengguna Kursi Roda,Area Parkir Khusus Disabilitas,Lift Prioritas,Toilet Khusus Difabel)	2 Kawasan/ Gedung	15,940,000,000	-	250,000,000.00		
3	• Membangun/meningkatkan jalan untuk konektivitas antar provinsi antar kabupaten ; · Membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dan jembatan provinsi;	Terselenggaranya pembangunan/peningkatan jalan dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas	Penyusunan perencanaan Pembangunan/Peningkatan jalan dengan memperhatikan sensitivitas disabilitas .	Tersedianya Perencanaan Pembangunan/Peningkatan jalandengan memperhatikan sensitivitas disabilitas .	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		50,34 Persen	120,935,722,000			
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi		15 KM	120,935,722,000			
					1 Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan memperhatikan sentivitas disabilatas(trotoar dibuat landai dan pegangan dan rambu jalan ramah disabilitas)	0,8 Km	90,314,240,000	2.8 KM	5,000,000,000.00	
					2 Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan Memperhatikan	52 Km	30,621,482,000	10.57 KM	25,000,000,000.00	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						sentivitas disabilatas(trotoar dibuat landai, jalan rata tidak bergelombang dan ada pegangan ditrotoar)					
4	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	120 Unit	1,160,000,000	1 kegiatan	1,100,000,000	BPKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Program Rehabilitasi Sosial						Dinsos
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti						
					Penyediaan asrama yang mudah diakses	Spesifik Disabilitas	1 gedung	55,000,000	1 gedung	25,000,000	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi						
					fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Spesifik Disabilitas	128 unit	196,850,000	150 unit	187,000,000	
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak Spesifik Disabilitas					DPK

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas			penyandang disabilitas							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembelian peralatan untuk layanan disabilitas)	5 Paket	Rp 90,000,000	5 Paket	Rp 190,000,000	
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas (Bimtek tenaga pustakawan tentang layanan disabilitas)	5 Orang	Rp 15,000,000	5 Orang	Rp 15,000,000	
					2 Pengembangan Layanan Perpustakaan	Tidak Spesifik Disabilitas	5 Kali	Rp 15,000,000	5 Kali	Rp 15,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	(Penyediaan layanan disabilitas)					
					3 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tidak Spesifik Disabilitas (pembelian bahan pustaka untuk disabilitas)	25 Buku	Rp 20,000,000	25 Buku	Rp 20,000,000	
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraa n pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraa n pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
					Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Tidak Spesifik Disabilitas	45,000,000				KPU
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum		Kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang melibatkan seluruh stakeholder/instansi terkait termasuk lembaga yang menaungi disabilitas					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas							
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum							
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						DP3APP KB
					Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatern						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					kewenangan provinsi						
					1 Sosialisasi Partisipasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , ekomoni dan budaya kewenagan provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pertemuan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bdangb politik, hukum,sosail dan ekonomi kewenagnag provinsi	2 dokumen	220,000,000	5 dokumen	300,000,000	
					2 Advokasi kebijakan dan pendampingan peningktan Partisipasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , ekomoni dan budaya kewenagan provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pertemuan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bdangb politik, hukum,sosail dan ekonomi kewenagnag provinsi	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	40,000,000	
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan rehabilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Spesifik Disabilitas	-	-			Dinsos
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Spesifik Disabilitas	-	-			
					1 Penyediaan Permakanan	Spesifik Disabilitas	-	-	37 orang	20,000,000	
					2 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					5 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	
					8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	Spesifik Disabilitas	-	-	-	-	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						
					9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Spesifik Disabilitas	-	-	-		-
					10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Spesifik Disabilitas	-	-	-		-
					11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Spesifik Disabilitas	-	-	-		-
					12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Spesifik Disabilitas	-	-	-		-
2	Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi	Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.		Terselenggaranya layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat,	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tidak Spesifik Disabilitas					BPBD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	berbasis masyarakat.			termasuk penyelenggaraan penyediaan peralatan.							
					Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan bahan sandang dan pangan bantuan bencana)	50 Orang	845,000,000	10 Orang	75,000,000	
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Membentuk Desa / Kelurahan / Sekolah tanggap bencana, Melakukan kajian risiko bencana, Melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, Melakukan penyusunan rencana kontijensi, Pembentukan	1 Kawasan	25,000,000	-	-	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						forum, Pembentukan dan pelatihan relawan, Melakukan Sosialisasi dan Pemasangan Rambu & Jalur Evakuasi, Gladi ruang)					
					Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas	25 Keluarga	25,000,000	35 Keluarga	100,000,000	
					Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengenalan risiko bencana berbasis keluarga, Pengenalan rumah aman bencana, Rencana siaga keluarga, Rencana evakuasi keluarga)					
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif											
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											
1	Mendorong partisipasi Perusahaan untuk mendukung	Terserapnya pencari kerja penyandang disabilitas dalam pasar kerja dunia industri/ perusahaan.	Melakukan Monitoring dan pendataan lowongan kerja bagi pencari kerja disabilitas yang ada di perusahaan.	Terkumpulnya data perusahaan yang membuka Kesempatn kerja bagi pencari kerja disabilitas.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
	penyandang disabilitas.											
				Terpenuhinya sejumlah perusahaan yang menerima pekerja penyandang disabilitas.	Kegiatan Job Fair							
					Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Kali	100,000,000	1 Kali	120,000,000	DISNAK ERTRANS	
2	Memastikan penyedia Akompdasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang layak bagi pencaker Penyandang Disabilitas pada Perusahaan/BU MN/BUMD di lingkungan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Undang-undang No.08 Tahun 2016.	Tersediannya standar penyedia Akompdasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang layak bagi pencaker Penyandang Disabilitas pada Perusahaan/BUMN/BUMD di lingkungan Provinsi Bengkulu	Pelaksanaan Akomodasi dan Fasilitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan Standar yang sudah diatur dalam peraturan Ketenagakerjaan tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).	Telah tersediannya standar penyedia Akompdasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang layak bagi pencaker Penyandang Disabilitas pada Perusahaan/BUM N/BUMD di lingkungan Provinsi Bengkulu	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Spesifik Disabilitas						
			Terbentuk dan Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan Undang-undang No.08 Tahun 2016 sebagai Unit Pelayanan Disabilitas khusus bagi Pencari Kerja atau penempatan kerja.	Pelaksanaan Akomodasi dan Fasilitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan Standar yang sudah diatur dalam peraturan Ketenagakerjaan tentang Pembentukan	Terselenggaranya dan terealisasinya informasi pasar kerja dan koneksivitas bagi penyandang disabilitas diperusahaan.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota	Spesifik Disabilitas					
					Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Spesifik Disabilitas	-	-	1 Kali	100,000,000	DISNAK ERTRANS	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			Unit Layanan Disabilitas (ULD).								
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tidak Spesifik Disabilitas					Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Tidak Spesifik Disabilitas	11 Orang	100,692,250	11 Orang	100,692,250	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pendidikan Khusus						
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						DP3APP KB
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah ,Non Pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi						
					1 Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pelatihan kemandirian bagi ABK dan ABH	1 dokumen	Rp20,000,000	2 dokumen	Rp150,000,000	
					2 Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan melaksanakan pelatihan Pemenuhan nHak Anak berbasisi Konvensi hak Anak bagi SDM Pelaksana Layanan	1 dokumen	Rp. 28.784.600	3 dokumen	Rp. 100.000.000	
					3 Koordinasi Dan sinkronisasi Penguatan	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pertemuan	5 dokumen	Rp. 20.000.000	4 dokumen	Rp. 200.000.000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	penguatan Forum Komunikasi Pendampingan ABH dan ABK					
					4 Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan persemuan sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap aanak	3 dokumen	Rp. 57.850.000	3 dokumen	Rp. 100.000.000	
2	Menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Fasilitas Belajar mengajar yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah bagi peserta didik	Sarana Prasana dan Utlitas Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Pengelolaan Pendidikan Khusus						
					Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Ruang	1,073,263,000	0	0	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	4 Ruang	425,040,000	0	0	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	6 Ruang	667,920,000	0	0	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	6 Ruang	905,520,000	0	0	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Paket	175,984,000	0	0	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Sekolah	250,000,000	0	0	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	4 Lomba	150,000,000	0	0	
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga, dan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Tidak Spesifik Disabilitas					DISPORA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.							
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Singel Event Tingkat Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas Mengadakan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) yang diselenggarakan 2 tahun sekali					
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	2 Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Dalam Multi Event dan Singel Event	Tidak Spesifik Disabilitas Mengirimkan Atlet Pelajar Disabilitas mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) yang		1.435.820.000			

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						diselenggarakan 2 tahun sekali					
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	3 Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraaan Olahraga	Tidak Spesifik Disabilitas Mempasilitasi Altlet Disabilitas mengikuti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) yang diselenggarakan 4 tahun sekali				1.000.000.000,-	
					4 Penyelenggaraan Kejuaraan Oahraga Multi Event dan Singel Event Tingkat Provinsi	Bekerjasama dengan NPC (Nacional Paralimpic Comite) dan SLB (Sekolah Luar Biasa) dalam kegiatan Pekan Olahraga disabilitas dan dalam rangka mencari dan membina bibit olahragawan disabilias					
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan	Tersusunnya pedoman pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas - Fasilitasi untuk Layanan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	Tidak Spesifik Disabilitas	33,589,600,000	100% Penyandang Disabilitas	37,555,600,000	DINKES PROVINSI
					2 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas - Upaya Konseling Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas	Tidak Spesifik Disabilitas	50,000,000	75% Disabilitas Kongenital	50,000,000	DINKES PROVINSI
					1 Melakukan pemasangan kode jalur khusus (guiding block)	Spesifik Disabilitas			70 meter	Rp 43,750,000	RSUD M Yunus Bengkulu

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					bagi penyandang disabilitas						
					2 menyediakan bungkus/cover kode tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas (<i>sheet priority</i>)	Spesifik Disabilitas			40 cover	Rp 20,000,000	
					3 Membuat rambu-rambu layanan disabilitas	Spesifik Disabilitas			5 rambu	Rp 5,000,000	
					4 Merehap toilet menjadi toilet khusus penyandang disabilitas (4 toilet)	Spesifik Disabilitas			4 toilet	Rp 200,000,000	
					5 Menyediakan alat bantu tuna netra (huruf braile)	Spesifik Disabilitas			3 set	Rp 15,000,000	
					6 Menyediakan alat bantu tuna rungu/hearing aid 10 unit	Spesifik Disabilitas			10 unit	Rp 20,000,000	
					7 Menyediakan kursi roda	Spesifik Disabilitas	1 dokumen	50.000.000,-			
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			fasilitas pelayanan kesehatan	Penyandang Disabilitas	DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas - Koordinasi / Pengelolaan Data Disabilitas Bersama Lintas Sektor Terkait dan Penyandang Disabilitas	Tidak Spesifik Disabilitas	60,000,000	100% OPD Terkait dan Perwakilan Disabilitas	50,000,000	DINKES PROVINSI
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	adanya ruang tunggu dan rest room yang dapat dikhususkan bagi penyandang disabilitas	Tidak Spesifik Disabilitas	515,000,000	100% Fasilitas Kesehatan Pemerintah	50,000,000	DINKES PROVINSI
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pemahaman terhadap Hak Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Rohani bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Sosialisasi, Kampanye, Serta Pendidikan dan Pelatihan tentang Hak Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas	Sosialisasi, Kampanye, Serta Pendidikan dan Pelatihan tentang Hak Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya Sosialisasi, Kampanye, Serta Pendidikan dan Pelatihan tentang Hak Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas	KONTRIBUSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan Pasien Terlantar	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	23,900,000	1 Dokumen	30,000,000	RSKJ
					1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan Pasien Terlantar (Ruang Rawat Inap Kelas III)	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi Tentang Hak Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Rohani yang diberikan Oleh					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan Pasien Terlantar (Ruang IPC)	Tim Kesehatan RSKJ dan Kemenag Provinsi Bengkulu					
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						DP3APP KB
					Memaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ptovinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk						
					1 Penyerasiaan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu terhadap kependududkan , keluarga Berencana dan Pembangunana Keluarga (KKBPK)	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pembinaan bagi tim pendamping keluarga dan OPD terkait serta perwakilan Organisasi profesi (sheholder) terkait	3 dokumen	Rp. 122.000.000	3 dokumen	Rp. 300.000.000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pembinaan Peningkatan akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Tidak Spesifik Disabilitas dengan kegiatan pemantauan monitoring pelaksanaan dalam rangka pencapaian Bangga Kencana	2 dokumen	Rp. 20.000.000	2 dokumen	Rp. 200.000.000	

Tabel 3.4

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
					1 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifikasi Disabilitas (tercatat penyandang disabilitas Kabupaten)	–	–	1 Dokumen	Rp 87,000,000	DUKCAPIL
		Tersedianya data pilah nasional tahunan penyandang disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk penyandang disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk penyandang disabilitas di daerah.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Data Fakir Miskin termasuk Disabilitas)	200 Orang	Rp 80,600,000	1 Laporan	Rp 80,000,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah penyandang disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
					Kegiatan: Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis						
					1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar serta gelandangan pengemis	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas)	12 Laporan	Rp 120,000,000	12 Laporan	Rp 70,000,000	Dinas Sosial
					2 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	1 Laporan	–	1 Laporan	Rp 50,000,000	Dinas Sosial
					3 Pemberian Layanan Rujukan	Spesifikasi Disabilitas (adanya layanan Rujukan Disabilitas mental ke RSJ dan Disabilitas	1 Laporan	–	1 Laporan	Rp 50,000,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Fisik usulan alat bantu)					
					4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat kruk, tongkat piramid, manula walker, alat bantu dengar, segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)	1 Laporan	—	1 Laporan	Rp 30,000,000	Dinas Sosial
Kebijakan 2: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Peraturan Daerah/Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Perda/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
					Pembentukan Peraturan Daerah DAN Peraturan DPRD						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Raperda yang sudah disahkan menjadi PERDA salah satunya Perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (inisatif))	8 Dokumen	Rp 1,990,899,000	–	–	Sekretariat DPRD
2	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	1 Dokumen	Rp 93,801,000	1 Dokumen	Rp 85,000,000	BAPPPEDA
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Penyusunan modul/ kurikulum dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
					1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya kurikulum dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil)	1 Dokumen	Rp 35,554,000	1 Dokumen	Rp 40,554,000	BKDSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Pegawai disabilitas yang pensiun)	90 Orang	Rp 27,804,000	90 Orang	Rp 30,000,000	BKDSDM
				Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajarial dan Fungsional						
					1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepempinan, dan Prajabatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Disabilitas)	1 Laporan	Rp 1,509,658,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	BKDSDM
2	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Pengarusutamaan prinsip non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah.	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip non diskrimintaif terhadap penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
					Kegiatan ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN						
					1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Mengumpulkan data, Menyusun dan menetapkan SPM	11 Dokumen	Rp 1,834,780,000	8 Dokumen	Rp 2,033,501,500	BAG. PEMERINTAHAN

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						untuk menjamin hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat termasuk disabilitas)					
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan peralatan penanggulangan bencana untuk disabilitas)	10 Unit	Rp 11,893,400	–	–	BPBD
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		penyangang disabilitas.		(PermenPANRB No. 17 Tahun 2017).							
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						
					1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tidak Speseifikasi Disabilitas (Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyangang disabilitas)	14 Kegiatan	Rp 716,850,000	14 Kegiatan	Rp 716,850,000	Inspektorat
Kebijakan 2: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyangang Disabilitas											
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyangang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyangang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyangang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyangang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyangang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Tidak Spesifik disabilitas (Adanya penyediaan permukiman yang	1 Dokumen	Rp 195,000,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	DPUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	layak dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas)						
					2 Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tidak spesifik disabilitas (Adanya sarana dan prasarana dan Infrastruktur dasar)	350 Rumah Tangga	Rp 3,346,151,200	–	–	DPUPR	
					3 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di permukiman penyandang disabilitas)	–	–	100 Rumah tangga	Rp 1,000,000,000	DPUPR	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung							
					1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Pembangunan, pemanfaatan bangunan untuk penyandang disabilitas	9 Dokumen	Rp 3,680,052,700	–	–	DPUPR	
					2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan dan pemanfaatan, pelestarian, ramah lingkungan	–	–	1 Dokumen	Rp 1,000,000,000	DPUPR	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						penyandang disabilitas)					
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
					KEGIATAN Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
					1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya penyediaan PSU disabilitas)	4 Dokumen	Rp 573,697,400	10 Dokumen	Rp 285,000,000	DPUPR
					2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk mendukung Fungsi Hunian Penyandang Disabilitas)	11 Dokumen	Rp 2,600,000,000	5 Lokasi	Rp 2,500,000,000	DPUPR
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan air minum)	–	–	3 Dokumen	Rp 400,000,000	DPUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Membantu dan mempermudah penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Air minum yang layak)	–	–	5 Liter/Detik	Rp 1,200,000,000	DPUPR
Kebijakan 3: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
					1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal/ TATRALOK ikut mempertimbangkan penyandang disabilitas)	–	–	1 Dokumen	Rp 600,000,000	Dinas Perhubungan
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta.	kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.							
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
					1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (Dalam proses rehabilitasi dan pemeliharaan turut mempertimbangkan rehabilitasi yang mendukung pengguna penyandang disabilitas)	1 Kegiatan	Rp 200,000,000	50 Unit	Rp 100,000,000	Dinas Perhubungan
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
					1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi	-	-	5 Orang	Rp 75,000,000	Dinas Perhubungan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal/ TATRALOK ikut mempertimbangkan penyandang disabilitas)					
Kebijakan 4: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					Kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					1 Monotoring opini dan aspiraasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Opini dan aspirasi publik terhadap penyandang disabilitas)	-	-	15 dokumen	Rp 25,000,000	Dinaskominfo
					2 Pengelolaan media dan komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan media dan komunikasi publik terhadap kebutuhan penyandang disabilitas)	-	-	1 dokumen	Rp 100,000,000	Dinaskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					3 Pelayanan informasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Tahun 2023 akan menyelenggarakan Sosialisasi yang 20% pesertanya adalah Penyandang disabilitas)	1 dokumen	Rp 115,420,000	12 dokumen	Rp 125,000,000	Dinaskominfo
					4 Layanan hubungan media	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas)	45 layanan	Rp 437,880,000	53 layanan	Rp 446,280,000	Dinaskominfo
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					1 Penyediaan /pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Menyediakan sarana dan prasaranan pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi yang	-	-	10 unit	Rp 75,000,000	Diskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						ramah penyandang disabilitas)					
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					1 Pelayanan informasi publik	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Tahun 2024 akan menyelenggarakan Sosialisasi yang 20% pesertanya adalah Penyandang disabilitas)	1 Dokumen	Rp 115,420,000	12 dokumen	Rp 125,000,000	Diskominfo
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					Kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					1 Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Melaksanakan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas)	-	-	28 orang	Rp 484,000,000	Diskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						
					1 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar serta gelandangan pengemis	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas)	634 Orang	Rp 70,200,000	634 Orang	Rp 70,000,000	Dinas Sosial
					2 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	100 Orang	-	100 Orang	Rp 50,000,000	Dinas Sosial
					3 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas (Adanya bantuan pakaian, perlengkapan lainnya)	10 Orang	-	10 Orang	Rp 50,000,000	Dinas Sosial
					4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti	20 Orang	-	20 Orang	Rp 30,000,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						kursi roda, tongkat kruk, tongkat piramid, manula walker, alat bantu dengar, segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)					
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan 1. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (Peserta akan melibatkan penyandang disabilitas)	–	–	30 Orang	Rp 50,000,000	DISPERINAKER
Kebijakan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi											
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai	Terbitnya Surat Menteri PANRB ke LAN tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	dari antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	bagian dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas							
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
					1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi . Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Penyusunan panduan dan pengembangan kompetensi termasuk penyandang disabilitas)	1 Laporan	Rp 1,509,658,000	–	–	BKDSDM
				Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Pengelolaan Promosi ASN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (memberikan kesempatan bagi ASN penyandang disabilitas)	1 Dokumen	Rp 120,350,000	1 Dokumen	Rp 150,000,000	BKDSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Terbitnya Permen PANRB Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (di dalamnya mengatur terkait formasi khusus Disabilitas).	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (memberikan kesempatan bagi ASN penyandang disabilitas)	–	–	1 Dokumen	Rp 50,000,000	BKDSDM
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
					1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Perencanaan Tenaga kerja Makro)	–	–	1 Dokumen	Rp 180,000,000	DISPERINAKER
3	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/ lembaga, pemerintah	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD	Tersedianya 2% formasi bagi penyandang disabilitas dari	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota.	alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing Dinas Pemda							
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Formasi Penyandang disabilitas)	–	–	1 Dokumen	Rp 50,000,000	BKDSDM
4	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
					Kegiatan : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
					1 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memfasilitasi pertemuan forum CSR untuk membahas penggunaan dana	2 laporan	Rp 112,251,000	2 laporan	Rp 151,500,000	BAG. PEREKONOMIAN

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						tanggungjawab, sosial dan lingkungan perusahaan bagi penyandang disabilitas)					
		Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas	Jumlah BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
					Kegiatan : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
					1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tidak spesifikasi Disabilitas (Memfasilitasi pertemuan forum CSR untuk membahas penggunaan dana tanggungjawab, sosial dan lingkungan perusahaan bagi penyandang disabilitas)	2 laporan	Rp 112,251,000	2 laporan	Rp 151,500,000	BAG. PEREKONOMIAN
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/ lembaga, Badan	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (di dalamnya memuat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	operasional ketenagakerjaan disabilitas	Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D).							
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan	Tidak spesifikasi Disabilitas (Memberikan kesempatan bagi CASN penyandang disabilitas)	–	–	1 Dokumen	Rp 50,000,000	BKDSDM
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	101 Satuan Pendidikan	Rp 33,210,000	101 Satuan Pendidikan	Rp 80,000,000	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	195 Orang	Rp 97,666,000	100 Orang	Rp 90,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	29 Satuan Pendidikan	Rp 17,355,000	29 Satuan Pendidikan	Rp 80,000,000	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	195 Orang	Rp 83,735,000	29 Orang	Rp 90,000,000	DIKBUD
					3 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (Inklusif terhadap disabilitas melalui Platform Merdeka Mengajar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas)	-	-	122 Orang	Rp 122,000,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	130 PAUD	Rp 11,315,000	126 Satuan Pendidikan	Rp 310,000,000	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	135 Orang	Rp 28,480,000	100 Orang	Rp 125,000,000	DIKBUD
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Penyusunan regulasi sekolah inklusif terhadap Disabilitas)	-	-	1 Dokumen	Rp 50,000,000	DIKBUD
Kebijakan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik,	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik,	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	dan tenaga pendidik.	bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.							
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	195 Orang	Rp 97,666,000	100 Orang	Rp 90,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	195 Orang	Rp 83,735,000	29 Orang	Rp 90,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	135 Orang	Rp 28,480,000	100 Orang	Rp 125,000,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	1). Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas.	Sekolah yang melaksanakan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pengembangan karir pendidik dan tenaga Kependidikan penyandang disabilitas)	22 Orang	Rp 28,480,000	125 Orang	Rp 125,000,000	DIKBUD
					2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Persiapan sekolah PAUD menjadi PAUD-HI penyandang disabilitas)	130 PAUD	Rp 11,315,000	126 PAUD	Rp 310,000,000	DIKBUD
Kebijakan 4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional	Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	seni dan olahraga.	Disabilitas di bidang seni dan olahraga.							
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota khusus untuk peserta/ siswa disabilitas)	217 Orang	Rp 123,450,000	375 Orang	Rp 250,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota khusus untuk peserta/ siswa disabilitas)	200 Orang	Rp 112,650,000	200 Orang	Rp 200,000,000	DIKBUD
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	–	–	100 Orang	Rp 100,000,000	Parpora

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memberikan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah Penyandang Disabilitas)	20589 Orang	Rp 17,556,800	20617 Orang	Rp 17,556,800	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	94437 orang	Rp 55,359,000	94854 Orang	Rp 31,189,000	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut usia	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Lanjut Penyandang Disabilitas)	15297 orang	Rp 5,520,000	16001 Orang	Rp 5,520,000	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					4 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai Penyakit Menular dan Tidak Menular)	7 Dokumen	Rp 414,854,800	7 Dokumen	Rp 209,873,800	DINKES
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan Disabilitas dalam akreditasi fasilitas pelayanan)	14 Unit	Rp 335,925,000	14 Unit	Rp 96,626,500	DINKES
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					1 Sub Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas pelayanan rujukan	5 Unit	Rp 275,000,000	10 Unit	Rp 350,000,000	RSUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						yang inklusif bagi penyandang disabilitas)					
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memnuhi Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Kegiatan : Pelayanan Nonmedik						
					1 Sub Kegiatan: Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi,kemitraa n dan pemberdayaan masyarakat	Tidak Spesisifik disabilitas (Sosialisasi sarana,prasarana dan alat kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar)	30 Unit	Rp 31,918,000	50 Unit	Rp 110,000,000	RSUD
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					1 Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tidak Spesisifik disabilitas (Pengadaan alat kesehatan untuk disabilitas)	8 Unit	Rp 50,000,000	15 Unit	Rp 98,000,000	RSUD
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas.	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.										
					Kegiatan : Pelayanan Keperawatan dan kebidanan						
					1 Sub Kegiatan: Asuhan keperawatan generalis	Tidak Spesisifik disabilitas (pelatihan untuk disabilitas)	2 Orang	Rp 59,065,000	5 Orang	Rp 160,000,000	RSUD
Kebijakan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	94437 orang	Rp 55,359,000	94854 Orang	Rp 31,189,000	DINKES
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	(seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	dewasa yang berpotensi disabilitas.		berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyandang Disabilitas)	2614 Orang	Rp 140,709,900	2609 Orang	Rp 140,709,900	DINKES
					2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (memberikan Pelayanann Kesehatan Ibu Bersalin Penyandang Disabilitas)	2609 orang	Rp 15,700,000	2491 Orang	Rp 15,700,000	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir penyandangang Disabilitas)	2247 Orang	Rp 5,520,000	2233 Orang	Rp 5,520,000	DINKES
3					4 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Penyandang Disabilitas)	9144 Orang	Rp 76,381,000	9127 orang	Rp 76,381,000	DINKES
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas.	kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Penyandang Disabilitas.	hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	94437 orang	Rp 55,359,000	94854 Orang	Rp 31,189,000	DINKES
Kebijakan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Jaminan Kesehatan Nasional)					
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)					
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES
Kebijakan 4.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan '	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi program GERMAS ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta secara rutin kepada Penyandang Disabilitas)	4 Dokumen	Rp 152,954,000	4 Dokumen	Rp 112,155,000	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-				
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi Kemitran dan Pemberdayaan Msyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Dalam Sosilaisasi Program Germas)	4 Dokumen	Rp 36,680,000	4 Dokumen	Rp 42,000,000	DINKES

Tabel 3.5

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kaur Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan Pendataan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Data Profil dan DKB Semester 1 dan 2 yang mengcover Data Jumlah Penyandang Disabilitas.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Buku Profil Kependudukan dan Buku DKB Semester 1 dan 2 yang mengcover Data Jumlah Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		3 Laporan	21,634,290	3 Laporan	65,000,000	Dukcapil
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
					1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	Menyelenggarakan Jemput Bola Perekaman KTP-el terkait Kepemilikan KTP-el bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya jumlah Perekaman KTP-el bagi Usia diatas 17 Tahun	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya KTP-el bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	85,000,000	Dukcapil

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2					Penataan Pendaftaran Penduduk						
					1 Pengadaan Dokumen · Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						
					1 Penyelenggaraan · Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk						
Kebijakan 2: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	1 Dokumen	Rp 67,169,700	1 Dokumen	Rp 170,000,000	BAPPPED A
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						BKD-PSDM
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					1 Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan Disabilitas dalam Program Kepegawain Daerah)	59 orang	1,101,426,590.00	65 Orang	1,121,000,000.00	BKD-PSDM
					3 Pembinaan Jabatan Fungsional	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan Disabilitas dalam Program Kepegawain Daerah)	30 Dokumen	176,050,490.00	30 Dokumen	180,000,000.00	BKD-PSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
					1 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan Disabilitas dalam Program Kepegawain Daerah)	3 Dokumen	82,541,280.00	4 Dokumen	150,000,000.00	BKD-PSDM
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan Disabilitas dalam Program Kepegawain Daerah)					
2					1 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan Disabilitas dalam Program Kepegawain Daerah)	1 Laporan	239,190,280.00	1 Laporan	320,000,000.00	BKD-PSDM
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
					Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggun g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Respon Cepat Darurat Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan peralatan penanggulangan bencana untuk disabilitas)	1 Dokumen	Rp 150,145,660	1 Dokumen	Rp 150,145,660	
					2 Penyediaa Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan peralatan penanggulangan bencana untuk disabilitas)	100 Orang	Rp 103,120,000	150 Orang	Rp 113,120,000	BPBD Kaur
				Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas permukiman bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Belum adanya Perda Terkait Kegiatan Tersebut					
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
					1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		1. Dokumen	87,265,000	1. Dokumen	97,265,000	BPBD Kaur
					2 Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiap siagaan terhadap bencana		1 Dokumen	69,547,350	1 Dokumen	79,547,350	
Kebijakan 2: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik disabilitas (Terbangunnya jamban keluarga yang layak sesuai standar)	50 Rumah Tangga	336,729,860	70 Rumah Tangga	Rp 400,000,000	DPUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung						
					1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	pembuatan taman lapangan merdeka yang mengakomodir aksesibilitas untuk disabilitas	1 Paket	1,330,000,000	1 Paket	2,000,000,000	DPUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
					KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tidak Spesifik disabilitas (Terbangunnya terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum yang layak sesuai standar)	1 Paket	200,000,000	5 Paket	1,000,000,000	DPUPR
Kebijakan 3: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergritas Secara Elektronik	Tidak Spesifik Disabilitas (Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir penyangang disabilitas)	1 Dokumen	Rp 3,020,370	1 Dokumen	Rp 3,020,370	Dinas Perhubunga n
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	Rp -		Rp -	Dinas Perhubunga n
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tidak Spesifik Disabilitas (Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya penyangang disabilitas)	-	Rp -		Rp 65,000,000	Dinas Perhubunga n
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupeten /Kota		-	Rp -		Rp -	Dinas Perhubunga n
Kebijakan 4: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					Kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					1 Pengelolaan media dan komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Opini dan aspirasi publik terhadap penyandang disabilitas)	2 Paket Balliho dan 1668 Eksamplar Media Elektronik	Rp 2,377,000,000	2 Paket Balliho dan 1668 Eksamplar Media Elektronik	Rp 2,450,000,000	Dinaskomin fo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan media dan komunikasi publik terhadap kebutuhan penyandang disabilitas)				Dinaskominfo	
					PENGELOLAAN E-GOVERNMENT LILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Tidak Spesifik Disabilitas (Tahun 2023 akan menyelenggarakan Sosialisasi yang 20% pesertanya adalah Penyandang disabilitas)					
					1 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas)	1 Laporan	Rp 219,887,000	1 Laporan	Rp 225,000,000	Diskominfo
					2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik		1 Laporan	Rp 2,482,986,000	1 Laporan	Rp 265,000,000	Diskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
					PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Menyediakan sarana dan prasaranan pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi yang ramah penyandang disabilitas)					
					1 Membangun Metadata Statistik Sektoral		2 Dokumen	Rp 216,325,990	2 Dokumen	Rp 225,000,000	Diskominfo
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Meningkatkan Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tercapainya Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
					1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terealisasinya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Laporan	Rp 34,888,000	2 Laporan	Rp 36,632,400	Kesbangpol

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Meningkatkan Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tercapainya Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Terealisasinya Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	100%	814,122,685	100%	854,828,819	Kesbangpol

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
					2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Meningkatkan Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Terlaksananya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Tercapainya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan						
					1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terealisasinya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	100%	65,433,000	100%	68,704,650	Kesbangpol
	Meningkatkan Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tercapainya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
2					1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terealisasinya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	28,440,000	100%	29,862,000	Kesbangpol
	Meningkatkan Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tercapainya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terealisasinya Penyandang Disabilitas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	22,545,000	100%	23,672,250	Kesbangpol
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan Jumlah Penanganan PMKS pelayanan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha ekonomi,penanganan,saran a dan prasarana sosial,penanganan dan perlindungan sosial.	Tercapainya Penanganan PMKS pelayanan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha ekonomi,penanganan,saran a dan prasarana sosial,penanganan dan perlindungan sosial.	Pemberian Layanan Penanganan PMKS pelayanan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha ekonomi,penanganan,saran a dan prasarana sosial,penanganan dan perlindungan sosial.	Terselenggaranya layanan Pemberian Layanan Penanganan PMKS pelayanan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha ekonomi,penanganan,s arana dan prasarana sosial,penanganan dan perlindungan sosial.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Spesifik Disabilitas					Dinsos
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Spesifik Disabilitas					
					Sub kegiatan : 1 Pemberian Layanan Rujukan	Spesifik Disabilitas (Adanya pemberian layanan rujukan					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						kepada penyandang Disabilitas)					
					2 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	418 orang	300,000,000	418 orang	589,380,000.00	Dinsos
					3 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas (Adanya bantuan pakaian, perlengkapan lainnya)	418 orang	0	418 orang	418,000,000.00	Dinsos
					4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Spesifikasi Disabilitas (Adanya tempat penampungan untuk penyandang Disabilitas)	0	0	1 tempat	500,000,000.00	Dinsos
					5 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat kruk, , alat bantu dengar, segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)	418 orang	25 (berupa Barang)	393 orang	982,500,000.00	Dinsos
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan 1. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Mewujudkan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja, Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1. Jumlah Pelatihan Menjahit dan Sablon	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tidak Spesifik Disabilitas	120 Orang	140,480,890	800 Orang	240,480,800	Disnaker
				2. Masyarakat yang Berkwalitas dan Berdaya Saing							
				1. Jumlah Pelatihan Menjahit dan Sablon	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas	–	–	30 Orang	Rp 50,000,000	DISPERIN AKER
				Masyarakat yang Berkwalitas dan Berdaya Saing							
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas					Dikbud

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Insentif Guru Pembimbing Layanan Khusus SMPN 36 PKLK Kaur dan SDN 126 PKLK Kaur		3 Guru PKLK	100,000,000	6 Guru PKLK	200,000,000	DIKBUD
					Pelatihan Bagi Guru Pembimbing Layanan Khusus		25 Guru	150,000,000	50 Guru	300,000,000	DIKBUD
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memberikan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah Penyandang Disabilitas)		Rp -	2350 Orang	Rp 30,000,000	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia	89056 orang	Rp 35,000,000	89059 Orang	Rp 35,000,000	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Produktif penyandang Disabilitas)					
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut usia	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Lanjut Penyandang Disabilitas)	15201orang	Rp 124,218,300	15201 Orang	Rp 124,218,300	DINKES
					4 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai Penyakit Menular dan Tidak Menular)	7 Dokumen	Rp 309,031,800	7 Dokumen	Rp 395,000,000	DINKES
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan Disabilitas	2 Unit	Rp 113,170,000	14 Unit	Rp 792,190,000	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						dalam akreditasi fasilitas pelayanan)					
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					1 Sub Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	0	Rp -	0	Rp -	RSUD
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memnuhi Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Kegiatan : Pelayanan Nonmedik						
					1 Sub Kegiatan: Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi,kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Tidak Spesisifik disabilitas (Sosialisasi sarana,prasara n dan alat kesehatan inklusif	30 Unit	Rp 174,527,000	50 Unit	Rp 208,127,000	RSUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						disabilitas sesuai standar)					
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					1 Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tidak Spesisifik disabilitas (Pengadaan alat kesehatan untuk disabilitas)	0	Rp -	0	Rp -	RSUD
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas.	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Kegiatan : Pelayanan Keperawatan dan kebidanan						
					1 Sub Kegiatan: Asuhan keperawatan generalis	Tidak Spesisifik disabilitas (pelatihan untuk disabilitas)	0	Rp -	0	Rp -	RSUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	-	Rp -	94854 Orang	Rp 35,000,000	DINKES
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyandang Disabilitas)	-	Rp -	0	Rp -	DINKES
					2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (memberikan Pelayanann Kesehatan Ibu Bersalin Penyandang Disabilitas)	-	Rp 462,598,000	2491 Orang	Rp 579,598,000	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir penyandang Disabilitas)	-	Rp -	2233 Orang	Rp 46,158,650	DINKES
					4 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Penyandang Disabilitas)	-	Rp -	9127 orang	Rp 666,619,800	DINKES
3	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	-	Rp -	94854 Orang	Rp 35,000,000	DINKES
Kebijakan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	Rp 7,299,994,798	1 Dokumen	Rp 15,199,060,800	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 4.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan '	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi program GERMAS ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta secara rutin kepada Penyandang Disabilitas)	3 Dokumen	Rp 174,527,000	5Dokumen	Rp 208,127,000	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-				
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung g jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi Kemitran dan Pemberdayaan Msyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Dalam Sosilaisasi Program Germas)	-	Rp -	-	Rp -	DINKES

Tabel 3.6

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 - 2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						Disdukcapil
					Penyusunan Profil Kependudukan						
					1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya data kependudukan bagi disabilitas)	3 Dokumen	45,487,000	3 Dokumen	46,000,000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga bagi disabilitas)	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	13,000,000	
	Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya data fakir miskin termasuk data disabilitas)	31.000 KK	375,325,164	31.000 KK	235,543,062		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Dinas Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
					1 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	30 Orang	48,718,600	30 Orang	15,000,000		
					2 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas (adanya bantuan alat untuk disabilitas seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kaki 1, tongkat ketiak, tongkat kaki 3 dan tongkat kaki 4)	30 Orang	82,700,000	30 Orang	15,000,000		
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
1	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						Bappeda	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilita	16 dokumen, 16 perangkat daerah	360,000,000	16 dokumen, 16 perangkat daerah	365,000,000	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	9 dokumen, 9 perangkat daerah	500,000,000	9 dokumen, 9 perangkat daerah	500,000,000	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	28 dokumen, 28 perangkat daerah	390,000,000	28 dokumen, 28 perangkat daerah	390,000,000	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKSDM
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (melibatkan disabilitas dalam program	7 Orang	154,000,000	7 Orang	375,801,800	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	dan Pemerintah Daerah					pendidikan lanjutan)					
				Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
					1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Disabilitas)	28 Laporan	350,000,000	28 Laporan	850,000,000	
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						Dinas PUPRKB
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas dalam pembangunan insfrastruktur agar dapat di akses oleh disabilitas)	5 Sistem Jaringan 30 km	900,880,810	5 Sistem Jaringan 30 km	2,554,752,200	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		28 dokumen 196 dokumen 28 perangkat daerah	390,000,000	28 dokumen 196 dokumen 28 perangkat daerah	390,000,000	
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
					1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (dalam merencanakan dokumen pembangunan	25 Dokumen 43 Gedung	21,528,920,000	25 Dokumen 43 Gedung	5,420,484,851	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						melibatkan disabilitas)					
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
					1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (perlengkapan jalan yang dapat diakses oleh disabilitas)	60 Unit	4,106,249,200	60 Unit	3,578,600,000	
					2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (perlengkapan jalan yang dapat diakses oleh disabilitas)	500 Unit	357,126,000	500 Unit	100,000,000	
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
					1 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tidak Spesifik Disabilitas (perlengkapan jalan yang dapat diakses oleh disabilitas)	5 Unit	556,805,000	-	-	
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskrimintaif terhadap Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan		Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
				1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (bantuan dapat diberikan kepada disabilitas)	20 Orang	500,000,000		120,852,864		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab				
							2023		2024						
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)					
		Standar Pelayanan Minimal			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						Dinas Sosial				
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										
					1 Penyediaan Makanan	Tidak Spesifik Disabilitas (bantuan dapat diberikan kepada disabilitas)	25 KK	62,894,900	25 KK	18,284,816					
					2 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tidak Spesifik Disabilitas (melibatkan disabilitas)	20 KK	54,047,000	20 KK	17,663,448					
					3 Pelayanan Dukungan Psikososial	Tidak Spesifik Disabilitas (melibatkan disabilitas)	25 KK	18,560,500	25 KK	18,400,000					
				Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas Permukiman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						Dinas PUPRKB				
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										
					1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tidak Spesifik Disabilitas (penyediaan prasarana, sarana utilitas umum dapat digunakan bagi disabilitas)	2 Lokasi	65,624,000	2 Lokasi	300,000,000					
					4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Kominfo
								1 Penataan Organisasi							
			2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tidak Spesifikasi (pelayanan publik yang dapat diakses disabilitas)	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	91,800,000							
			Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan	-	-										

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.	dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas	layak berdasarkan <i>affirmative policy</i> bagi Penyandang disabilitas							
			Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	-	-	-	-	-	-	-
2	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Dinas Perhubungan
			Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan standar	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas Daerah	1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (penyediaan angkutan umum yang dapat di gunakan disabilitas)	2 Unit	162,298,300	-	-	
	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (perlengkapan jalan yang dapat diakses disabilitas)	60 Unit	4,106,249,200	60 Unit	3,578,600,000		
				3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (Dalam proses rehabilitasi dan pemeliharaan turut mempertimbangkan rehabilitasi yang mendukung pengguna penyandang disabilitas)						
		Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya regulasi potongan harga dan/atau kemudahan transportasi bagi penyandang disabilitas	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan indeks kualitas fasilitas	Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Dinas Perhubungan	
		pejalan kaki yang ramah disabilitas pada		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
		jalan nasional di kota besar (10 kota) dan		1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (akses jalan yg dapat	60 Unit	4,106,249,200	60 Unit	3,578,600,000		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			kota metropolitan (13 kota)			digunakan disabilitas)					
					2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (akses jalan yg dapat digunakan disabilitas)	600 Unit	357,126,000	600 Unit	100,000,000	
2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
					1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tidak Spesifik Disabilitas (dapat diikuti disabilitas)	2 Orang	116,500,000	-	-	
					2 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tidak Spesifik Disabilitas (sosialisasi pesertanya dapat diikuti disabilitas)	2 Laporan	43,131,800	-	-	
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas										
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Melaksanakan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas)	12 Dokumen	137,249,000	12 Dokumen	141,795,000	Dinas Kominfo	
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	-	-						
					-	-						
					-	-						
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	-	-						
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas												
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi												
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						KESBANGPOL	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
					1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Tidak Spesifik Disabilitas	20 Orang 10 parpol	1,048,529,865	20 Orang 10 parpol	16,031,719,165		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(sosialisasi ke Partai Politik agar dapat mengikut sertakan disabilitas sebagai pengurus partai)					
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (akan mengikuti disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum)	60 Orang	37,000,000	60 Orang	37,000,000	
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Tidak Spesifik Disabilitas (sosialisasi, monitoring bahwa	60 Orang	37,000,000	60 Orang	37,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	tempat pemungutan susra dapat diakses oleh disabilitas)					
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (dalam pelaksanaan pemilihan umum mengikuti disabilitas)	60 Orang	37,000,000	60 Orang	37,000,000	
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Tidak Spesifik Disabilitas (sosialisasi ke	20 Orang 10 parpol	1,048,529,865	20 Orang 10 parpol	16,031,719,165	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik agar dapat mengikut sertakan disabilitas sebagai pengurus partai)					
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
					1 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	30 Orang	48,718,600	30 Orang	15,000,000	
					2 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas (adanya bantuan alat untuk disabilitas seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kaki 1, tongkat ketiak, tongkat kaki 3 dan tongkat kaki 4)	30 Orang	82,700,000	30 Orang	15,000,000	
					3 Pemberian Layanan Kedaruratan	Tidak spesifik Disabilitas (pemberian layanan kedaruratan bagi ODGJ, Orang terlantar dan Disabilitas)	50 Orang	76,918,000	50 Orang	27,531,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif											
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Disnakertrans
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (peserta pelatihan dapat juga diikuti oleh disabilitas)	312 Orang	20,000,000	312 Orang	37,500,000		
			Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	-	-					
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.											
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	Terbitnya Surat Menteri PANRB ke LAN Tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai bagian dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas	-	-					
				Tersusunnya Rekomendasi	-	-					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas							
				Terbitnya PermenPANRB Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (didalamnya mengatur terkait formasi khusus Disabilitas)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						Disnakertrans
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
					1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayana dan informasi dapat juga diakses oleh disabilitas)	215 Orang	71,161,600	215 Orang	71,161,600	
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya perencanaan tenaga kerja makro)	-		11 Dokumen	138,462,400	
3	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	-	-	-				

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota.	Tersedianya 2% formasi bagi penyandang disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing Dinas Pemda	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKSDM
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian						
					1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya formasi bagi disabilitas)	2 Dokumen	486,814,750	2 Dokumen	100,000,000	
					Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	-	-				
		Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
4	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayana dan informasi dapat juga diakses oleh disabilitas)	215 Orang	71,161,600	215 Orang	71,161,600	
					-	-					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas.	Jumlah BUMN,BUMD, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	-	-					
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (Didalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKSDM
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian						
					1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya formasi bagi disabilitas)	2 Dokumen	486,814,750	2 Dokumen	100,000,000	
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.		Disabilitas meningkat setiap tahun	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	150 Orang	160,787,000	150 Orang	150,000,000	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	100 Orang	201,567,400	100 Orang	201,567,400	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	19 Orang	69,508,350	19 Orang	70,292,600	
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	-		
Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar		Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.		Disabilitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal meningkat setiap tahun	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat diakseskan oleh disabilitas)	2 Sekolah, 13 Ruang	1,805,285,000	2 Sekolah, 13 Ruang	276,000,000	
			2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat diakseskan oleh disabilitas)	30 Unit	12,684,634,000	30 Unit	1,050,000,000		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
			1 Penambahan Ruang Kelas Baru		Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat diakseskan oleh disabilitas)	1 Sekolah, 3 Ruang	1,200,000,000	-	-		
			2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat diakseskan oleh disabilitas)	5 Unit	5,611,336,600	5 Unit	2,291,100,000		
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
			1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat diakseskan oleh disabilitas)	2 Unit	336350000	2 Unit	296735100		
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan yang dapat	4 Unit	1,972,801,000	4 Unit	1,290,072,000		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						diakseskan oleh disabilitas)						
		Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik meningkat setiap tahun	-	-	-	-	-	-	-	
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas												
1	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Pelaksanaan Program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas	Sekolah yang melaksanakan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun	—	Tidak tersedia					-	
2	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas	Lembaga pendidikan bersifat inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit layanan disabilitas meningkat setiap tahun	—	Tidak tersedia						
	Mendorong peningkatan penyelenggaraan	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang	Penjangkauan lembaga kursus yang menyelenggarakan	Lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau	-	Tidak tersedia						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun							
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Disnakertrans
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (peserta pelatihan dapat juga diikuti oleh disabilitas)	312 Orang	20,000,000	312 Orang	37,500,000			
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga , dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	-	-					
					-	-					
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						Dinas Pemuda dan Olahraga
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
					1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	240 Orang	994,175,225	240 Orang	778,300,000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah										

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	20 Orang	350,000,000	-	-	
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	240 Orang	994,175,225	240 Orang	778,300,000			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah											
1 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	20 Orang	350,000,000	-	-			
	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	240 Orang	994,175,225	240 Orang	778,300,000			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	20 Orang	350,000,000	-	-	
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
					1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (peserta melibatkan disabilitas)	240 Orang	994,175,225	240 Orang	778,300,000	
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya pelayanan kesehatan usia produktif bagi disabilitas)	209.408 orang	32,467,500	209.408 orang	46,000,000	
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya pelayanan kesehatan lanjut usia bagi disabilitas)	209.408 orang	44,999,800	209.408 orang	46,000,000	
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya pelayanan	595 Orang	32,462,500	595 Orang	46,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						kesehatan bagi disabilitas)					
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	1 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (dalam akreditasi fasilitasi kesehatan melibatkan disabilitas)	7 PKM	1,674,400,000	7 PKM	1,692,800,000		
	2 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				Tidak Spesifik Disabilitas (dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitasi kesehatan melibat disabilitas)	7 PKM	250,000,000	7 PKM	231,000,000		
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	-	-					
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut									

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan	masing di fasilitas pelayanan kesehatan	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
					1 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas (adanya bantuan alat untuk disabilitas seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kaki 1, tongkat ketiak, tongkat kaki 3 dan tongkat kaki 4)	30 Orang	82,700,000	30 Orang	15,000,000	
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						RSUD
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (melibatkan disabilitas dalam pengembangan mutu dan kompetensi SDM)	98 Orang	84,484,500	98 Orang	84,484,500	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Dinas Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (melibatkan disabilitas dalam pengembangan mutu dan kompetensi SDM)	300 Orang	45,000,000	300 Orang	180,906,500	
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan	Percepatan pembangunan fasilitas	Fasilitas kesehatan yang menyediakan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN						Dinas Kesehatan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan	pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayanan kesehatan bagi disabilitas)	2.952 Orang	36,400,000	2.952 Orang	36,800,000	
	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayanan kesehatan bagi disabilitas)	209.408 orang	38,960,000	209.408 orang	46,000,000	
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayanan kesehatan bagi disabilitas)	209.408 orang	32,467,500	209.408 orang	46,000,000	
					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayanan kesehatan bagi disabilitas)	209.408 orang	44,999,800	209.408 orang	46,000,000	
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						Dinas PPPAKB
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tidak Spesifik Disabilitas (pelayanan KB melibatkan disabilitas)	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	4,601,404	
	Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas										
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						Dinas Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terpadu Kesejahteraan Sosial	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk disabilitas)	31.000 KK	375,325,164	31.000 KK	235,543,062		
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk disabilitas)	31.000 KK	375,325,164	31.000 KK	235,543,062		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Dinkes	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	275.725 orang	30,000,000,000	275.725 orang	30,000,000,000		
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas												
1	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Dinkes	
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (peserta advokasi)	5476 org, 30 OPD, 15091	155,000,000		155,000,000		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Penyandang Disabilitas.				melibatkan disabilitas)	RT, 60 Sekolah				

Tabel 3.7

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
					Penyusunan Profil Kependudukan						
					1 Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan profil kependudukan tahunan 2. Penyusunan Proyeksi perkembangan penduduk tahunan)	2 dokumen	43,947,000	2 dokumen	60,000,000	Disdukcapil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
					1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan data Agregat kependudukan atau data konsolidasi bersih per semester)	1 dokumen	16,810,000.00	2 dokumen	20,000,000	Disdukcapil

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Kerja Sama/MOU antara Dukcapil dengan OPD/Lembaga lain dalam Pemanfaatan Data Kependudukan)	1 dokumen	38,500,700	1 dokumen	40,000,000	Disdukcapil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengadaan Aplikasi Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Terkoneksi Sistem By System 2. Pengadaan tinta reborn KTP-el dan KIA)	1 laporan	100,000,000	1 laporan	500,000,000	Disdukcapil
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Kegiatan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di kampung KB)	1 dokumen	699,100,000	1 dokumen	981,000,000	DPPKB
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan melalui aplikasi SIGA/ Pendataan Keluarga (PK) BKKBN)	1 dokumen	180,000,000	1 dokumen	178,200,000	DPPKB
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
					1 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Tali Asih Penyuluhan atau Pendampingan PD)	6 Orang	6,400,000	6 Orang	70,450,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pemberian Layanan Rujukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota)	105 Orang	100,000,000	45 Orang	132,020,000	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
					1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tidak Spesifik Disabilitas (Layanan Data dan Pengaduan pada dinas sosial)	780 orang	15,000,000	780 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
					2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial)	10 orang	20,000,000	5 orang	15,000,000	Dinas Sosial
					3 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota)	15 Orang	34,000,000	70	70000000	Dinas Sosial
					4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan / Bantuan pada Panti Asuhan)	6 LKSA	332,000,000	7 LKSA	332,000,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
					1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas (Kegiatan Pelayanan Keliling terkait data kependudukan di 19 kecamatan)	1 laporan	98,791,980	1 laporan	110,000,000	Disdukcapil
					2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengurusan surat keterangan pindah warga negara indonesia /pengurusan pindah dokumen kependudukan antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten)	1 dokumen	36,180,000	1 dokumen	31,000,000	Disdukcapil
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
					1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Kegiatan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di kampung KB)	1 dokumen	699,100,000	1 dokumen	981,000,000	DPPKB
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan melalui aplikasi SIGA/ Pendataan Keluarga (PK) BKKBN)	1 dokumen	180,000,000	1 dokumen	178,200,000	DPPKB
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten)	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	DP3A
					2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemanfaatan Data Gender dan Anak)	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	10,000,000	DP3A
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
					1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas (Kegiatan Pelayanan Keliling terkait data kependudukan di 19 kecamatan)	1 laporan	98,791,980	1 laporan	110,000,000	Disdukcapil
					2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengurusan surat keterangan pindah warga negara indonesia /pengurusan pindah dokumen kependudukan antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten)	1 dokumen	36,180,000	1 dokumen	31,000,000	Disdukcapil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan)	1 Laporan	91,110,660	1 Laporan	90,000,000	Disdukcapil
					Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	2 dokumen	23,602,000	-	0	Disdukcapil
					Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Kerja Sama/MOU antara Dukcapil dengan OPD/Lembaga lain dalam Pemanfaatan Data Kependudukan)	1 dokumen	38,500,700	1 dokumen	40,000,000	Disdukcapil

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					1 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengadaan Aplikasi Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Terkoneksi Sistem By System 2. Pengadaan tinta reborn KTP-el dan KIA)	1 laporan	100,000,000	1 laporan	500,000,000	Disdukcapil
					2 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (pemyusunan dokumen standar pelayanan publik dan penyusunan survey kepuasan masyarakat urusan pencatatan sipil)	2 laporan	92,357,130	1 laporan	100,000,000	Disdukcapil
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
					1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Keluarga di kampung KB)	1 dokumen	699,100,000	1 dokumen	981,000,000	DPPKB
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan melalui aplikasi SIGA)	1 dokumen	180,000,000	1 dokumen	178,200,000	DPPKB
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
					1 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Konsultasi Publik terkait perencanaan penyusunan dokumen perencanaan kabupaten)	1 Berita Acara	20,999,800	2 Berita Acara	21,000,000	Bappelitbangda
					2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten)	1 Berita Acara	14,499,930	2 Berita Acara	15,000,000	Bappelitbangda
					3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dalam proses penyusunan RKPD kabupaten)	1 Berita Acara	23,547,610	2 Berita Acara	48,600,000	Bappelitbangda

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen RKPD 2. Penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045)	2 dokumen	491,952,660	2 dokumen	623,000,000	Bappelitbangda
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaa Pembangunan Daerah						
					1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	73,000,000	1 dokumen	180,000,000	Bappelitbangda
					2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	51,000,000	52 orang	51000000	Bappelitbangda
					3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Buku Bengkulu Utara Dalam Angka)	3 buku	20,000,000	1 buku	20,000,000	Bappelitbangda
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Perda/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016	-	-	-	-	-	-	-

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
					1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Bidang Pemerintahan)	1 Dokumen	55,000,000	-	0	Bappelitbangda
					2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial Budaya)	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	65,000,000	Bappelitbangda
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
					1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS)	4 Dokumen	114,999,954	4 Dokumen	80,000,000	BKAD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (Verifikasi RKA-SKPD)	52 Dokumen	79,999,875	52 Dokumen	65,000,000	BKAD
					3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (Verifikasi DPA-SKPD)	52 Dokumen	74,999,936	1 Dokumen	50,000,000	BKAD
					4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran)	3 Dokumen	64,999,980	1 Dokumen	55,000,000	BKAD
					5 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	2 Dokumen	170,000,315	24 Dokumen	160,000,000	BKAD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah)	1 laporan	169,398,130	1 laporan	55,000,000	BKAD
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban)	1 laporan	109,999,903	1 laporan	53,000,000	BKAD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester)	1 laporan	99,995,284	1 laporan	90,000,000	BKAD
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas)	1 laporan	326,200,000	1 laporan	275,000,000	BKAD
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota)	1 dokumen	92,199,803	1 dokumen	150,000,000	BKAD
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)	1 dokumen	57,206,880	1 dokumen	70,000,000	BKAD
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa)	1 dokumen	19,515,300	-	0	DPMD
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Fasilitasi penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa/ Fasilitasi Penyusunan APBDes)	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	25,000,000	DPMD
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur perangkat Pemerintah Desa)	215 orang	21,900,000	1 dokumen	125,000,000	DPMD
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa)	1 laporan	10,860,350	-	0	DPMD
					Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)	1 laporan	12,719,000	1 laporan	25,000,000	DPMD
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Fasilitasi Penyusunan Profil Desa)	215 desa	11,219,600	-	0	DPMD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Layanan penyusunan kinerja ASN / SKP ASN)	750 orang	9,999,880	750 orang	9,900,000	BKPSDM
					2 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Tidak Spesifik Disabilitas (layanan pengembangan karier jabatan fungsional ASN)	75 orang	9,999,800	75 orang	9,900,000	BKPSDM
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						
					1 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tidak Spesifik Disabilitas (penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh)	1 Dokumen	24,999,890	-	-	Dinas PRKP
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
					1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tidak Spesifik Disabilitas (penyusunan Dokumen Kebijakan Bidang PKP)	-	0	-	10,000,000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan jalan dan kegiatan TMMD Kabupaten)	34 Sistem Jaringan	14,175,000,000	-	-	Dinas PUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
					1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan peran Tim Profesi Ahli (TPA))	35 Dokumen	191,718,600	-	-	Dinas PUPR
					2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi/Pembangunan gedung milik pemerintah daerah)	7 bangunan	5,643,450,000	-	-	Dinas PUPR
					3 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung untuk	2 unit	2,447,507,000	-		Dinas PUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						Kepentingan Strategis Daerah)						
					4	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	7 Bangunan Gedung	900,000,000	Dinas PUPR
					5	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemeliharaan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	7 Bangunan Gedung	1,495,000,000	Dinas PUPR
					6	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tidak Spesifik Disabilitas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	35 Dokumen	200,000,000	Dinas PUPR
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kot							
					1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas (penyusunan dokumen konsultansi Perencanaan APBD 2023)	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	500,000,000	Dinas PUPR
					2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	600,000,000	Dinas PUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab		
							2023		2024				
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
					3 Rekonstruksi Jalan	Konsultasi Perencanaan / penyusunan Data Bas Jalan)							
						4 Rehabilitasi Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan jalan kabupaten)	24.18 KM	51,128,377,000	16 km	12,400,000,000	Dinas PUPR	
							5 Rehabilitasi Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi jalan kabupaten)	1.5 KM	575,000,000	1,69 km	1,450,000,000	Dinas PUPR
								Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi jembatan kabupaten)	1 paket	130,000,000	3 jembatan	1,550,000,000	Dinas PUPR
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
					1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen Peta Dasar Kabupaten Bengkulu Utara)	1 Dokumen	150,000,000	-	-	Dinas PUPR		
					2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen Pemetaan Berbasis Geografis Informasi Sistem (GIS) Kabupaten Bengkulu Utara)	1 Dokumen	50,000,000	-	-	Dinas PUPR		
					3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang)	1 Dokumen	45,000,000	-	-	Dinas PUPR		
					4 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen persetujuan RTRW)	-	-	1 Dokumen	300,000,000	Dinas PUPR		

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					5 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota)	-	-	1 Dokumen	400,000,000	Dinas PUPR
					6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang)	-	-	100 orang	100,000,000	Dinas PUPR
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
					1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan drainase dan jalan lingkungan)	4 Lokasi	2,344,724,820	-	-	Dinas PRKP
					2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tidak Spesifik Disabilitas (Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan)	-	-	1 laporan	25,000,000	Dinas PRKP
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Dinas Perhubungan
					1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan dan pemasangan rambu Lalu Lintas)	5 unit	14,999,820	50 unit	15,000,000	Dinas Perhubungan
					2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan	20 Unit	733,499,930	3 unit	648,000,000	Dinas Perhubungan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						Jalan di Jalan Kabupaten : Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, Pembangunan Lampu Penerang Jalan Umum, Pengadaan Lampu Jalan dll)						
					3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan)	2 Unit	206,500,000	400 unit	75,000,000	Dinas Perhubungan
					4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (Belanja Listrik LPJU dan APILL)	1 tahun	1,729,265,820	200 unit	1,735,000,000	Dinas Perhubungan
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskrimintaif terhadap Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah							
					1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	79,945,000	1 Dokumen	79,945,000	Bappelitbangda
					2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur)	1 Laporan	46,425,000	1 Laporan	46,425,000	Bappelitbangda
					3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	89,840,000	1 Laporan	89,840,000	Bappelitbangda

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur)					
					4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur)	1 Laporan	125,790,000	1 Laporan	250,790,000	Bappelitbangda
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi / Indek Ketahanan Daerah)	1 dokumen	74,999,937	1 dokumen	75.000.00	BPBD	
	2 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				Tidak Spesifik Disabilitas (Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	1 kawasan	9,999,008	1 kawasan	25,000,000	BPBD	
	3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				Tidak Spesifik Disabilitas (Pengembangan Kapasitas Teknis dan Manajerial Personil TRC)	27 orang	20,000,000	27 orang	30,000,000	BPBD	
				Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas Permukiman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan jalan kewenangan kabupaten dan kegiatan TMMD)	34 Sistem Jaringan	14,175,000,000	-	-	PUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Penataan Organisasi						
				1 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tidak Spesifik Disabilitas (penyusunan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	5 laporan	60,000,000	5 laporan	75,000,000	Bagian Organisasi Setdakab	
				Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	
		Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
				1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA))	35 Dokumen	191,718,600	-	-	Dinas PUPR	
2 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	Tidak Spesifik Disabilitas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana			-	-	35 Dokumen	200,000,000	Dinas PUPR			

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
5	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
					1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tidak Spesifik Disabilitas (pembangunan drainase dan jalan lingkungan)	4 Lokasi	2,344,724,820	-	-	Dinas PRKP
					2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tidak Spesifik Disabilitas (Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan)	-	-	1 laporan	25,000,000	Dinas PRKP
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
6	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
					1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota)	1 dokumen	99,319,970	-	-	Dinas Perhubungan
						-	-	-	-	-	-

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas Daerah							
	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					-	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten)	5 unit	14,999,820	50 unit	15,000,000	Dinas Perhubungan	
2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2. Pembangunan Lampu Penerang Jalan Umum 3. Pengadaan Lampu Jalan	20 unit	733,499,930	3 unit	648,000,000	Dinas Perhubungan	
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					Tidak Spesifik Disabilitas (Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat)	2 unit	206,500,000	400 unit	75,000,000	Dinas Perhubungan	
4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Tidak Spesifik Disabilitas (1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik LPJU 2. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 3.Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum)	247 Unit	1,729,265,820	200 unit	1,735,000,000	Dinas Perhubungan	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe)	-	-	1 unit	52,000,000	Dinas Perhubungan	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							
					1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota)	-	-	7 laporan	25,000,000	Dinas Perhubungan	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota)	-	-	40 laporan	92,000,000	Dinas Perhubungan	
			Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota)	Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						-	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
					1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten)	5 unit	14,999,820	50 unit	15,000,000	Dinas Perhubungan	
			7	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas	Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan	-	-	-	-	-

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas							
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe)	-	-	1 unit	52,000,000	Dinas Perhubungan		
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
8	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	-	-	-	-	-	-	
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		kebutuhan penyandang disabilitas	terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	kebutuhan penyandang disabilitas	1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Belanja Jasa Media Massa Elektronik TV 2. Belanja Jasa Media Massa Cetak 3. Vbelanja Jasa Media Online 4. Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1 tahun	1,678,050,000	1 tahun	1,205,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2 Pelayanan Informasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik)	4 Dokumen	21,900,000	5 Dokumen	23,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					3 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah)	11 Dokumen	33,700,000	8 Dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan)	31 Dokumen	222,300,000	25 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas		Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	1 tahun	5,581,870,000	1 tahun	37,467,920,000	Badan Kesbangpol
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik	1 tahun	5,581,870,000				Badan Kesbangpol
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							Badan Kesbangpol
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							Badan Kesbangpol
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada	1 tahun	5,581,870,000	1 tahun	37,467,920,000		Badan Kesbangpol

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik					
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik	1 tahun	5,581,870,000			Badan Kesbangpol
2	Meningkatkan keterwakilan	Tercapainya peningkatan jumlah	Penjangkauan penyandang disabilitas	Keterwakilan penyandang disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas dalam politik.	Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	untuk menduduki lembaga legislatif.	yang duduk dalam lembaga legislatif.	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik	1 tahun	5,581,870,000	1 tahun	37,467,920,000	Badan Kesbangpol

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyanggah Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas					

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	1 Penyediaan Permakanan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota)	-	-	8 orang	10,000,000	Dinas Sosial
					2 Penyediaan Sandang	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	8 orang	10,000,000	Dinas Sosial
					3 Penyediaan Alat Bantu	Tidak Spesifik Disabilitas (Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota)	-	-	0 orang	-	Dinas Sosial
					4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	15,000,000	Dinas Sosial
					5 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota)	0 orang	-			Dinas Sosial
					6 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota)	6 orang	23,400,000	10 orang	70,000,000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					7 Pemberian Layanan Kedaruratan	Tidak Spesifik Disabilitas (pemenuhan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota)	6 orang	5,000,000	-	-	Dinas Sosial
					8 Pemberian Layanan Rujukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota)	105 orang	100,000,000	-	-	Dinas Sosial
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Pembayaran Guru Bantu Daerah jenjang PAUD)	172 orang	2,862,400,000	172 orang	2,885,600,000	Dinas Pendidikan
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik)	120 orang	370,000,000	80 orang	800,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Pembayaran Guru Bantu Daerah jenjang SD)	444 orang	9,497,400,000	444 orang	9,654,400,000	Dinas Pendidikan
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik)	100 orang	1,422,000,000	300 orang	800,000,000	Dinas Pendidikan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
					1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Pembayaran Guru Bantu Daerah jenjang SMP)	263 orang	9,497,400,000	263 orang	4,383,000,000	Dinas Pendidikan	
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik)	200 orang	1,422,000,000	200 orang	600,000,000	Dinas Pendidikan	
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	-							
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
						1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen)	260 Satuan Pendidikan	471,100,000	275 Satuan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan
						2 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (DAK Non Fisik BOP PAUD)	260 Satuan Pendidikan	4,436,400,000	275 Satuan Pendidikan	4,436,400,000	Dinas Pendidikan
		Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Tersusunnya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
						1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD)	54 Unit	5,883,447,500	30 Unit	6,000,000,000	Dinas Pendidikan
Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan Standar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab			
							2023		2024					
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)				
		dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.		Pelayanan Minimal meningkat setiap tahun	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD)	2 Unit	299,732,000	15 Unit	1,900,000,000	Dinas Pendidikan			
					3 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan perlengkapan PAUD)	19 Paket	855,000,000	200 Paket	1,000,000,000	Dinas Pendidikan			
					4 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD)	7428 Paket	905,000,000	-	-	Dinas Pendidikan			
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
					1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD)	105 Unit	30,950,282,250	112 Unit	15,000,000,000	Dinas Pendidikan			
					2 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SD)	37 Unit	7,004,342,250	60 Unit	5,000,000,000	Dinas Pendidikan			
					3 Pengadaan Perlengkapan sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan perlengkapan SD)	171 Paket	10,492,550,000	60 Paket	2,800,000,000	Dinas Pendidikan			
					4 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD)	1600 paket	2,789,100,000	-	-	Dinas Pendidikan			
					5 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD)	-	-	4084 Paket	1,500,000	Dinas Pendidikan			
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
					1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP)	68 Unit	22,005,425,000	60 Unit	9,000,000,000	Dinas Pendidikan			
					2 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SD)	88 Unit	3,129,954,000	40 Unit	3,000,000,000	Dinas Pendidikan			

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					3 Pengadaan Perlengkapan sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan perlengkapan SMP)	56 Paket	2,452,450,000	56 Paket	2,800,000,000	Dinas Pendidikan
					4 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMP)	1400 Paket	2,475,977,000	-	-	Dinas Pendidikan
					5 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMP)	-	-	4084 Paket	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
		Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik meningkat setiap tahun	-	-	-	-	-	-	-
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas											
3	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum Sekolah Dasar, ANBK Sekolah Dasar, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SD)	-	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum SMP, ANBK SMP, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SMP serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SMP)	-	-	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum PAUD, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan PAUD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan PAUD)	-	-	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
4	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Seluruh Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pendidikan formal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum Sekolah Dasar, ANBK Sekolah Dasar, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SD)	-	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum SMP, ANBK SMP, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SMP serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SMP)	-	-	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum PAUD, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan PAUD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan PAUD)	-	-	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
5	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	Seluruh anak disabilitas tanpa batas usia dapat masuk ke sekolah reguler	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum Sekolah Dasar, ANBK Sekolah Dasar, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SD)	-	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum SMP, ANBK SMP, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan SMP serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan SMP)	-	-	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan kurikulum PAUD, Perencanaan dan EValuasi Layanan Bidang Pendidikan PAUD serta Evaluasi Hasil Raport Pendidikan PAUD)	-	-	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
		Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Seluruh siswa disabilitas menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	-	-	-	-	-	-	
		Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	Advokasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi rentan putus sekolah	Seluruh peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi tidak putus sekolah	-	-	-	-	-	-	
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											
6	Mengembangkan program deteksi dan	Terlaksananya program deteksi dan	Pelaksanaan Program deteksi dan intervensi	Sekolah yang melaksanakan program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas	deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen)	260 Satuan Pendidikan	471,100,000	275 Satuan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan
					2 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (DAK Non Fisik BOP PAUD)	260 Satuan Pendidikan	4,436,400,000	275 Satuan Pendidikan	4,436,400,000	Dinas Pendidikan
7	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas	Lembaga pendidikan bersifat inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit layanan disabilitas meningkat setiap tahun	-	-	-	-	-	-	-
8	Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Penjangkauan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	Lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-			
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Steling/Etalase Kaca 2. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Ternak Kambing 3. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Kerupuk	10 Paket	680,000,000	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						4. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Pengelasan						
						Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Etalase 2. Pelatihan dan Bantuan TKM Kewirausahaan Keripik)	-	-	3 Paket	240,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun	-	-	-	-	-	-	-	
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.												
9	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemberian Bantuan Alat Kesenian Tradisional kepada kelompok/sanggar kesenian)	20 Unit	200,000,000	20 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan	
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaraan olah raga	100 orang	400,000,000	-	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						tingkat provinsi/nasional 2. PelaksanaanKejuaraan Daerah bola volley tingkat provinsi di GOR Perjuangan Bengkulu Utara)						
						Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaran Pekan Olah Raga Provinsi)	-	-	25 orang	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
					2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan turnamen/kejuaraan olah raga di Kabupaten Bengkulu Utara)	-	-	1 dokumen	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaran olah raga tingkat provinsi/nasional 2. PelaksanaanKejuaraan Daerah bola volley tingkat provinsi di GOR Perjuangan Bengkulu Utara)	100 orang	400,000,000	-	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
						Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaran Pekan Olah Raga Provinsi)	-	-	25 orang	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
					2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan turnamen/kejuaraan olah	-	-	1 dokumen	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	raga di Kabupaten Bengkulu Utara)						
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				1 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaran olah raga tingkat provinsi/nasional 2. PelaksanaanKejuaraan Daerah bola volley tingkat provinsi di GOR Perjuangan Bengkulu Utara)	100 orang	400,000,000	-	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
					Tidak Spesifik Disabilitas (1. Pengiriman Atlet/Offocial dalam penyelenggaran Pekan Olah Raga Provinsi)	-	-	25 orang	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
				2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelaksanaan turnamen/kejuaraan olah raga di Kabupaten Bengkulu Utara)	-	-	1 dokumen	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Perekrutan pelatih, pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-				
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelatihan service komputer)	-	-	50 orang	152,376,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I : Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	6001 Orang	182,101,000	5743 Orang	132,101,000.00	Dinas Kesehatan
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	5736 Orang	931,292,260	4791 Orang	954,025,260	Dinas Kesehatan
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)	5456 Orang	70,000,000	4728 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Balita)	20978 Orang	158,026,000	17188 Orang	108,026,000	Dinas Kesehatan
					5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)	49383 Orang	70,000,000	47370 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
					6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif)	201269 Orang	256,465,000	88796 Orang	206,465,000	Dinas Kesehatan
					7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut)	34136 Orang	247,630,000	19148 Orang	197,630,000.00	Dinas Kesehatan
					8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	4141 Orang	70,000,000	5189 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan
					9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan	1641 Orang	70,000,000	1959 Orang	70,000,000.00	Dinas Kesehatan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Penderita Diabetes Melitus)					
					10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat)	365 Orang	70,000,000	457 Orang	72,000,000	Dinas Kesehatan
					11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	819 Orang	70,000,000	1094 Orang	73,000,000	Dinas Kesehatan
					12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	6958 Orang	70,000,000	6974 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan
					13 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)	1 Dokumen	721,819,100	1 Dokumen	631,819,100.00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Akreditasi Fasilitas Kesehatan)	22 Unit	264,003,000	5 Unit	1,204,003,000	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	8 Unit	50,000,000	4 Unit	55,000,000	Dinas Kesehatan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						Pelayanan Kesehatan Lainnya)						
					2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan)	26 Unit	500,000,000	4 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
					Peningkatan Pelayanan BLUD							
					1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Arga Makmur)	1 RSUD	47,000,000,000	1 RSUD	37,000,000,000	RSUD Arga Makmur	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spesifik Disabilitas (Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Kursi Roda Dewasa Standar)	1 unit	2,656,500	-	-	Dinas Pendidikan	
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	layanan kesehatan ramah disabilitas.				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	1 dokumen	56,480,500	1 dokumen	100,000,000	
Kebijakan II : Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.											
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan/rehabilitas puskesmas dan Pustu)	9 unit	11,145,454,100	10 unit	17,139,428,730	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Balita)	20978 Orang	158,026,000	17188 Orang	108,026,000	Dinas Kesehatan
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)	49383 Orang	70,000,000	47370 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif)	201269 Orang	256,465,000	88796 Orang	206,465,000	Dinas Kesehatan
5	Meningkatkan pemahaman terhadap	Terlaksananya sosialisasi, kampanye,	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
					1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana)	1 dokumen	625,800,000	1 dokumen	624,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
6	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	1 Dokumen	20,865,148,485	1 Dokumen	21,906,648,485	Dinas Kesehatan
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
7	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan)	1 Dokumen	474,736,650	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat)	1 Dokumen	465,517,990	1 Dokumen	525,254,640	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan)	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tidak Spesifik Disabilitas (Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM))	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	53,000,000	Dinas Kesehatan

Tabel 3.8

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Seluma Tahun 2023-2024

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan Pendataan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						DISDUKC APIL
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
					- Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Kerjasama dengan lembaga yang menaungi penyandang disabilitas)	2 Kerjasama	15,000,000	2 Kerjasama	10,000,000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						DP3APPK B
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Data Penyandang Disabilitas tersedia secara rinci)	1 Dokumen	70,000,000			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						DISKOMI NFO
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
					- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tidak Spesifik Disabilitas (Data Statistik Penyandang Disabilitas)	1 Laporan	60,162,320	1 Laporan	60,000,000	
					- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tidak Spesifik Disabilitas (Peningkatan kelembagaan Statistik Penyandang Disabilitas)	1 Laporan	10,162,390	1 Laporan	10,000,000	
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						DISDUKC APIL
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Penyandang Disabilitas di daerah	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Penyandang Disabilitas menjadi Prioritas)	1.200 Orang	16,000,000	1.200 Orang	16,000,000	
				Penataan Pendaftaran Penduduk							
				- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengadaan Dokumen untuk Penyandang Disabilitas di prioritaskan)	56.000 Dokumen	281,175,000	75.000 Dokumen	400,000,000		
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							
				- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaska n)	200 Orang	15,000,000	200 Orang	15,000,000		
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.			- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas (Koordinasi dengan Lembaga yang menaungi Penyandang Disabilitas)	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
					- Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diikuti sertakan)	4 Laporan	113,891,050	4 Laporan	60,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
					- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia analisis data dan Informasi bagi penyandang disabilitas)	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000		
4	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Tidak Spesifik Disabilitas (memastikan perencanaan bagi penyandang disabilitas tersedia)	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000		

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah				- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas (memastikan perencanaan bagi penyandang disabilitas tersedia)	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas (memastikan perencanaan bagi penyandang disabilitas tersedia)	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	80,000,000	
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas (memastikan perencanaan bagi penyandang disabilitas tersedia)	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	80,000,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					BKD	
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
					- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyandang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	135,000,000	12 Laporan	135,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	135,000,000	12 Laporan	135,000,000	
					- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	75,000,000	
					- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	75,000,000	
					- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	65,309,000	12 Laporan	65,309,000	
					- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	58,423,400	12 Laporan	58,423,400	
					- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangdang	12 Laporan	217,008,600	12 Laporan	217,008,600	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						disabilitas terakomodir)					
					- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	227,400,000	12 Laporan	227,400,000	
					- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	35,479,000	12 Laporan	35,479,000	
					- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (anggaran penyangang disabilitas terakomodir)	12 Laporan	680,000,000	12 Laporan	680,000,000	
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						DPMD
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
					- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan penyangang disabilitas)	182 Desa	1,658,000,000	182 Desa	800,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan penyandang disabilitas)	182 Desa	20,024,480	182 Desa	20,000,000	
					- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan penyandang disabilitas)	182 Desa	20,046,760	182 Desa	20,000,000	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKPSDM
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					- Pengelolaan Assessment Center	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	30 ASN	331,432,450	6 ASN	100,000,000.00	
					- Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Tidak Spesifik Disabilitas					

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						(Penyandang Disabilitas diprioritaskan)					
				Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.	- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	30 ASN	454,675,960	6 ASN	100,000,000.00	
					- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	20 ASN	80,048,600	10 ASN	40,000,000	
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						DISPERKI MHUB
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Tidak Spesifik Disabilitas (PSU untuk penyandang disabilitas)	1 Paket	139,197,415	1 Paket	100,000,000		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										DINAS PUPR	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
					- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Banguna Ramah untuk Penyandang Disabilitas)	1 Dokumen	4,122,745,000	-	-	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						DINAS PUPR
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
					- Pembangunan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia Jalan/jembatan khusus penyandang disabilitas)		3,495,366,690		3,495,366,690	
					- Rekonstruksi Jalan			95,462,992,697		95,462,992,697	
					- Rehabilitasi Jalan			5,933,861,660		5,933,861,660	
					- Pemeliharaan Rutin Jalan			961,703,500		961,703,500	
					- Pembangunan Jembatan			4,126,820,460		4,126,820,460	
					- Rehabilitasi Jembatan			1,605,859,440		1,605,859,440	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						DINAS PUPR
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk Penyandang Disabilitas)		599,870,210		300,000,000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
					- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk Penyandang Disabilitas)		9,357,950		10,000,000	
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskrimintaif terhadap Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas		80,000,000		80,000,000	
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas		80,000,000		80,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas		100,000,000		100,000,000	
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas		80,000,000		80,000,000	
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas		80,000,000		80,000,000	
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Pemantauan dan evaluasi pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						BPBD
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
					- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Kegiatan	49,393,670	1 Kegiatan	30,000,000	
					- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	5 Kegiatan	250,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	
					- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Kegiatan	35,993,790	1 Kegiatan	20,000,000	
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						SETDA
					Penataan Organisasi						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
				pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017)	- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Kegiatan	469,538,000	1 Kegiatan	250,000,000		
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas												
5	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						DISPERKI MHUB	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
					- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia khusus untuk penyandang disabilitas)	6 Paket	672,150,000	4 Paket	400,000,000		
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas												
6	Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota)	Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional	Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota)	Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						DISPERKI MHUB	
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							
					- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang disabilitas menjadi prioritas)	36 Unit	896,219,200	40 Unit	1,000,000,000		

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
7	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						DISKOMI NFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
					- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang disabilitas menjadi prioritas)	30 Publikasi	1,870,891,270	24 Publikasi	1,200,000,000	
		- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1 Kegiatan	74,999,860	1 Kegiatan	50,000,000				
		- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		4 Kegiatan	1,692,894,140	3 Kegiatan	1,000,000,000				
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						KESBAN GPOL
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)		887,088,000			
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas menjadi prioritas)		75,835,000			

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- <						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
				penyediaan alat bantu.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas menjadi prioritas)	21 Orang	56,000,000	10 Orang	23,000,000		
					Pemberian Layanan Rujukan	Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas menjadi prioritas)	500 Rujukan	54,000,000	300 Rujukan	20,000,000		
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
					Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas (Penyediaan Alab Bantu untuk penyandang disabilitas)	10 Alat Bantu	34,100,000	10 Alat Bantu	34,100,000		
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif												
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor												
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							DISNAKE RTRANS
					Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi							
					-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama	Tidak Spesifik	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan		7,000,000

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
								2023		2024			
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
	Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.					denganSektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaskan)						
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.													
2	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	Terbitnya Surat Menteri PANRB ke LAN Tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai bagian dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							DISNAKE RTRANS	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
							- Job Fair/Bursa Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	
							Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas						
				Terbitnya PermenPANRB Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (didalamnya mengatur terkait									

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				formasi khusus Disabilitas)							
3	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						DISNAKE RTRANS
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi											
		Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota.		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (pemenuhan 2% Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	144 Orang	700,386,000	160 Orang	850,000,000	
				Tersedianya 2% formasi bagi penyandang disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing Dinas Pemda	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						SETDA
		Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
				- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluas Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tidak Spesifik Disabilitas (pemenuhan 2% Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	12 Laporan	144,178,000	12 Laporan	144,178,000		

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (Didalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKPSDM	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
- Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Tidak Spesifik Disabilitas (pemenuhan 2% Penyandang Disabilitas diprioritaskan)	1 Laporan	271,632,400	1 Laporan	271,632,400			
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas												
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas												
1	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Seluruh Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pendidikan formal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						DINAS DIKBUD	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
-					Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia bangunan ramah untuk penyandang disabilitas)	2 Ruangan	1,273,500,650	2 Ruangan	1,273,500,650		
					-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (PAUD yang mengokomodorir	2 Laporan	67,026,350	2 Laporan	67,026,350	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							penyandang disabilitas)					
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (PAUD yang mengokomo dir penyandang disabilitas)	12 Laporan	130,822,550	12 Laporan	130,822,550	
					-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (PAUD yang mengokomo dir penyandang disabilitas)	12 Laporan	2,352,000,000	12 Laporan	2,352,000,000	
2	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	Seluruh anak disabilitas tanpa batas usia dapat masuk ke sekolah reguler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
					-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Kelas (SD)	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia bangunan ramah untuk penyandang disabilitas)	12 Ruang	3,026,000,000	12 Ruang	3,026,000,000	
					-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		14 Ruang	1,314,000,000	14 Ruang	1,314,000,000	
					-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10 Unit	1,453,000,000	10 Unit	1,453,000,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SD)		10 Ruang	7,440,000,000	10 Ruang	7,440,000,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3 Ruang	289,000,000	3 Ruang	289,000,000	
					-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		14 Paket	2,125,000,000	14 Paket	2,125,000,000	
					-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)		2 Laporan	99,999,650	2 Laporan	99,999,650	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		2 Laporan	851,722,000	2 Laporan	851,722,000	
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		12 Laporan	1,065,908,510	12 Laporan	1,065,908,510	
					-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		12 Laporan	17,221,900,000	12 Laporan	17,221,900,000	
					-	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		16 Unit	4,350,000,000	16 Unit	4,350,000,000	
		Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Seluruh siswa disabilitas menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
					-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (tersedia bangunan ramah untuk penyandang disabilitas)	8 Ruang	2,161,435,000	8 Ruang	2,161,435,000	
					-	Pembangunan Laboratorium		10 Ruang	6,235,653,000	10 Ruang	6,235,653,000	
					-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3 Ruang	954,169,000	3 Ruang	954,169,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)		8 Ruang	7,419,253,000	8 Ruang	7,419,253,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		3 Ruang	950,000,000	3 Ruang	950,000,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		2 Ruang	670,000,000	2 Ruang	670,000,000	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2 Ruang	279,163,150	2 Ruang	279,163,150	
					-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		2 Laporan	99,999,760	2 Laporan	99,999,760	
					-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2 Laporan	925,000,000	2 Laporan	925,000,000	
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		12 Laporan	838,740,780	12 Laporan	838,740,780	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	Advokasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi rentan putus sekolah	Seluruh peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi tidak putus sekolah	- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		12 Laporan	10,753,000,000	12 Laporan	10,753,000,000	
					- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		1 Ruang	48,264,000	1 Ruang	48,264,000	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
					- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (pendidikan non formal untuk penyandang disabilitas)	2 Laporan	75,000,000	2 Laporan	75,000,000	
					- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (pendidikan non formal untuk penyandang disabilitas)	12 Laporan	1,048,500,000	12 Laporan	800,000,000	
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											
3	Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas. Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						DISNAKE RTRANS
					Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						
					- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan pelatihan untuk tenaga kerja penyandang disabilitas)	144 Orang	700,386,000	160 Orang	850,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
4	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lemba ga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						DINAS DIKBUD
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga	90,000,000	1 Lembaga	45,000,000		
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tidak Spesifik Disabilitas (keikutsertaa n penyandang disabilitas)	1 Dokumen	45,740,660	1 Dokumen	25,000,000	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Tidak Spesifik Disabilitas (keikutsertaa n penyandang disabilitas)	4 Sanggar	65,000,000	4 Sanggar	35,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						DISPARPORA
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Tidak Spesifik Disabilitas (keikutsertaan penyandang disabilitas)	2 Laporan	405,000,000	2 Laporan	200,000,000	
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.			Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Tidak Spesifik Disabilitas (keikutsertaan penyandang disabilitas)	1 Laporan			40,000,000	1 Laporan	40,000,000		
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
		sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.		Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	25.239 Orang	111,500,000	25.239 Orang	50,000,000	
					-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	600 Orang	30,232,150	600 Orang	30,232,150	
					-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	300 Orang	51,916,000	300 Orang	30,000,000	
	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							DINKES	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah	22 Puskesmas	355,180,000	-	-		

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							untuk penyandang disabilitas)					
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							RSUD
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	1 RSUD	65,000,000	1 RSUD	30,000,000	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							RSUD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	1 Unit	128,000,000	-	-	
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing di	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				fasilitas pelayanan kesehatan	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan prasarana bagi penyandang disabilitas)	40 Paket	3,084,971,008	-	-	
					-	Pengadaan Obat, Vaksin	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	1 Paket	803,766,580	1 Paket	100,000,000	
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							DINKES
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
					-	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	1 Laporan	20,297,720	1 Laporan	20,000,000	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							DINKES
					-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	Tidak Spesifik	20 Orang	120,968,000	15 Orang	75,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)					
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.												
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							DINKES
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	1 Unit	2,216,952,952	-	-	
					-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	1 Unit	3,696,000,000	-	-	
					-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Tersedia di Level Sub-Kegiatan	1 Paket	243,996,750	1 Paket	135,000,000	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							RSUD
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk							

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan prasarana bagi penyandang disabilitas)	7 Paket	3,816,210,000	-	-		
					Pengadaan Obat, Vaksin	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	1 Paket	750,000,000	1 Paket	325,000,000		
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	15 Unit	100,000,000	10 Unit	50,000,000		
4	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas)	3.754 Orang	100,000,000	3754	50,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	3.510 Orang	36,630,000	3510	18,300,000	
					- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	12.097 Orang	34,800,000	12097	17,400,000	
					- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	11.190 Orang	53,370,000	11190	26,300,000	
					- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	143.017 Orang	189,023,150	143017	75,000,000	
					- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyandang Disabilitas Diprioritaskan)	12.097 Orang	449,979,110	12097	150,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas												
5	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						DINSOS	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	1 Laporan	26,632,000	1 Laporan	25,000,000	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							DINKES
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
					-	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	1 Dokumen	56,422,111	1 Dokumen	30,000,000	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							DINSOS
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Nasional								

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab	
								2023		2024			
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
				Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (pendataan penyandang disabilitas)	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	80,000,000		
				-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (pengolahan data penyandang disabilitas)	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	30,000,000			
6	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							DINKES	
					-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	22 Puskesmas	18,866,345,894	22 Puskesmas	18,866,345,894		
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
				Tersusunnya kebijakan jaminan kesehatan terkait pemenuhan alat bantu yang sesuai kebutuhan termasuk perawatan dan pemeliharaan.	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	1 Laporan	26,632,000	1 Laporan	20,000,000		

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	12.000 Peserta	17,355,242,400	12.000 Peserta	17,355,242,400	
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas												
7	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							DINKES
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					-	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas)	4 Kegiatan	400,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						diprioritaskan)					
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	5 Kegiatan	270,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaskan)	4 Kegiatan	359,999,890	2 Kegiatan	180,000,000	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang	7 Paket	3,816,210,000	-	-	

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD Penanggu ng jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							disabilitas diprioritaska n)					
						Pengadaan Obat, Vaksin	Tidak Spesifik Disabilitas (penyandang disabilitas diprioritaska n)	1 Paket	750,000,000	1 Paket	325,000,000	
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (ramah untuk penyandang disabilitas)	15 Unit	100,000,000	10 Unit	50,000,000	

Tabel 3.9

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						DUKCAPIL
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	300 Dukumen	50,000,000	300 Dukumen	50.000.000,00	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	132.000 dokumen	1,700,000,000	66000 Dukumen	750.000.000,00	
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	6000 Dukumen	75,000,000	6000 Dukumen	75.000.000,00	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL						DUKCAPIL
					Pelayanan Pencatatan Sipil	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tidak Spesifik Disabilitas	16.188 Dokumen	200,000,000	15000 Dokumen	300.000.000,00	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						DP3AP2KB
					Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	1 kebijakan	50,000,000			

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Jumlah kebijakan dalam rangka pengendalian penduduk kuantitas penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	1 kebijakan	50,000,000	1 kebijakan	50,000,000	
					Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Tidak Spesifik Disabilitas	25 Organisasi	50,000,000	25 Organisasi	50,000,000	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						DINSOS
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	50 Orang	15,000,000	25 Orang	192,500,000	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Tidak Spesifik Disabilitas	25 Orang	25,000,000	25 Orang	192,500,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas	100 Orang	140,000,000	50 Orang	330,000,000	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas	225 orang	300,000,000	225 orang	697,268,220	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						DUKCAPIL
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>						
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas	Berita Acara	250,000,000.00	Berita Acara	275,000,000.00	
					Koordinasi Pelaksanaan Forum perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Berita Acara	150,000,000.00	Berita Acara	300,000,000.00	
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Berita Acara	200,000,000.00	Berita Acara	300,000,000.00	
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	2 dokumen	300,000,000.00	2 Dokumen	400,000,000.00	
					<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>						BAPPEDA
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Masukan	150,000,000.00	Masukan	200,000,000.00	
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	50 orang	50,000,000.00	50 orang	60,000,000.00	
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Buku	50,000,000.00	1 Buku	60,000,000.00	
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	dan Pemerintah Daerah.		penganggaran setiap tahun							
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
					Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	3 dokumen	250,000,000.00	3 dokumen	225,000,000.00	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						BPKAD
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	221,218,500	2 Dokumen	243,340,350	
					Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	280,595,000	2 Dokumen	308,654,500	
					Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	649,457,500	2 Dokumen	714,403,250	
					Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	511,510,200	2 Dokumen	562,661,220	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						BPKAD
					Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	5 Laporan	376,249,900	5 Laporan	413,874,890	
					Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	7 Laporan	568,322,000	7 Laporan	625,154,200	
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						DP3AP2KB
					Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKD
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	30,000,000	100 Orang	150.000.000,00	
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	30,000,000	5 Orang	200.000.000,00	
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	30,000,000	100 ASN Laporan	100.000.000,00	
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						PERKIM
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pembangunan dan Pengembangan	Tidak Spesifik Disabilitas	50 Laporan	56,800,000	50 Laporan	79,500,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh						
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Pendataan)	Tidak Spesifik Disabilitas	9 Dokumen	98,105,000	9 Dokumen	128,105,000	
					Penyadaran Publik pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	78,765,000	1 Laporan	78,765,000	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Tidak Spesifik Disabilitas	50 Keluarga	80,000,000	50 Keluarga	80,000,000	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						PUPR
					penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/ kota, pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung						
					Penyelenggaraan penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Penataan Bangunan Implementasi SIMBG	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	
					Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota						
					Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota	Tidak Spesifik Disabilitas	25 Unit	145,500,000,000	35 Unit	145,500,000,000	
					Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab/kota	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Unit	2,000,000,000	2 Unit	2,000,000,000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						PUPR
					Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota						
					Pembangunan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas	125.72 Km	25,000,000,000	125.72 Km	25,000,000,000	
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Tidak Spesifik Disabilitas	2.678 Km	15,000,000,000	2.678 Km	15,000,000,000	
					Rehabilitasi Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas	3.5 Km	3,000,000,000	3.5 Km	3,000,000,000	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas	20 Meter	1,000,000,000	20 Meter	1,000,000,000	
					Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tidak Spesifik Disabilitas	2.678 Km	500,000,000	2.678 Km	500,000,000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						PUPR
					Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota						
					Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Dokumen	118,167,000	2 Dokumen	118,167,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						PERKIM
					Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						
					Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	100,000,000	
					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Permukiman	Tidak Spesifik Disabilitas	8 Lokasi	600,000,000	8 Lokasi	400,000,000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Tidak Spesifik Disabilitas	15 Laporan	75,000,000	15 Laporan	750,000,000	
					Verifikasi dan Penyeraha PSU Permukiman dan Pengembangan	Tidak Spesifik Disabilitas	15 laporaan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKATAN JALAN (LLAJ)						DISHUB
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	32000 Titik	2,500,000,000	32000 Titik	4,000,000,000	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	30 Unit	500,000,000	30 Unit	1,400,000,000	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas	2 Lokasi	40,000,000	2 Lokasi	100,000,000	
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskrimintaif terhadap Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	225,000,000.00	
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA DAERAH						BPBD
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dok	100,000,000
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	150 orang	100,000,000	150 orang	299,999,800	
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dok (pusdalops)	100,000,000	1 dok (pusdalops)	191,985,000	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tidak Spesifik Disabilitas	5 unit	100,000,000	5 unit	127,000,000	
					Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tidak Spesifik Disabilitas	5 Kawasan	150,000,000	5 Kawasan	150,000,000	
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dok	100,000,000	1 Dok, 100 orang,	480,000,000	
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	25 org	200,000,000	25 org	391,200,000	
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						SETDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017)							
					Penataan Organisasi						
					Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tidak Spesifik Disabilitas	4 Laporan	100,000,000.00	4 Laporan	150,000,000	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					PUPR	
					penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/ kota, pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung						
					Penyelenggaraan penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Penataan Bangunan Implementasi SIMBG	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
5	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air,	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						PERKIM
					Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						
					Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	100,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		sanitasi, serta energi dan listrik)	(air, sanitasi, serta energi dan listrik)								
					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Permukiman	Tidak Spesifik Disabilitas	8 Lokasi	600,000,000	8 Lokasi	400,000,000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Tidak Spesifik Disabilitas	15 Laporan	75,000,000	15 Laporan	750,000,000	
					Verifikasi dan Penyeraha PSU Permukiman dan Pengembangan	Tidak Spesifik Disabilitas	15 laporaan	50,000,000	15 Laporan	50,000,000	
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						KESBANGPOL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	pemilihan umum tanpa diskriminasi.	tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.									
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	10 Laporan	1,200,000,000	10 Laporan	1,200,000,000	
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah	150 Orang	85,000,000	250 Orang	275,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah	kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)					
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						KESBANGPOL
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	10 Laporan	1,200,000,000	10 Laporan	1,200,000,000	
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik,	Tidak Spesifik	150 Orang	85,000,000	250 Orang	275,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)					
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						KESBANGPOL
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada	10 Laporan	1,200,000,000	10 Laporan	1,200,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)					
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	150 Orang	85,000,000	250 Orang	275,000,000	
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						KESBANGPOL
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	10 Laporan	1,200,000,000	10 Laporan	1,200,000,000	
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	150 Orang	85,000,000	250 Orang	275,000,000	
2	Meningkatkan keterwakilan	Tercapainya peningkatan jumlah	Penjangkauan penyandang disabilitas	Keterwakilan penyandang disabilitas	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan						KESBANGPOL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas dalam politik.	Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	untuk menduduki lembaga legislatif.	yang duduk dalam lembaga legislatif.	Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)	10 Laporan	1,200,000,000	10 Laporan	1,200,000,000	
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula, hibah kepada	150 Orang	85,000,000	250 Orang	275,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah	instansi vertikal, hibah uang kepada partai politik)					
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Spesifik Disabilitas				Dinsos
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Spesifik Disabilitas				Dinsos
					Penyediaan Permakanan	Spesifik Disabilitas	50 Orang	25,000,000	50 Orang	100.000.000,00	
					Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas	50 Orang	25,000,000	50 Orang	130.000.000,00	
					Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas	100 Orang	200,000,000	30 Orang	175.000.000,00	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Spesifik Disabilitas	225 orang 250 orang	300,000,000	475 Orang	175.000.000,00	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Spesifik Disabilitas	25 Orang	25,000,000	25 Orang	75.000.000,00	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					dan Kartu Identitas Anak						
1	Memberikan beasiswa inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah	Tercapainya peningkatan jumlah siswa kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan penjarangan siswa-siswa disbalitas	beasiswa Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Spesifik Disabilitas					DIKBUD
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Spesifik Disabilitas	4000 Peserta Didik	996,622,000	4000 Peserta Didik		250.000.000,00
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Spesifik Disabilitas	104 sekolah	122,754,000	104 sekolah Peserta Didik		75.000.000,00
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						DIKBUD
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Spesifik Disabilitas	3448 siswa SMP	780,450,000	3448 Peserta Didik	300.000.000,00	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Spesifik Disabilitas	52 sekolah	199,842,600	52 sekolah Peserta Didik	50.000.000,00	
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif											
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tidak Spesifik Disabilitas					DISNAKER

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	swasta di seluruh sektor.										
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas					DISNAKER
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas	120 orang	396,466,000	30 Orang	200.000.000,00	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						KOPERASI
					Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan						
					Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Tidak Spesifik Disabilitas	126 Unit Usaha	120,000,000	5 Unit Usaha	355.000.000,00	
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						PERINDAG
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Lokasi	5,466,400	3 Lokasi	7.652.960,00	
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak Spesifik Disabilitas	3 pasar	35,000,000	3 Dokumen	65.100.000,00	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.											
					PROGRAM PENEMPATAN KERJA						DISNAKER
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						DISNAKER
					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Tidak Spesifik Disabilitas	37 Lembaga	75,000,000	37 Lembaga	75,000,000	
					Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
					Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Tidak Spesifik Disabilitas	120 Orang	275,000,000	120 Orang	275,000,000	
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Tidak Spesifik Disabilitas	850 Orang	1,313,280,000	850 Orang	300.000.000,00	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Satuan Pendidikan PAUD						
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	22 sekolah	200,000,000	22 sekolah	200,000,000	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	10 sekolah	198,894,570	10 sekolah	198,894,570	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	4000	996,622,000	4000	996,622,000	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas	104 sekolah	285,012,000	104 sekolah	285,012,000	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	81 sekolah	89,938,500	81 sekolah	89,938,500	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	104 sekolah	122,754,000	104 sekolah	122,754,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Sekolah	100,000,000	1 Sekolah	100,000,000	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	10 sekolah	498,494,640	10 sekolah	498,494,640	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas	3448	780,450,000	3448	780,450,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas	52 sekolah	184,885,800	52 sekolah	184,885,800	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas	25 sekolah	116,665,000	25 sekolah	116,665,000	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	52 sekolah	199,842,600	52 sekolah	199,842,600	
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas							
		Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Tersusunnya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas	850	1,313,280,000	850	1,313,280,000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas	267 sekolah	256,800,000	267 sekolah	256,800,000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						
		Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana	Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Tersusunnya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas	1 sekolah	500,000,000	1 sekolah	500,000,000	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.		ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas	10 sekolah	108,000,000	10 sekolah	108,000,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	22 sekolah	200,000,000	22 sekolah	200,000,000	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	10 sekolah	198,894,570	10 sekolah	198,894,570	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	4000	996,622,000	4000	996,622,000	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas	104 sekolah	285,012,000	104 sekolah	285,012,000	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	81 sekolah	89,938,500	81 sekolah	89,938,500	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	104 sekolah	122,754,000	104 sekolah	122,754,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Dikbud
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Sekolah	100,000,000	1 Sekolah	100,000,000	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas	10 sekolah	498,494,640	10 sekolah	498,494,640	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas	3448	780,450,000	3448	780,450,000	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas	52 sekolah	184,885,800	52 sekolah	184,885,800	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas	25 sekolah	116,665,000	25 sekolah	116,665,000	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas	52 sekolah	199,842,600	52 sekolah	199,842,600	
		Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik meningkat setiap tahun		-	-	-	-	-	
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
9		Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						DIKBUD
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Tidak Spesifik Disabilitas	4 lembaga adat daerah	413,369,400	4 lembaga adat daerah	413,369,400	
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						DISPORA
					Pembinaan dan Pengembangan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Disabilitas di bidang seni dan olahraga		Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						DISPORA
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						DISPORA
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						DISPORA
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	-		-	-	-		
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas	6865 Orang	86,835,110.00	6865 Orang	604.206.945,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas	6553 Orang	95,865,000.00	6553 Orang	151.818.031,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas	6349 Orang	23,663,850.00	6349 Orang	628.476.198,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas	30.004 Orang	98,705,460.00	30.004 Orang	151.818.031,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	53.968 Orang	49,966,350.00	53.968 Orang	628,476,198.66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas	274.104 Orang	90,371,816.25	274.104 Orang	637.822.437,41	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas	15.737 Orang	65,173,095.00	15.737 Orang	628.476.198,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tidak Spesifik Disabilitas	82.320 Orang	86,229,564.25	82.320 Orang	637.822.437,23	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak Spesifik Disabilitas	2192 Orang	63,969,139.00	2192 Orang	628.476.198,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tidak Spesifik Disabilitas	553 Orang	62,497,364.50	553 Orang	637.822.437,23	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tidak Spesifik Disabilitas	3390 Orang	80,850,896.00	3390 Orang	637.822.437,23	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tidak Spesifik Disabilitas	12.764 Orang	69,748,260.00	12.764 Orang	628.476.198,66	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Tidak Spesifik Disabilitas	50 Orang	58,796,252.55	50 Orang	50.000.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Tidak Spesifik Disabilitas	553 Orang	60,990,000.00	553 Orang	61.289.000,00	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas	25 Dokumen	232,017,182.00	25 Dokumen	2.087.342.483,00	
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						DINKES
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas	23 Unit	29,400,000.00	23 Unit	30,870,000	
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA						RSHD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.		Penyandang Disabilitas yang terakreditasi							
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Peningkatan Pelayanan BLUD						
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit Kerja/OPD	34,000,000,000	1 Unit Kerja/OPD	37,400,000,000	
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						DIKBUD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak Spesifik Disabilitas	35 jenis barang	157,496,660	35 jenis barang	157,496,660	
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						DINKES
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
					-						
Kebijakan II : Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.											
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan	Percepatan pembangunan fasilitas	Fasilitas kesehatan yang menyediakan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan	pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tidak Spesifik Disabilitas	7 Unit	#####			
4	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					DINKES	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas	30.004 Orang	98,705,460.00	30.004 Orang		103,640,733
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas	53.968 Orang	49,966,350.00	53.968 Orang		52,464,667
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas	274.104 Orang	90,371,816.25	274.104 Orang		94,890,407
5	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					DP3AP2KB	
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal						
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Dokumen	70,000,000	3 Dokumen		70,000,000
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
6	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					DINKES	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	10,745,756,400.00	1 Dokumen		11,283,044,220

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
7	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						DINKES
					Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas	67 Dokumen	102,125,000.00	67 Dokumen	107,231,250	

Tabel 3.10

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lebong Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tidak Spesifik Disabilitas					DUKCAPIL
					Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian DATABASE Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas					DUKCAPIL
					1 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 keg	50,000,000			DUKCAPIL
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan						DUKCAPIL
					1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas		69,999,828			DUKCAPIL
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tidak Spesifik Disabilitas					DUKCAPIL
					1 Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dok	60,209,955			DUKCAPIL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tidak Spesifik Disabilitas	1 dok	29,000,000			DUKCAPIL
				Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						DINSOS
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas		180,000,000		195,000,000	DINSOS
					1 Penyediaan Alat Bantu	Tidak Spesifik Disabilitas	20	30,000,000	30	65,000,000	DINSOS
					2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	15	15,000,000	15	15,000,000	DINSOS
					3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas	10	25,000,000	25	-	DINSOS
					4 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tidak Spesifik Disabilitas	8000	85,000,000	8,000	50,000,000	DINSOS
					5 Pemberian Layanan Kedaruratan	Tidak Spesifik Disabilitas	20	25,000,000	50	65,000,000	DINSOS
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk Penyandang Disabilitas di daerah	Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk						DUKCAPIL
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Kegiatan	75,000,000			DUKCAPIL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas		69,999,738			DUKCAPIL
					2 Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	29,899,792			DUKCAPIL
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas					DUKCAPIL
					1 penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantau an, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	20,000,000			DUKCAPIL
					Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas					DUKCAPIL
					1 Fasilitasi pendaftaran penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Kegiatan	178,998,250			DUKCAPIL
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						DINSOS

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas	8,000	85,000,000	8,000	50,000,000	DINSOS
					1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tidak Spesifik Disabilitas	8,000	85,000,000	8,000	50,000,000	DINSOS
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tidak Spesifik Disabilitas	0	-	1 dokumen	20,000,000	
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Penyusunan mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA
					Penyusunan perencanaan dan pendanaan						
					1 Pelaksanaan musrembang kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	81,499,392			BAPPEDA
					2 Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	19,999,831			BAPPEDA
					3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	14,999,561			BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					4 Anailis Kondisi Daerah , permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	349,999,958			BAPPEDA
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						BAPPEDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						BAPPEDA
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan	65,000,000			BAPPEDA
					2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan	70,000,000			BAPPEDA
					3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan	50,000,000			BAPPEDA
					4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	119,740,000			BAPPEDA
					5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan	100,000,000			BAPPEDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						BAPPEDA
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Dokumen	60,000,000			BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Laporan	44,999,516			BAPPEDA
					3Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tidak Spesifik Disabilitas	12 Laporan	45,000,000			BAPPEDA
					4Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Dokumen	79,999,991			BAPPEDA
					5Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Laporan	34,999,910			BAPPEDA
					6Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tidak Spesifik Disabilitas	6 Laporan	34,999,800			BAPPEDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						BAPPEDA
					1Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	85,199,934			BAPPEDA
					2Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	39,999,951			BAPPEDA
					3Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	60,199,844			BAPPEDA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	50,199,944			BAPPEDA
					5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	40,189,761			BAPPEDA
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						BKD
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						BKD
					1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas		150,000,000			BKD
					2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tidak Spesifik Disabilitas		150,000,000			BKD
					3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tidak Spesifik Disabilitas		350,000,000			BKD
					4 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tidak Spesifik Disabilitas		250,000,000			BKD
					5 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tidak Spesifik Disabilitas		100,000,000			BKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					6 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		150,000,000			BKD
					7 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					BKD
					8 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			BKD
					9 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			BKD
					10 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tidak Spesifik Disabilitas		75,000,000			BKD
					11 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		5,000,000,000			BKD
					12 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas		200,000,000			BKD
					13 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tidak Spesifik Disabilitas		100,000,000			BKD
					14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			BKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					15 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tidak Spesifik Disabilitas		30,000,000			BKD
					16 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			BKD
					17 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					BKD
					18 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		75,000,000			BKD
					## Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tidak Spesifik Disabilitas		75,000,000			BKD
					## Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		120,000,000			BKD
					## Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			BKD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					## Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		75,000,000			BKD
					## Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					BKD
					## Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tidak Spesifik Disabilitas		#####			BKD
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						PMD
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
					1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tidak Spesifik Disabilitas		949,995,600			PMD
					2 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Tidak Spesifik Disabilitas		75,000,000			PMD
					3 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tidak Spesifik Disabilitas		150,000,000			PMD
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						BKPSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah.	kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.	pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.							
					Pengembangan Kompetensi ASN						
					1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	182,250,000.00	BKPSDM
3	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.	Pengarusutamaan prinsip non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah.	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip non diskrimintaif terhadap penyandang disabilitas.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						DP3APPKB
					Pelembagaan Pengarusutamaan gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenanangan Kab/Kota						
					1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	85,000,000	Dokumen	80000000	DP3APPKB
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terwujudnya Kemandirian desa/kelurahan dalam menangani bencana						BPBD
					Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam						
					1 Pelatihan Kesiagaan dalam menghadapi bencana (simulasi)	Tidak Spesifik Disabilitas	Desa	75,000,000	Desa		BPBD
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyediaan Makanan	Tidak Spesifik Disabilitas	100 orang	100,000,000			DINSOS
					2 Penyediaan Sandang	Tidak Spesifik Disabilitas	45 orang	70,000,000			DINSOS
					3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tidak Spesifik Disabilitas	8 unit	80,000,000			DINSOS
					4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tidak Spesifik Disabilitas	70 orang	70,000,000			DINSOS
					5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Tidak Spesifik Disabilitas	30 orang	30,000,000			DINSOS
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					DINSOS
					1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas	10 kampung	50,000,000			DINSOS
					2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas	50 orang	150,000,000			DINSOS
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas	Tersedianya laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.							INSPEKTORAT
					Penyelenggarann pengawasan Internal						
					1 Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	140,000,000			INSPEKTORAT
					2 pengawasan keuangan pemerintah daeraah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	145,000,000			INSPEKTORAT

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					3 Review laporan kinerja	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	150,000,000			INSPEKTORAT
					4 Review laporan keuangan	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	460,000,000			INSPEKTORAT
					5 Pengawasan desa	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	125,000,000			INSPEKTORAT
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						PUPR
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas			#####		PUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						PUPR
					1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tidak Spesifik Disabilitas		700,000,000			PUPR
					2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Tidak Spesifik Disabilitas		8,800,000,000			PUPR

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						PUPR
					1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1,650,000,000			PUPR
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						PERKIM
					1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					PERKIM
					2 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas		14,999,660			PERKIM
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						PERKIM
					1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tidak Spesifik Disabilitas					PERKIM
					2 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tidak Spesifik Disabilitas		29,996,000			PERKIM
					3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tidak Spesifik Disabilitas					PERKIM
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						PUPRHUB

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
					1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			PUPRHUB
					2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		50,000,000			PUPRHUB
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta.	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						PUPRHUB
					1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		150,000,000			PUPRHUB
					2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas		300,000,000			PUPRHUB
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		100,000,000			PUPRHUB

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tidak Spesifik Disabilitas					KESBANGPOL
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	50,000,000	Dokumen	52,500,000	KESBANGPOL
					2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	600,000,000	Dokumen	630,000,000	KESBANGPOL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	300,000,000	Dokumen	315,000,000	KESBANGPOL
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
					1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	1.783.000.000		1.783.000.000	KESBANGPOL
					2 Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	148.000.000		148.000.000	KESBANGPOL
					3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	831,900,000		831,900,000	KESBANGPOL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.							KPU
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Pembangunan akses tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Tidak Spesifik Disabilitas		##### #			KPU
					Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	%				KPU
					Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Pen5rusunan Peraturan Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Sarana IT Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Pembentukan/ Seleksi Badan Adhoc	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU
					Honorarium Badan Adhoc	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan				KPU

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					Dukungan Operasional Badan Adhoc	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Persiapan Kampanye Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Pengelolaan Kampanye Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Evaluasi dan Laporan Kesiatan Kempanze Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					PenSaapan dal Pengelolaan Logistik Pemilu	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Pengelolaan Dokumentasi Losistik	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungal Suara	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penshitunsan Sua	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Evaluasi Pelaksanaam Pemungutan dan Penshitunsan Suara	Tidak Spesifik Disabilitas	Laporan					KPU
					Program Dukungan Manajemen	Tidak Spesifik Disabilitas	%	##### #				KPU
					Layanan Perkemtoran	Tidak Spesifik Disabilitas	Layanan					KPU
					Layanan Maneg'emen Keuangan	Tidak Spesifik Disabilitas	Layanan					KPU

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Layanan Perkeintoran	Tidak Spesifik Disabilitas	Layanan				KPU
					Lavanoan Data dan Informasi	Tidak Spesifik Disabilitas	Layanan				KPU
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						KPU / KESBANGPOL
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
					1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	277,300,000	Dokumen	277,300,000	KESBANGPOL
					2 Hibah Ormas	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	1,000,000,000	Dokumen	1,000,000,000	KESBANGPOL
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						SET DPRD
					Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD						SET DPRD
					1 Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	850,000,000	Dokumen	850,000,000	SET DPRD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pelaksanaan Reses	Tidak Spesifik Disabilitas	Dokumen	1,000,000,000	Dokumen	1,000,000,000	SET DPRD
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Spesifik Disabilitas					DINSOS
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Spesifik Disabilitas					DINSOS
					1 Penyediaan Permakanan	Spesifik Disabilitas	60 orang	25,000,000	60 orang		DINSOS
					2 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas	50 orang	50,000,000	50 orang		DINSOS
					3 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas	30 orang	60,000,000	50 orang		DINSOS
					4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Spesifik Disabilitas	50 anak terlantar	15,000,000			DINSOS
					5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Disabilitas	50 cacat & 65 anak panti	35,000,000			DINSOS
					6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Spesifik Disabilitas	150 peserta	35,000,000	150 peserta		DINSOS
					7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Spesifik Disabilitas	100 orang	25,000,000	100 orang		DINSOS

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						
					8 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Spesifik Disabilitas	320 penyandang cacat & 136 OJGD	22,000,000	320 penyandang cacat & 136 OJGD		DINSOS
					9 Pemberian Layanan Kedaruratan	Spesifik Disabilitas	100	80,000,000	100		DINSOS
					10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Spesifik Disabilitas	10	15,000,000	10		DINSOS
					11 Pemberian Layanan Rujukan	Spesifik Disabilitas	25	25,000,000	25		DINSOS
			Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tidak Spesifik Disabilitas					DISNAKER
					Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Unit	12,000,000	1 Unit	12,000,000	DISNAKER
					2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	3 Lembaga	11,000,000	3 Lembaga	11,000,000	DISNAKER
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif											
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor											
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L,	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tidak Spesifik Disabilitas					DISNAKER

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	kebutuhan penyandang disabilitas.	edukasi oleh pemda di seluruh sektor.							
			Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas					DISNAKER
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas	45 Orang	400,000,000	45 Orang	400,000,000	DISNAKER
					2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	4 Lembaga	200,000,000	4 Lembaga	200,000,000	DISNAKER
					3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Paket	1,200,000,000	1 Paket	1,200,000,000	DISNAKER
					Kegiataniatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi						
					1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	DISNAKER
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi											
3	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan	Tersedianya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						DISNAKER

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	bagi penyandang disabilitas.	kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta.							
					Kegiataniatan Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
					1 Pelayanan antar Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	3.300 Orang	35,000,000	3.300 Orang	35,000,000	DISNAKER
					2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	80 Orang	100,000,000	80 Orang	100,000,000	DISNAKER
					3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tidak Spesifik Disabilitas	12 Orang	50,000,000	12 Orang	50,000,000	DISNAKER
					4 Perluasan Kesempatan Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	40 Orang	50,000,000	40 Orang	50,000,000	DISNAKER
					Kegiataniatan Pengelolaan informasi pasar kerja						
					1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tidak Spesifik Disabilitas	12 Orang	50,000,000	12 Orang	50,000,000	DISNAKER
					2 Job Fair/Bursa Kerja	Tidak Spesifik Disabilitas	5 Orang	60,000,000	5 Orang	60,000,000	DISNAKER
					3 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tidak Spesifik Disabilitas	12 Orang	50,000,000	12 Orang	50,000,000	DISNAKER
					Kegiataniatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah/ Kabupaten						
					1 Koordinasi dan Sinkronisasi pengesahan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1 Kegiatan	24,000,000	1 Kegiatan	24,000,000	DISNAKER

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						DISNAKER
					Kegiataniatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk mempunyai wilayah kerja lebih dari (satu) Kabupaten/ Kota						
					1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Laporan	96,000,000	1 Laporan	96,000,000	DISNAKER
					Kegiataniatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						
					1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Keg	20,000,000	1 Keg	20,000,000	DISNAKER
					Kegiataniatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	1 Perkara	20,000,000	1 Perkara	20,000,000	DISNAKER
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
					1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas					DIKBUD
					2 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas		20,000,000			DIKBUD
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas											
2	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel non diskriminasi dan inklusifitas bagi	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Seluruh Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pendidikan formal.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.										
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						DIKBUD
					1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tidak Spesifik Disabilitas		350,000,000			DIKBUD
					2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas		20,000,000			DIKBUD
					3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas		20,000,000			DIKBUD
					4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas		215,000,000			DIKBUD
					5 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		125,000,000			DIKBUD
					6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		130,000,000			DIKBUD
					7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		200,000,000			DIKBUD
					8 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Tidak Spesifik Disabilitas		190,000,000			DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas					DIKBUD
					1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas		22,500,000			DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas		172,500,000			DIKBUD
					3 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		65,000,000			DIKBUD
					4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		25,000,000			DIKBUD
					5 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		200,000,000			DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tidak Spesifik Disabilitas					DIKBUD
					1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas		20,000,000			DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas		100,000,000			DIKBUD
					3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas		25,000,000			DIKBUD
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembagada n pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga,da n Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitasKementerian/Le mbaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						PARPORA

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						PARPORA
					1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					PARPORA
					2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas					PARPORA
					3 Seleksi Atlet Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		74,999,730			PARPORA
					4 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		419,848,700			PARPORA
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas		17,998,400		Rp150,000,000	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas		19,999,617			DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Tidak Spesifik Disabilitas		38,999,633			DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
					5 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
					6 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES/ RSUD
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas					
					2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						
					3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas		57,433,000			RSUD
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas.	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.										
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas		177,935,440			DINKES
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES/ RSUD
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas		17,998,600		100,000,000	DINKES/ RSUD
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES/ RSUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas		217,464,000			DINKES/ RSUD
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas		34,997,600			DINKES/ RSUD
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas		33,997,800		Rp100,000,000	DINKES/ RSUD
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas		17,999,577		Rp100,000,000	DINKES/ RSUD
					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas		19,999,947		Rp150,000,000	DINKES/ RSUD
					5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar	Tidak Spesifik Disabilitas		17,998,600		Rp149,999,650	DINKES/ RSUD
					6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas		17,998,400		Rp100,000,000	DINKES/ RSUD
					7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Lansia	Tidak Spesifik Disabilitas		19,998,645		Rp150,000,000	DINKES/ RSUD
					8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Tidak Spesifik Disabilitas		17,998,680			DINKES/ RSUD
					9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang terduga Tuberkulosis	Tidak Spesifik Disabilitas		18,999,713			DINKES/ RSUD
					10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Tidak Spesifik Disabilitas		18,999,639			DINKES/ RSUD
					11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Tidak Spesifik Disabilitas		38,999,633			DINKES/ RSUD
3	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas.	pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.		kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						DINSOS
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						
					1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Tidak Spesifik Disabilitas	10 orang bantuan hukum/tim pendamping dan 107 ABH	22,000,000			DINSOS
					2 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Tidak Spesifik Disabilitas	50 anak	15,000,000			DINSOS
					3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Tidak Spesifik Disabilitas	107	20,000,000			DINSOS
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Ppendataan dan pengelolaan DTKS	200,000,000			DINSOS

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	bansos orang sakit	500,000,000		verval 46,986 keluarga \$ bansos orang sakit	DINSOS
					3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	30 keluarga	60,000,000		30 keluarga	DINSOS
					4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas	20 orang	70,000,000		20 orang	DINSOS
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES / DINSOS
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas		#####		#####	DINKES
Kebijakan IV.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tidak Spesifik Disabilitas					DINKES
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas				30,000,000	DINKES

Tabel 3.11

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
					1 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifikasi Disabilitas (tercatat penyandang disabilitas Kabupaten)	11 kecamatan	Rp 30,000,000	1 Dokumen	Rp 33,000,000	DUKCAPIL
		Tersedianya data pilah nasional tahunan penyandang disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk penyandang disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk penyandang disabilitas di daerah.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Data Fakir Miskin termasuk Disabilitas)	109571 Orang	Rp. 79.275.200	14.000 Orang	Rp. 79.275.200	Dinas Sosial
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah penyandang disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.									
					Kegiatan: Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis						
					1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas,anak terlantar,masyarakat miskin)kepada penyandang Disabilitas)	22 Orang	Rp. 78.711.000	30 Orang	Rp. 66.821.000	Dinas Sosial
					2 Penyediaan Permakanan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial)	120 Orang	RP. 90.812.800	200 Orang	Rp. 85.812.000	Dinas Sosial
					3 Pemberian Layanan Kedaruratan	Spesifikasi Disabilitas (adanya layanan Respon Kasus,Home Visit dan evakuasi	31 Orang	Rp. 53.551.000	50 Orang	Rp. 53.551.000	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Disabilitas mental ke RSUD dan RSJ Bengkulu dan ke Sentra Dharma Guna, Penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga)					
					4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat kruk, tongkat piramid, manula walker, alat bantu dengar, segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)	-	-	50 Orang	Rp. 25.843,400	Dinas Sosial
Kebijakan 2: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggran	Tersedianya PeraturanBupati/Kebijaka n yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penyusunan peraturan Bupati/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Pemerintah Daerah memiliki Perbup/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH						
					Pembentukan Peraturan Bupati						
					1 Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Rancangan Peraturan Bupati yang sudah disahkan menjadi	-	-	3 Dokumen	Rp 50,000,000	Sekretariat Daerah

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							PERBUP salah satunya Perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (inisatif))					
2	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
					1 Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 150,000,000	BAPPPEDA	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Penyusunan modul/ kurikulum dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
					1 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya kerja sama pelaksanaan diklat ASN Diasabilitas)	1 Dokumen	Rp 45,000,000	1 Dokumen	Rp 55,483,000	BKDSDM
					2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Pendidikan lanjutan bagi ASN disabilitas)	-	-	5 Orang	Rp 75,000,000	BKDSDM
					PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKHNIS						
					1 Penyusunan Kebijakan Tekhnis dan Rencana Pegenbangan Kompetensi Tekhnis Umum Inti dan Pilihan Bagi jabatan admnstrasi Penyelenggaraan umum, inti dan pilihan bagijabatan adminstrasi	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Pengembangan dalam Kompetensi Tekhnis umum inti dan pilihan bagi jabatan Adminstrasididikan	1 laporan	-	1 laporan	Rp 30,000,000	BKDSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
						Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	lanjutan bagi ASN disabilitas)					
				Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajarial dan Fungsional							
					1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimmpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Disabilitas)	1 Laporan	Rp 1,509,658,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	BKDSDM	
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban untuk disabilitas)	20 orang	Rp 47,542,760	20 orang	Rp 47,542,760	BPBD	
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017).							
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						
					1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tidak Speseifikasi Disabilitas (Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas)	2 Kegiatan	Rp 208,172,200	2 Kegiatan	Rp 208,172,200	Inspektorat
Kebijakan 2: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Pembangunan, pemanfaatan bangunan untuk penyandang disabilitas	3 Dokumen	Rp 5,045,500,000	3 Dokumen	Rp 5,045,500,000	DPUPR
Kebijakan 3: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
					1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal/ TATRALOK ikut mempertimbangkan penyandang disabilitas)	1 Dokumen	59,000,000	2 Dokumen	Rp 600,000,000	Dinas Perhubungan
Kebijakan 4: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi	Penyusunan pedoman layanan komunikasi	Tersedianya pedoman layanan komunikasi	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.							
					Kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
					2 Pengelolaan media dan komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan media dan komunikasi publik terhadap kebutuhan penyandang disabilitas)	50 Dokumen	Rp 151,857,700	1 dokumen	Rp 100,000,000	Dinaskominfo
					3 Pelayanan informasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Tahun 2023 akan menyelenggarakan Sosialisasi yang 20% pesertanya adalah Penyandang disabilitas)	70 dokumen	Rp 22,045,800	12 dokumen	Rp 125,000,000	Dinaskominfo
					4 Layanan hubungan media	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas)	120 layanan	Rp 1,200,681,000	53 layanan	Rp 446,280,000	Dinaskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daderah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Akan Memberikan Himbauan kepada Partai politik untuk dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam	11 Laporan	Rp 2,202,395,100	11 Laporan	Rp 2,500,000,000	Kesbangpol

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	keanggotaan /kepengurusan partai)					
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daderah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Akan Mengikutsertakan penyandang disabilitas sebanyak 15% dari jumlah peserta)	-	-	2 Dokumen	Rp 34,000,000	Kesbangpol
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Disabilitas yang terakreditasi.	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Akan Memberikan Himbauan kepada Partai politik untuk dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam keanggotaan /kepengurusan partai)	-	-	2 Laporan	Rp 120,000,000	Kesbangpol
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	dan rehabilitasi berbasis masyarakat.		berbasis masyarakat.	masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.							
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						
					1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas,anak terlantar,masyarakat miskin)	22 Orang	Rp. 78.711.000	30 Orang	Rp. 66.821.000	Dinas Sosial
					2 Penyediaan Permakanan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial)	120 Orang	RP. 90.812.800	200 Orang	Rp. 85.812.000	Dinas Sosial
					3 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas (Adanya bantuan pakaian, perlengkapan lainnya)	-	-	-	-	Dinas Sosial
					4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat	-	-	50 Orang	Rp. 25.843.400	Dinas Sosial

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						kruk, tongkat piramid, manula walker, alat bantu dengar, segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)					
					5 Pemberian Layanan Kedaruratan	Spesifikasi Disabilitas (adanya layanan Respon Kasus,Home Visit dan evakuasi Disabilitas mental ke RSUD dan RSJ Bengkulu dan ke Sentra Dharma Guna, Penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga)	31 Orang	Rp. 53.551.000	50 Orang	Rp. 53.551.000	Dinas Sosial
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi											
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
					1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Perencanaan Tenaga kerja Makro)	1 dokumen	Rp 28,383,200	1 Dokumen	Rp 31,221,520	Nakertrans

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2	melaksanakan Pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan produk UKM bagi penyandang disabilitas	tersedianya akses bagi penyandang disabilitas unuk pembuatan produk UKM	kerjasama pemerintah dengan pihak lain dalam pemberdayaan Usaha Mikro bagi penyandang disabilitas	meningkatnya usaha dan kualitas usah mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro						Perindag
					Kegiatan ; Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan Kemitraan KemudahanPerizinan ,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.						
					Sub Kegiatan ; Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam PemberdayaanUsaha Mikro.	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya dukungan Pemerintah dan Pihak lain dalam pemberdayaan usaha mikro bagi penyandang disabilitas)	1 Dokumen	Rp 335,900,000	1 Dokumen	Rp 335,900,000	
4	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
					Kegiatan : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 MENINGKATNYA KUALITAS BUMD DAN BLUD, TERKENDALINYA INVLASI DAERAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS UMKM						
					Sosialisasi dan Pembinaan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memfasilitasi Sosialisasi dan pembinaan BUMD dan BLUD untuk terkendalnya Inflasi daerah dan disabilitas)	3 laporan	Rp 100,000,000	3 laporan	Rp 100,000,000	BAG. PEREKONOMIA N
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Sekolah	170 Satuan Pendidikan	Rp 193,543,280	170 Satuan Pendidikan	Rp 118,545,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						inklusif penyandang disabilitas)					
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	10 Orang	Rp 35,000,000	10 Orang	Rp 35,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	30 Satuan Pendidikan	Rp 155,821,200	30 Satuan Pendidikan	Rp 86,047,000	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	10 Orang	Rp 50,000,000	10 Orang	Rp 50,000,000	DIKBUD
					3 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas (Inklusif terhadap disabilitas melalui Platform Merdeka Mengajar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas)	-	-	100 Orang	Rp 100,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan	30 PAUD	Rp 100,000,000	30 PAUD	Rp 100,000,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)					
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	10 Orang	Rp 163,166,500	10 Orang	Rp 70,000,000	DIKBUD
Kebijakan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	10 Orang	Rp 35,000,000	10 Orang	Rp 35,000,000	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru	10 Orang	Rp 50,000,000	10 Orang	Rp 50,000,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)					
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	10 Orang	Rp 163,166,500	10 Orang	Rp 70,000,000	DIKBUD
Kebijakan 3. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota	-	-	6 Orang	65,000,000	Parpora

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)					
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					2 Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	12 dokumen	Rp 1,087,215,650	12 dokumen	Rp 149,999,900	DINKES
					4 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai Penyakit Menular dan Tidak Menular)	12 dokumen	Rp 1,087,215,650	12 dokumen	Rp 149,999,900	DINKES
Kebijakan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya keterlibatan Disabilitas dalam akreditasi fasilitas pelayanan)	100%	Rp 607,464,300	100%	Rp 728,957,160	DINKES
					2 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	12 dokumen	Rp 1,087,215,650	12 dokumen	Rp 149,999,900	DINKES
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyandang Disabilitas)	3269 orang	Rp 418,962,400	2866 orang	Rp 879,821,040	DINKES
					2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (memberikan Pelayanann Kesehatan Ibu Bersalin Penyandang Disabilitas)	3121 orang	Rp 977,857,720	2868 orang	Rp 1,075,643,492	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir penyandang Disabilitas)	2950 orang	Rp 766,361,000	2954 orang	Rp 190,000,000	DINKES
3					4 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Penyandang Disabilitas)	13766 orang	Rp 78,155,100	8724 orang	Rp 85,970,610	DINKES
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	12 dokumen	Rp 1,087,215,650	12 dokumen	Rp 149,999,900	DINKES
Kebijakan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	100%	Rp 4,040,956,300	100%	Rp 4,849,147,560	DINKES
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	100%	Rp 4,040,956,300	100%	Rp 4,849,147,560	DINKES
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	100%	Rp 4,040,956,300	100%	Rp 4,849,147,560	DINKES
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		-				

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.	bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	100%	Rp 4,040,956,300	100%	Rp 4,849,147,560	DINKES
Kebijakan 4.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan '	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi program GERMAS ke kementerian/ lembaga, pemerintah daerah,	11 dokumen	Rp 84,677,200	11 dokumen	Rp 88,911,069	DINKES

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						dan swasta secara rutin kepada Penyandang Disabilitas)					
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-				
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi Kemitran dan Pemberdayaan Msyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Dalam Sosilaisasi Program Germas)	12 dokumen	Rp 547,655,480	12 dokumen	Rp 550,393,758	DINKES

Tabel 3.12

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2024

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
				Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk	1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifikasi Disabilitas (tercatat penyandang disabilitas Kabupaten)	1 Dokumen	40,522,000	1 Dokumen	Rp 35,132,000	DUKCAPIL
		Tersedianya data pilah nasional tahunan penyandang disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk penyandang disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk penyandang disabilitas di daerah.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	1 Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Data Fakir Miskin termasuk Disabilitas)	50 Keluarga	Rp 68,375,000	50 Keluarga	Rp 102,500,000	Dinas Sosial
				Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	2 Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Data Fakir Miskin termasuk Disabilitas)	50 Keluarga	Rp 160,200,000	50 Keluarga	Rp 136,000,000	Dinas Sosial
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah penyandang disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan stndar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1 Penyediaan Permakanan	Spesifik Disabilitas	50 Orang	26,165,000	50 Orang	39,170,000	Dinas Sosial
				Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenang kabupaten/kota	2 Penyedian Sandang	Spesifik Disabilitas	30 Orang	23,900,000	30 Orang	Rp 23,270,000	Dinas Sosial
				Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu praga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	3 Penyediaan Alat Bantu	Spesifik Disabilitas	15 Orang	23,040,000	15 Orang	Rp 77,355,000	Dinas Sosial

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah Peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anjutan usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	4 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Spesifik Disabilitas	20 Orang	25,314,000	-	-	Dinas Sosial
Kebijakan 2: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Peraturan Daerah/Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Perda/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
					Pembentukan Peraturan Daerah DAN Peraturan DPRD						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Raperda yang sudah disahkan menjadi PERDA salah satunya Perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (inisatif))	10 Dokumen	Rp 2,835,220,000	10 Dokumen	Rp 1,082,262,000	Sekretariat DPRD
2	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
				Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	1 Dokumen	Rp 155,000,000			BAPPPEDA
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Penyusunan modul/ kurikulum dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aperatur						
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aperatur	1 Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aperatur	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya kurikulum dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil)	1 Dokumen	Rp 83,500,000	3 Dokumen	Rp 107,050,000	BKDSDM

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajarial dan Fungsional						
				Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional yang disusun	1 Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Disabilitas)	10 Orang	Rp 374,573,000	2 Dokumen	405,800,000	BKDSDM
2	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Pengarusutamaan prinsip non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah.	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip non diskrimintaif terhadap penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
					Kegiatan ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Mengumpulkan data, Menyusun dan menetapkan SPM untuk menjamin hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat termasuk disabilitas)	7 Dokumen	Rp 588,398,000	7 Dokumen	Rp 500,865,000	BAG. PEMERINTAHAN
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017).	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						
				Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Tidak Speseifikasi Disabilitas (Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	6 Dokumen	Rp 110,350,000	4 Perangkat Daerah	Rp 202,852,000	Inspektorat

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas)					
Kebijakan 2: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang Terlayanani Melalui Optimalisasi SPALD-T setelah Permukiman	1 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kemiskinan	Tidak Spesifik disabilitas (Adanya penyediaan permukiman yang layak dan mudah diakses oeleh penyandang disabilitas)	25 Rumah Tangga	Rp 505,480,000	0	Rp -	DPUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	(IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung						
					1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Pembangunan, pemanfaatan bangunan untuk penyanggah disabilitas)	14 Dokumen	#####	0	0	DPUPR
					2 Pembangunan, Pemanfaatan, Kelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Pembangunan, pemanfaatan bangunan untuk penyanggah disabilitas)	0	0	5 Dokumen	Rp 3,243,240,650	DPUPR
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan SPAM Berbasis masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan air minum)	25 SR	483,600,000	0	0	DPUPR
					2 Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem	0	0	100 SR	5,755,759,250	DPUPR

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Penyediaan air minum)					
Kebijakan 3: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal/ TATRALOK ikut mempertimbangkan penyandang disabilitas)	1 Laporan	115,955,000	2 Laporan	Rp 120,804,000	Dinas Perhubungan
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta.	yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.							
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
				Jumlah Rambu-rambu yang di butuhkan	1 Penyedian perlengkapan jalan di jalan kabupaten bengkulu tengah	Tidak Spesifik Disabilitas (Dalam proses rehabilitasi dan pemeliharaan turut mempertimbang kan rehabilitasi yang mendukung pengguna penyandang disabilitas)	—	—	0	Rp -	Dinas Perhubungan
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan	2 Orang	—	4 Orang	Rp 18,000,000	Dinas Perhubungan

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				pendidikan dan pelatihan		kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal/ TATRALOK ikut mempertimbangkan penyandang disabilitas)					
Kebijakan 4: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					Kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan media dan komunikasi publik	1 Pengelolaan media dan komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan media dan komunikasi publik terhadap kebutuhan	–	–	–	–	Dinaskominfo

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						penyandang disabilitas)					
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2 Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas)	3 Dokumen	Rp 1,576,507,000	1 Dokumen	Rp 1,153,140,000	Dinaskominfo
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
					PENGELOLAAN INFORMASI DAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA						
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2 Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap	3 Dokumen	Rp 1,576,507,000	1 Dokumen	Rp 1,153,140,000	Diskominfo

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						kebutuhan Penyandang Disabilitas)					
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pengikatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik						
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala	1 Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		8 dokumen	Rp 50,000,000	2 Dokumen	Rp 166,230,000	Kesbangpol

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah							
				Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	2 Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.		8 Partai politik	Rp 14,510,064,120	60 Orang	Rp 24,742,907,180	Kesbangpol
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
				Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembawuran kebangsaan,	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembawuran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		-	-	30 Orang	Rp 355,280,000	Kesbangpol

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan							
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Dalam Pelaksanaan Sosialisasi akan diundang Penyandang Disabilitas sebanyak 20 % dari 100 orang peserta)	-	-	-	-	Kesbangpol
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
				Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Dalam pelaksanaan Monitoring akan memberikan himbauan untuk mempersiapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas)	-	-	1 Laporan	Rp 68,550,000	Kesbangpol
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
				termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.								
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							
					1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar serta gelandangan pengemis	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang disabilitas)	20 Orang	Rp 25,314,000	-	-		Dinas Sosial
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten kota	2 Penyediaan Permakanan	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Makanan untuk lansia dan disabilitas)	50 Orang	26,165,000	50 Orang	39,170,000		Dinas Sosial
				Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenangan kabbupaten kota	3 Penyediaan Sandang	Spesifik Disabilitas (Adanya bantuan pakaian, perlengkapan lainnya)	30 Orang	23,900,000	30 Orang	Rp 23,270,000		Dinas Sosial
				Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten kota	4 Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat kruk, tongkat piramid, manula walker, alat bantu dengar,	15 Orang	23,040,000	15 Orang	Rp 77,355,000		Dinas Sosial

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							segalanya jenis bantuan yang dibutuhkan)					
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
Kebijakan 1. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor												
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Tidak Spesifik Disabilitas (Peserta akan melibatkan penyandang disabilitas)	600 Orang	182,475,000	60 Orang	Rp 3,600,000	DISPERINAKER
Kebijakan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi												
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan,	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari antara lain proses pemagangan,	Terbitnya Surat Menteri PANRB ke LAN tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai bagian dari Implementasi Kebijakan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas							
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
					1 Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Penyusunan panduan dan pengembangan kompetensi termasuk penyandang disabilitas)	10 Orang	Rp 374,573,000	2 Dokumen	405,800,000	BKDSDM
				Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian ASN						
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 Pengelolaan Sitem informasi kepegawaian	Tidak Spesifikasi Disabilitas (memberikan kesempatan bagi ASN	2 Dokumen	Rp 374,969,100	1 Dokumen	Rp 195,598,000	BKDSDM

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						penyangang disabilitas)					
				Terbitnya Permen PANRB Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (di dalamnya mengatur terkait formasi khusus Disabilitas).	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian ASN						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (memberikan kesempatan bagi ASN penyangang disabilitas)	–	–	–	–	BKDSDM
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyangang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
					1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Perencanaan	–	–	–	–	DISPERINAKER

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Tenaga kerja Makro)					
					2 Fasilitasi penyusunan tenaga kerja mikro	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Perencanaan Tenaga kerja Mikro)	–	–	–	–	DISPERINAKER
3	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota.	Tersedianya 2% formasi bagi penyandang disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing Dinas Pemda	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Formasi Penyandang disabilitas)	–	–	–	–	BKDSDM
4	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas							
					PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
				Jumlah laporan hasil pengendalian distribusi perekonomian	1 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memfasilitasi pertemuan forum CSR untuk membahas penggunaan dana tanggungjawab, sosial dan lingkungan perusahaan bagi penyandang disabilitas)	2 Laporan	Rp 274,100,000	2 Laporan	Rp 236,420,000	BAG. PEREKONOMIAN
		Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas	Jumlah BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/ TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN							
					1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tidak spesifikasi Disabilitas (Memfasilitasi pertemuan forum CSR untuk membahas penggunaan dana tanggungjawab, sosial dan lingkungan perusahaan bagi penyandang disabilitas)	2 Laporan	Rp 274,100,000	2 Laporan	Rp 236,420,000	BAG. PEREKONOMIAN
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/ lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (di dalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D).	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian							

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tidak spesifikasi Disabilitas (Memberikan kesempatan bagi CASN penyandang disabilitas)	–	–	–	–	BKDSDM
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	93 Satuan Pendidikan	Rp 35,000,000	93 Satuan Pendidikan	Rp 73,885,000	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran	6 Orang	Rp 599,432,000	7 Orang	Rp 165,835,000	DIKBUD

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Berdiferensiasi penyandang disabilitas)					
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
				Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/ lomba akademik dan non akademik	1 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	10 Siswa	Rp 50,000,000	7 Siswa	Rp 50,000,000	DIKBUD
				Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemebrian promosi peningkatan kompetensi dan kualifuikasi	2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	6 Orang	Rp 223,700,000	5 Orang	Rp 92,668,000	DIKBUD
					3 Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Inklusif terhadap disabilitas melalui Platform Merdeka Mengajar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas)	-	202,159,300	-	-	DIKBUD
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
				Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan	1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya	125 PAUD	Rp 70,500,000	3 PAUD	Rp 87,620,000	DIKBUD

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				kelembagaan dan manajemen		pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)					
				Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/ golongan, pemebrian promosi peningkatan kompetensi dan kualifuikasi	2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	5 Orang	Rp 10,800,000	8 Orang	Rp 80,586,000	DIKBUD
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memberikan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah Penyandang Disabilitas)	4410 Orang	Rp 38,985,000	3937 Orang	Rp 44,000,000	DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	61108 Orang	Rp 38,985,000	2262 Orang	Rp 41,600,000	DINKES
				Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut usia	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Lanjut Penyandang Disabilitas)	15000 Orang	Rp 9,600,000	566 Orang	Rp 11,550,000	DINKES
				Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai Penyakit Menular dan Tidak Menular)	12 Dokumen	Rp 865,338,750	12 Dokumen	Rp 48,050,000	DINKES
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya	23 Unit	Rp 408,940,000	Rp -	Rp -	DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
				pengukuran indikator nasional mutu (IMM)		keterlibatan Disabilitas dalam akreditasi fasilitas pelayanan)					
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	28 Unit	Rp 4,164,231,000	2 Unit	Rp 1,202,103,486	RSUD
					Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	Operasional pelayanan rumah sakit		1 Tahun	Rp 7,017,443,368	1 Tahun	Rp 5,293,210,078	RSUD
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kabupaten bengkulu tengah	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota		1 Tahun	Rp 6,373,420,840	1 Tahun	Rp 11,406,876,922	RSUD

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
				Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	61108 Orang	Rp 38,985,000	2262 Orang	Rp 41,600,000	DINKES
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Julam ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyadang Disabilitas)	2536 Orang	Rp 43,450,000	2536 Orang	Rp 21,915,000	DINKES
				Julam ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (memberikan Pelayanann Kesehatan Ibu Bersalin Penyandang Disabilitas)	2421 Orang	Rp 35,050,000	2421 Orang	Rp 35,550,000	DINKES
				Julam bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir penyandangang Disabilitas)	2305 Orang	Rp 6,600,000	2096 Orang	Rp 58,995,000	DINKES
3				Julam balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Penyandang Disabilitas)	12071 Orang	Rp 36,750,000	693 Orang	Rp 72,000,000	DINKES
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas.	kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Penyandang Disabilitas.	hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	61108 Orang	Rp 38,985,000	2262 Orang	Rp 41,600,000	DINKES
Kebijakan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah dokumen hasil pengolahan jaminan kesehatan masyarakat	1 Pengelolaan Pelayanan Jaminann Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan	3 Dokumen	Rp 8,115,546,300	1 Dokumen	Rp 10,183,630,600	DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Kesehatan Nasional)					
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
				Jumlah dokumen hasil pengolahan jaminan kesehatan masyarakat	1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	3 Dokumen	Rp 8,115,546,300	1 Dokumen	Rp 10,183,630,600	DINKES
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
				Jumlah dokumen hasil pengolahan jaminan kesehatan masyarakat	1 Pengelolaan Pelayanan Jaminnan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang	3 Dokumen	Rp 8,115,546,300	1 Dokumen	Rp 10,183,630,600	DINKES

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)					
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
				Jumlah dokumen hasil pengolahan jaminan kesehatan masyarakat	1 Pengelolaan Pelayanan Jaminann Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	3 Dokumen	Rp 8,115,546,300	1 Dokumen	Rp 10,183,630,600	DINKES
Kebijakan 4.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No .	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
				Jumlah dokumen hasil pengolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan '	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi program GERMAS ke kementerian/lem baga, pemerintah daerah, dan swasta secara rutin kepada Penyandang Disabilitas)	5 Dokumen	Rp 530,030,000	1 Dokumen	Rp 373,000,000	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-				
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi Kemitran dan Pemberdayaan Msyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Dalam Sosilaisasi Program Germas)	4 Dokumen	Rp 36,680,000	4 Dokumen	Rp 42,000,000	DINKES

Tabel 3.13

Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Mukokmuko Tahun 2023-2024

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											
1	Menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi data kependudukan bagi penyandaqng disabil;itas	Tersedianya informasi dan administrasi data kependudukan bagi penyandang disabilitas di tingkat pusat dan daerah.	Pengelolaan dan Penyusunan informasi dan administrasi data kependudukan bagi penyandang disabilitas di tingkat pusat dan daerah.	Tersedianya sistem informasi admistrasi kependudukan Penyandang Disabilitas di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian						
					1 Kerja Sama Pemanfaatan Data	Tidak Spesifikasi Disabilitas (tercatat penyandang disabilitas Kabupaten)	4 Dokumen	Rp 66,045,750	4 Dokumen	Rp 35,000,000	DUKCAPIL
		Tersedianya data pilah nasional tahunan penyandang disabilitas	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk penyandang disabilitas	Terselenggaranya Pendataan dan pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk penyandang disabilitas di daerah.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Data Fakir Miskin termasuk Disabilitas)	55000 Jiwa	Rp 109,445,300	55000 Jiwa	Rp -	DINAS SOSIAL
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah penyandang disabilitas.	Penyusunan laporan hasil Pengelolaan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil Pengelolaan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas oleh perangkat daerah.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.									
					Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial						
					1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar serta gelandangan pengemis	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas)	15 Orang	Rp 29,999,940	15 Orang	Rp 15,000,000	DINAS SOSIAL
					2 Pemberian Layanan Kedaruratan	Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas)	21 Orang	Rp 114,999,940	10 Orang	Rp 20,000,000	DINAS SOSIAL
					3 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Spesifik Disabilitas (Adanya layanan Sosial pengaduan dan pengaduan kepada penyandang Disabilitas)	1500	Rp 34,999,560	0	Rp -	DINAS SOSIAL
					4 Pelayanan Penelusuran Keluarga	Spesifikasi Disabilitas (Adanya layanan penelusuran keluarga untuk penyandang Disabilitas)	10 Orang	Rp 24,999,840	5 Orang	Rp 10,000,000	DINAS SOSIAL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 2: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahunan.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
					1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya matriks pembangunan inklusif disabilitas)	1 Dokumen	Rp 209,956,000	1 Dokumen		BAPPELITBANDA
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan peraturan perundangan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
	Sipil Negara K/L dan Pemerintah Daerah.		pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.								
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
					1 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya sosialisasi dan pelatihan tentang peraturan perundangan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil)	100 Orang	Rp 10,000,000	100 Orang	Rp 10,000,000	BKDSDM	
					2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Pegawai disabilitas yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan)	1 orang	Rp 10,000,000	1 orang	Rp 10,000,000	BKDSDM	
				Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
					Pengembangan Kompetensi ASN							
					1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas (Program pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara Disabilitas)	12 Orang	Rp 200,000,000	12 Orang	Rp 200,000,000	BKDSDM	
		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan	Asistensi dan Supervisi Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Standar Pelayanan Minimal.									
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
					1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan peralatan penanggulangan bencana untuk disabilitas)	10 Unit	Rp 50,000,000	10 Unit	Rp 50,000,000	BPBD
2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	Evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						
					1 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Tidak Speseifikasi Disabilitas (pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas)	4 Kegiatan	Rp 60,000,000	4 Kegiatan	Rp 60,000,000	INSFEKTORAT
Kebijakan 2: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab	
							2023		2024			
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tidak Spesifik Disabilitas (Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan air minum kawasan perkotaan)	1,3 Liter/Detik	Rp 250,000,000	1,3 Liter/Detik	Rp 250,000,000	PUPR	
					2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Membantu dan mempermudah penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Air minum yang layak di kawasan perdesaan)	1500 SR	Rp 250,000,000	1500 SR	Rp 250,000,000	PUPR	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
					1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Pembangunan, pengembangan dan kawasan pemukiman untuk penyandang disabilitas	3 Sistem Jaringan	#####	3 Sistem Jaringan	#####	PUPR	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
					1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Tidak Spesifik Disabilitas (adanya Taman Keanekaragaman Hayati	0,3 Ha	Rp 500,000,000	0,3 Ha	Rp 500,000,000	PUPR	

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
						Lainnya bagi penyandang disabilitas)					
					2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Tidak Spesifik Disabilitas (Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati disabilitas)	3 Unit	Rp 300,000,000	1 Unit	Rp 100,000,000	PUPR
					3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyandang Disabilitas)	0,25 Ha	Rp 350,000,000	0,25 Ha	Rp 350,000,000	PUPR
Kebijakan 3: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
					1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyusunan pengembangan kebijakan dan Standar operasional layanan transportasi darat yang tertuang dalam rancangan Tataran Transportasi Lokal yang mempertimbangkan keberadaan penyandang disabilitas)	35 Unit	#####	35 Unit	Rp 150,000,000	PERHUBUNGAN
					2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan yang mempertimbangkan keberadaan penyandang disabilitas)	102 Unit	#####	102 Unit	Rp 150,000,000	PERHUBUNGAN

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta.	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
					1 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tidak Spesifik Disabilitas (Dalam proses rehabilitasi dan pemeliharaan turut mempertimbangkan rehabilitasi yang mendukung pengguna penyandang disabilitas)	10 Unit	Rp 220,000,000	10 Unit	Rp 310,000,000	PERHUBUNGAN
Kebijakan 4: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Program Informasi dan Komunikasi Publik						
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Peningkatan Opini dan aspirasi publik terhadap penyandang disabilitas)	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	Rp 30,000,000	Dinaskominfo

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					2 Layanan Hubungan Media	Tidak Spesifik Disabilitas (Layanan media dan komunikasi publik terhadap kebutuhan penyandang disabilitas)	703 Layanan	575000000	703 Layanan	Rp 575,000,000	Dinaskominfo
					3 Pelayanan Informasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Ketersediaan Informasi Publik yang dapat diakses Penyandang disabilitas)	42 Dokumen	Rp 100,000,000	42 Dokumen	Rp 100,000,000	Dinaskominfo
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.	Program Informasi dan Komunikasi Publik						
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Tidak Spesifik Disabilitas (Melaksanakan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi sistem teknologi informasi publik bagi penyandang disabilitas)	100 Orang	100000000	100 Orang	Rp 145,000,000	DISKOMINFO
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daderah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Akan Memberikan Himbauan kepada Partai politik untuk dapat memberikan ruang partisipasi dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam keanggotaan /kepengurusan partai)	2 Dokumen	Rp 65,900,060	2 Dokumen	Rp 70,999,660	KESBANGPOL
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Dalam Pelaksanaan Sosialisasi akan memberikan ruang partisipasi dan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas sebagai peserta)	11 Orang	Rp 550,835,285	11 Orang	Rp 550,835,285	KESBANGPOL
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
					Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial						
					1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar serta gelandangan pengemis	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya bimbingan Sosial kepada penyandang Disabilitas)	15 Orang	Rp 29,999,940	15 Orang	Rp 15,000,000	DINAS SOSIAL
					2 Pemberian Layanan Rujukan	Spesifikasi Disabilitas (adanya layanan Rujukan	15 Orang	Rp 45,049,780	10 Orang	Rp 20,000,000	DINAS SOSIAL

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
								2023		2024		
								Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
							Disabilitas mental ke RSJ)					
					4	Penyediaan Alat Bantu	Spesifikasi Disabilitas (Adanya Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dan jenis alat bantuan yang dibutuhkan)	22 Orang	Rp 69,999,920	15 Orang	Rp 40,000,000	DINAS SOSIAL
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas												
Kebijakan 1. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor												
1	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi ketenaga kerjaan disabilitas berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis Kompetensi	Pengembangan dan peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi bagi pemberi layanan yang mengakomodasi pencari kerja	Terlaksana dan Tersedianya tenaga kerja yang berbasis kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
					1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas (Peserta akan melibatkan penyandang disabilitas)	15 Orang	20,000,000	48 Orang	Rp 72,000,000	DISNAKER
Kebijakan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi												
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Mutasi dan Promosi ASN	Tidak Spesifikasi Disabilitas (memberikan kesempatan bagi ASN penyandang disabilitas)	3 Dokumen	Rp -	3 Dokumen	Rp 441,724,960	BKDSDM
2	Memastikan Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Penyandang Disabilitas	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Tersedianya standar Jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Penyandang Disabilitas pada lingkup industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
					1 Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Adanya Perencanaan Tenaga kerja Makro)	50 Orang	Rp 10,000,000	Orang	Rp -	DISNAKER
3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/ lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (di dalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D).	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
					Pengadaan, Pemberhatian, dan Informasi Kepegawaian						
					1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan	Tidak spesifikasi Disabilitas (Memberikan kesempatan bagi CASN penyandang disabilitas)	1 Dokumen	Rp 10,000,000	1 Dokumen	Rp 10,000,000	BKDSDM

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Kebijakan I.Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru dan tenaga pendidik Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	800 Orang	Rp 93,493,893	800 Orang	Rp 93,493,893	DIKBUD
					2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	138 Satuan Pendidikan	Rp 59,998,796	138 Satuan Pendidikan	Rp 59,998,796	DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	55 Satuan Pendidikan	Rp 179,990,630	55 Satuan Pendidikan	Rp 179,990,630	DIKBUD
					2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	500 Orang	Rp 241,799,783	500 Orang	Rp 241,799,783	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi Penyandang Disabilitas)	60 Orang	Rp 100,468,911	60 Orang	Rp 100,468,911	DIKBUD
					2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	100 Satuan Pendidikan	Rp 46,124,784	100 Satuan Pendidikan	Rp 46,124,784	DIKBUD
Kebijakan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas											
1	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	800 Orang	Rp 93,493,893	800 Orang	Rp 93,493,893	DIKBUD
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	500 Orang	Rp 241,799,783	500 Orang	Rp 241,799,783	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Tidak Spesifik Disabilitas (Guru Berkompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	60 Orang	Rp 100,468,911	60 Orang	Rp 100,468,911	DIKBUD
Kebijakan 3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	1). Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas.	Sekolah yang melaksanakan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						
					1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengembangan karir pendidik dan tenaga Nonformal/Kesetaraan Kependidikan penyandang disabilitas)	12 Orang	Rp 80,000,000	12 Orang	Rp 80,000,000	DIKBUD
					2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tidak Spesifik Disabilitas (Adanya pelatihan layanan pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemenuhan Sekolah inklusif penyandang disabilitas)	10 Satuan Pendidikan	Rp 350,000,000	10 Satuan Pendidikan	Rp 350,000,000	DIKBUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tidak Spesifik Disabilitas (Pengembangan SDM dan Lembabaga bidang Seni Berdiferensiasi penyandang disabilitas)	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 30,000,000	DIKBUD
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
					1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas (Penyediaan kuota untuk peserta disabilitas di Bidang Olahraga)	20 Orang	Rp 50,000,000	40 Orang	Rp 100,000,000	DISPORA
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak Spesifikasi Disabilitas (Memberikan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Sekolah Penyandang Disabilitas)	20647 Orang	Rp 52,215,000	20698 Orang	Rp 60,215,000	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Produktif penyandang Disabilitas)	129564 Orang	Rp 70,329,000	130697 Orang	Rp 73,329,000	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Usia Lanjut Penyandang Disabilitas)	18264 Orang	Rp 61,601,000	19122 Orang	Rp 61,601,000	DINKES
					4 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai Penyakit Menular dan Tidak Menular)	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	DINKES
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana serta pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	3 Unit	Rp 200,000,000	3 Unit	Rp 200,000,000	RSUD
					2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana serta pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	3 Unit	Rp 200,000,000	3 Unit	Rp 200,000,000	RSUD
					4 Pengadaan Obat, Vaksin	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana serta pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	1 Paket	Rp 610,000,000	1 Paket	Rp 610,000,000	RSUD
			Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memnuhi Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesisifik disabilitas (Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar)	25 Unit	Rp 200,000,000	25 Unit	Rp 200,000,000	RSUD
			Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhannya masing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
			masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	masing di fasilitas pelayanan kesehatan.	Upaya Kesehatan Masyarakat						
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tidak Spesifik Disabilitas (Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana serta pelayanan rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas)	1 paket	Rp 500,000,000	1 paket	Rp 500,000,000	RSUD
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas	Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas.	Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
					1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak Spesifik disabilitas (Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan bagi masyarakat dan pennyandang disabilitas)	25 orang	Rp 250,000,000	25 orang	Rp 250,000,000	RSUD

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kebijakan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif											
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dan penyandang Disabilitas)	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	225,000,000	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kepada Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV penyandang Disabilitas)	5080 Orang	Rp 82,000,000	5085 Orang	Rp 85,000,000	DINKES
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan.	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyandang Disabilitas)	4135 Orang	Rp 25,000,000	4132 Orang	Rp 30,000,000	DINKES
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak Spesifik Disabilitas (memberikan Pelayanann Kesehatan Ibu Bersalin Penyandang Disabilitas)	3947 Orang	#####	3944 Orang	#####	DINKES
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak Spesifik Disabilitas (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir penyandangang Disabilitas)	3759 Orang	Rp 65,000,000	3756 Orang	Rp 70,000,000	DINKES
3					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan pelayanan Kesehatan pada Anak Balita Penyandang Disabilitas)	14517 Orang	Rp 45,000,000	14504 Orang	Rp 50,000,000	DINKES
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas (Memberikan Pelayanan Promosi pentingnya Kesehatan bagi penyandang Disabilitas)	1 Dokumen	Rp 27,000,000	1 Dokumen	Rp 30,000,000	DINKES
Kebijakan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1	Memperluas kepesertaan	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas	Perluasan cakupan Penyandang	Seluruh Penyandang Disabilitas yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	DINKES
			Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		-				
					1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional)	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	DINKES
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Penerima	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	kebutuhan Penyandang Disabilitas.	akan manfaat kepesertaan BPJS.	Disabilitas.	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.							
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota						
					1 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Tidak Spesifik Disabilitas (Terdapat Penyandang Disabilitas yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daeran dan Nasional)	17 Dokumen	#####	17 Dokumen	#####	DINKES
Kebijakan 4.Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1	Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas (Mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Dalam Sosilaisasi Program Gernas)	1 Dokumen	Rp 337,952,000	1 Dokumen	Rp 344,952,000	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-				

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Tahun				OPD/Instansi Penanggung jawab
							2023		2024		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas (Sosialisasi program GERMAS ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta secara rutin kepada Penyandang Disabilitas)	1 Dokumen	Rp 332,000,000	1 Dokumen	Rp 335,000,000	DINKES

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD Provinsi Bengkulu dilakukan untuk memastikan strategi dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Pemantauan dan evaluasi akan memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi dan rencana aksi bagi kepentingan penyandang disabilitas di masa mendatang, serta bagi kepentingan penyampaian laporan kepada pihak lain seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun kepada masyarakat.

Perbandingan tingkat ketercapaian antara perencanaan dengan target capaian dalam RAD PD Provinsi Bengkulu akan menjadi laporan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan elaborasi lebih lanjut dan menjadi bahan laporan yang akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan penyelenggaraan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) setiap tahunnya. Tim Koordinasi RAD PD Provinsi Bengkulu akan menjalankan perannya dalam pemantauan secara berkala dan terencana dengan melibatkan penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan dalam RAD PD Provinsi Bengkulu.

Mekanisme pemantauan pelaksanaan RAD PD Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui pengumpulan data secara rutin tentang situasi penyandang disabilitas dari Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan indikator-indikator pemantauan yang telah ditetapkan dalam RAD PD Provinsi Bengkulu, juga data mengenai realisasi anggarannya.

Tim Koordinasi dapat mengembangkan mekanisme pemantauan secara daring untuk kepentingan pengumpulan data dari tiap dinas/badan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pengumpulan data dilakukan secara manual.

Rekapitulasi data penyandang disabilitas dan anggaran ini akan dipaparkan dan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan konsultatif multi pihak secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. Pertemuan ini melibatkan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan isu disabilitas.

Pemantauan juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis dan supervisi oleh Tim Koordinasi terkait pelaksanaan RAD PD Provinsi Bengkulu. Untuk pelaksanaan evaluasi akan dilakukan setiap tahun sebagai bagian untuk memantau pencapaian target per tahun dari penyelenggaraan RAD PD Provinsi Bengkulu. Laporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Pusat.

Di tingkat daerah, penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi dari Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Koordinasi RAD PD Provinsi Bengkulu. Laporan pemantauan dan evaluasi tidak hanya mencakup substansi dari pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, juga meliputi realisasi anggaran.

Mekanisme pelaporan evaluasi pelaksanaan RAD PD Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Alur Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi



Tim Koordinasi RAD PD Provinsi Bengkulu wajib menyampaikan laporan evaluasi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Bappeda Provinsi paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Hasil evaluasi dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur cq. Bappeda Provinsi atau Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi untuk direkapitulasi. Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri PPN/Bappenas cq. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat akhir Juni pada tahun berikutnya, serta ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah sebagai pengampu/ penanggungjawab rencana aksi di daerah. Hasil evaluasi disampaikan kepada Presiden oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENUTUP

Upaya pemenuhan Hak-Hak Disabilitas sebenarnya telah diatur dalam konstitusi RI (UUD 1945) dan kemudian diperkuat dengan beragam UU di masa awal Republik ini berdiri dan semakin disempurnakan khususnya setelah pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas melalui UU No. 19 tahun 2011, dan UU Penyandang Disabilitas (2016) beserta peraturan-peraturan teknis yang menopangnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Walikota atau Gubernur.

Komitmen Indonesia dalam memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas telah tertuang pada UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diterjemahkan secara teknis di level nasional melalui RIPD pada PP Nomor 70 Tahun 2019. Hal ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target CRPD dan SDGs.

Untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi pelaksanaannya di lapangan, dan hasilnya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Bengkulu disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan konsep pemenuhan hak dan pembangunan multi-sektoral dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait, termasuk penyandang disabilitas dan disusun sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku dan memudahkan Pemerintah dalam pelaksanaan, rencana aksi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAD PD Provinsi Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT PROVINSI BENGKULU,
HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

